

MADURA 2055

Seri 1
Masyarakat Arus Bawah & Menengah Madura

Ada banyak dimensi dalam kehidupan ini, dan kita dapat mengklasifikasinya lewat berbagai macam kategori, baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan berbagai macam kategori lain. Itu berlaku dalam masyarakat apa saja, tidak peduli suku, agama, ras, dan bahkan dalam teritori apa pun. Secara akademik, ragam dimensi itu membuatnya sangat menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih jauh. Dan tentu, ini juga berlaku untuk Madura dan masyarakatnya.

Buku yang ada di tangan Pembaca ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menelaah, mengkaji, dan menganalisis kompleksitas kehidupan masyarakat Madura yang banyak dimensinya itu. Di dalamnya, khusus untuk edisi ini, dikaji banyak sekali tema-tema krusial seperti kelas menengah, agenda konsolidasi demokrasi, peran politik kiai, perjodohan perempuan, seksisme, bisnis budaya, internet, akses informasi, gerakan arus bawah, pemberdayaan psikologi, media lokal, dan banyak tema lain.



inara.publisher | inara.publisher | 0813.3612.0162 | www.inarapublisher.com



Seri 1
MADURA 2055
Masyarakat Arus Bawah & Menengah Madura
Fandi Rosi Sarwo Edi
Surokim



Editor:
Fandi Rosi Sarwo Edi | Surokim

SERI 1 MADURA 2055

Masyarakat Arus Bawah & Menengah Madura

INARA PUBLISHER

Pengantar:
Dr. Drs. Ec. H. Muhammad Syarif, M.Si. (Rektor UTM)

Seri 1

Madura 2055

Masyarakat Arus Bawah & Menengah Madura

Seri 1

Madura 2055

Masyarakat Arus Bawah & Menengah Madura

Editor:

Fandi Rosi Sarwo Edi
Surokim

Penulis:

Iskandar Dzulkarnain; Mohammad Afifuddin;
Surokim; Suci Suryani;
Netty Herawati

Kata Pengantar:

Rektor Universitas Trunojoyo Madura
Dr. Drs. Ec. H. Muhammad Syarif, M.Si.

INARA PUBLISHER

2021

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Fandi Rosi Sarwo Edi, Surokim [Ed.]

MADURA 2055

Masyarakat Arus Bawah & Menengah Madura

Ed. 1, -1- Malang: Inara Publisher, 2021

xxviii + 152 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-98877-97

1. Aspek Spesifik tentang Budaya dan Kebudayaan

I. Judul

306.4

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apapun, baik berupa fotokopi, scan, PDF, dan sejenisnya.

Anggota IKAPI No. 306/JTI/2021

Cetakan I, Desember 2021

Hak penerbitan pada Inara Publisher

Desain Sampul: Dana Ari

Layout Isi: Nur Saadah

Dicetak oleh **PT Cita Intrans Selaras** (Citila Grup)

Diterbitkan pertama kali oleh **Inara Publisher**

Jl. Joyosuko Agung RT.3/RW.12 No. 86 Malang

Telp. 0341-588010/CS. 081336120162

Email: inara.publisher@gmail.com

Web: www.inarapublisher.com

Pengantar Editor

Pusat Studi Sosial dan Budaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (PS2B FISIB) selalu berkontribusi melalui ide-ide tentang Madura. Jika sebelumnya telah menerbitkan 5 buku Madura, pada kesempatan ini PS2B akan kembali berkontribusi dengan menerbitkan buku Madura 2055. Buku Madura 2055, sama dengan tahun sebelumnya, menerbitkan dua seri yang akan terbit, seri I, *Madura 2055: Masyarakat Arus Bawah dan Menengah Madura* dan seri II, *Madura 2055: Pariwisata, Wisata Halal, dan Wisata Syariah*).

Pada seri I, buku *Madura 2055: Masyarakat Arus Bawah dan Menengah Madura* memuat sebuah *book chapter* yang menyajikan kajian secara teoritis dalam melihat peran serta masyarakat arus bawah dan menengah Madura. Kemajuan Madura di berbagai aspek masih perlu ditingkatkan dan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, tidak terkecuali masyarakat Madura. Dalam pembangunan daerah, tidak ada satu pun pihak yang hanya puas sebagai “penonton” yang pasif dan mengikuti keadaan, masyarakat harus berperan aktif berdasarkan kapasitas dan proporsi yang dimiliki.

Kajian buku Madura 2055 seri I, diharapkan dapat menggambarkan masyarakat Madura dalam berbagai sektor. Masyarakat turut memperjuangkan nasib sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki. Senantiasa merespon dan bersikap berdasarkan kebijakan publik dengan berbagai konsekuensi. Peran serta masyarakat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas informasi yang telah diperoleh sebagai dasar posisi daya tawar dan arah bagi penentuan peran strategis dalam pembangunan daerah. Peran serta masyarakat bagi pemerintah daerah sebagai motivasi dan inspirasi dalam menjalankan tugas bagi masyarakatnya sendiri. Dengan terbitnya buku Madura 2055, sekali lagi para akademisi FISIB ingin berkontribusi dalam pemikiran untuk kemajuan Pulau Madura dan masyarakat di semua wilayah.

Ucapan terima kasih dikhususkan kepada Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Drs. Ec. H. Muhammad Syarif, M.Si dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Surokim, S.Sos, M.Si yang telah bersedia memberikan sambutan pada setiap penerbitan buku Madura. Ucapan terima kasih yang luar biasa juga kami haturkan pada para dosen di lingkup FISIB yang selalu berkontribusi menuliskan ide dan gagasan tentang Madura. Akhir kata, semoga buku Madura 2055 menguatkan peran FISIB sebagai salah satu pusat data Madura, khususnya di bidang sosial dan budaya masyarakat Madura melalui rujukan digital Madura.

Bangkalan, November 2021
Editor

Fandi Rosi Sarwo Edi
Surokim

Kata Pengantar

DR. DRS EC. H. MUHAMMAD SYARIF, M.SI.

Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Kekuatan Arus Bawah, Revolusi Teknologi, dan Komunikasi Digital akan Mengubah Madura

Assalamu'alaikum wr.wb.

Membaca Madura serasa tiada habisnya. Kawasan ini menjadi laboratorium ilmu sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang menarik karena dinamika sosial kemasyarakatan yang ada di dalamnya. Hingga sekarang masih banyak misteri, mutiara terpendam, dan hal potensial lain yang belum terungkap ke publik sehingga menjadikan kawasan ini selalu menjadi kawasan yang menarik untuk dilakukan riset dan pengembangan.

Perubahan lingkungan, khususnya disebabkan determinasi teknologi membawa efek yang signifikan bagi Madura. Masyarakat dan wilayah di kawasan ini mulai bergerak, pelan tapi pasti, berubah dari semula yang relatif steril-tertutup menjadi wilayah yang mulai terbuka-demokratis. Iklim keterbukaan telah

mendorong perubahan lanskap politik dan demokrasi, khususnya dalam peningkatan akses dan partisipasi politik arus bawah.

Penggunaan teknologi komunikasi media sosial (medsos) yang masif menjadi pemantik munculnya kesadaran, keswadayaan, relasi-relasi kuasa baru antar warga dan di dalam masyarakat Madura. Medsos akhirnya menjadi medium penguatan partisipasi dan peningkatan akses publik dalam diskursus isu-isu publik, pembentukan opini, dan mempengaruhi *policy* publik. Publik mulai terlibat, berharap ada kesetaraan dan posisi lebih egaliter dalam pembahasan berbagai urusan kepentingan bersama. Sehingga *policy* yang dibuat negara dan pemerintah, termasuk di dalamnya oleh badan publik, bisa lebih aspiratif sesuai kepentingan masyarakat.

Dalam beberapa waktu terakhir, kita juga bisa lihat menguatnya gerakan politik dan sosial masyarakat Madura menuntut perubahan-perubahan kebijakan yang tidak sejalan dan menguntungkan kepentingan masyarakat. Mereka kian menyadari posisi strategisnya yang juga memiliki posisi daya tawar. Publik tidak lagi mau sekadar menjadi obyek, tetapi ingin berpartisipasi aktif dalam arus dinamika pembangunan sosial politik dan budaya masyarakat Madura.

Perkembangan mutakhir yang menarik adalah pada tuntutan pengelolaan badan-badan publik dengan prinsip *good governance*. Tuntutan itu merambah cepat pada hampir semua sektor di Madura. Publik memiliki keinginan agar pemerintah daerah bisa berubah lebih baik. Pemerintah daerah bisa menangkap aspirasi untuk perbaikan pelayanan publik yang lebih baik. Lanskap politik juga dituntut untuk kian terbuka dan responsif terhadap kehendak dan aspirasi publik. Publik ingin membuka ruang interaktif dialogis dalam *policy* kepentingan publik. Publik mengharapkan adanya ruang *public sphere* yang lebih demokratis guna menyampaikan aspirasi, ide, opini, pandangan, dan juga gagasan dalam pembangunan yang melibatkan mereka. Akses dan partisipasi menjadi kata kunci dalam konteks ini.

Tren untuk menguatkan kedaulatan publik terus bergema seiring dengan gerakan demokratisasi di segala bidang di Madura. Gerakan keterbukaan dan transparansi yang menjadi tuntutan publik diyakini sebagai pintu masuk dalam meningkatkan akses, partisipasi, dan juga pengawasan aktif masyarakat. Sejauh ini, gerakan-gerakan arus bawah itu cukup tertib dan fungsional bagi upaya perbaikan sistem dan atmosfer politik di Madura.

Seiring dengan makin berkembangnya penggunaan teknologi dan terpaan informasi, akses dan partisipasi masyarakat juga terus mengalami perubahan. Saat ini masyarakat bisa memperoleh informasi lebih cepat. Masyarakat bisa terlibat lebih aktif dalam melaporkan, membagi informasi yang ada di sekitar mereka, dan sekaligus bisa memanfaatkan media sebagai wahana komunikasi publik. Komunikasi dan kanal media publik telah mengubah basis-basis gerakan masyarakat, khususnya arus bawah. Publik mulai terlibat dalam diskusi-interaktif, tanya-jawab, memberi-menerima (*take and give*), dan mendorong ruang publik yang fungsional bagi pemberdayaan masyarakat bawah.

Media sosial, menurut Surokim (2018) benar benar menjadi 'bintang baru' dan peta jalan percepatan peningkatan partisipasi publik guna mendorong transformasi perubahan sosial di Madura. Medsos muncul menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan ide dan upaya saling melengkapi dan mengoreksi arah dan gerak pembangunan di Madura. Ruang itu juga berubah menjadi ruang partisipasi publik yang lebih jujur karena partisipasi publik. Kendati harus diakui, ruang itu juga potensial untuk mengalami distorsi, khususnya terkait disinformasi.

Kesadaran masyarakat terhadap penguasaan dan akses informasi publik juga kian meningkat. Masyarakat Madura yang memiliki modal sosial dan kultural harus menjadi subyek dan memiliki swadaya atas informasi di tingkat lokal. Perkembangan masyarakat Madura melalui media sosial harus menjadi *well informed*. Akses, ruang, dan media informasi publik merupakan

salah satu bentuk kebutuhan bagi aktualisasi diri masyarakat. Dalam konteks masyarakat Madura, media sosial akan dapat menjadi salah satu bentuk katalisator masyarakat untuk memahami diri dan lingkungannya. Warga akan memiliki kepercayaan diri karena memiliki kesetaraan dalam penguasaan informasi (Surokim, 2018).

Peran serta masyarakat bawah bukan hanya menerima informasi, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam mencari informasi yang disebarkan melalui media ke masyarakat. Ruang publik media sejatinya adalah tempat bertemunya kepentingan bersama. Ruang ini terbangun atas orang per orang, yang secara bersama disebut “publik”, yang mengartikulasikan kepentingan/kebutuhan masyarakat melalui media. Wilayah ini merupakan zona bebas dan netral yang di dalamnya berlangsung dinamika kehidupan warga secara personal, yang bersih dan terbebas dari kekuasaan negara, pasar dan kolektivisme (komunalisme) serta bertanggungjawab (Ashadi, 1997; dalam Surokim, 2018).

Revolusi komunikasi di era digital juga membawa perubahan signifikan dan sekaligus juga radikal terhadap penggunaan media komunikasi. Media digital muncul menjadi medium euforia kebebasan masyarakat dan akan menjadi salah satu solusi bagi peningkatan akses dan keterbukaan informasi masyarakat. Media sosial ini diharapkan dapat menjadi media pemberdayaan warga dan bisa mendorong kecerdasan publik menjadi subyek komunikasi.

Sudah saatnya gerakan arus bawah masyarakat melalui penggunaan teknologi komunikasi ini dicermati dan dipahami lebih komprehensif, sehingga kita tidak salah dalam menangkap arah perubahan yang diaspirasikan masyarakat. Relasi antar warga juga berkembang lebih demokratis dan lebih terbuka. Warga (netizen, *peny.*) mulai berani untuk menyampaikan aspirasi, merasakan kemerdekaan, kebebasan berekspresi, dan tidak lagi dalam tekanan kekuasaan negara dan pasar yang membuat warga

takut, apatis, diam, dan enggan menyampaikan gagasan, dan pendapat terkait dengan kehidupan publik.

Masyarakat mulai berani menyampaikan aspirasinya, baik melalui jalur formal maupun non formal, melalui perbincangan langsung (*face to face*) maupun melalui perantara media massa. Tren ini juga telah membawa perubahan kehidupan politik yang lebih demokratis, egaliter, dan juga mampu mengembalikan hak-hak sipil yang selama ini diabaikan. Keberagaman pendapat juga semakin terlihat dalam diskursus media baru.

Tuntutan perubahan dan demokrasi di segala bidang, menurut Surokim (2018) adalah respons atas dinamika masyarakat yang terus berkembang. Masyarakat kini terhubung ke dalam berbagai jaringan informasi masyarakat dunia yang tidak bisa lagi dihambat dan diisolasi, sehingga memunculkan resistensi jika terus dikendalikan. Pengalaman dalam beberapa dasawarsa selama kekuasaan orde baru, di mana kehidupan masyarakat sepenuhnya dikendalikan oleh elite penguasa hingga membuat masyarakat sekadar menjadi objek pembangunan. Partisipasi masyarakat sejatinya semu karena bukan berangkat dari inisiatif murni keswadayaan mandiri warga, tetapi lebih mirip mobilisasi yang digerakkan dari luar oleh para elite penguasa. Situasi ini membuat warga hanya menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan dan kemudian dipinggirkan begitu tidak dibutuhkan. Masyarakat hanya menjadi pelengkap dan tidak ikut terlibat aktif dalam membahas berbagai hal strategis menyangkut kehidupan masyarakat (Surokim, 2018).

Situasi hegemonik yang berlangsung cukup lama (hampir tiga dasawarsa) menjadikan masyarakat apatis dan memilih jalan aman untuk tidak menyuarkan aspirasi dan berseberangan dengan penguasa. Masyarakat tidak berani melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, khususnya yang menyangkut pelayanan publik. Akibat kurangnya pengawasan publik, maka malpraktik penyelenggaraan pemerintahan hampir terjadi di semua

level. Protes publik yang paling keras adalah terkait dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Seiring dengan reformasi politik dan munculnya kesadaran hak sipil untuk terlibat dalam penyelenggaraan urusan publik membuat peran berbagai aktor strategis terus mengalami tarik ulur. Elite yang selama ini memainkan peran dominan dalam penyelenggaraan kenegaraan juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan mutakhir dan mereposisi diri dalam relasi yang lebih sejajar dan tidak lagi berada dalam posisi lebih dominan. Peningkatan kesadaran publik membuat tuntutan akan peningkatan penyelenggaraan urusan publik lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi kebaikan bersama semakin mengemuka.

Penguatan peran sipil warga negara menurut para ahli (Rahmiati, 2007; Maryani, 2011; dalam Surokim, 2018) sebenarnya bertumpu kepada pengetahuan dan informasi. Pengetahuan dan informasi menjadi basis bagi munculnya kemandirian dan tumbuhnya partisipasi publik. Informasi bagi masyarakat modern adalah aset yang bisa didayagunakan untuk memperoleh keunggulan dan daya saing. Mengelola informasi menjadi aset dan komoditas adalah salah satu tahapan menuju industri jasa masyarakat modern. Dengan demikian, persoalan akses memegang peranan penting untuk membuka dan mendorong partisipasi publik (Rennie, 2005). Masyarakat harus didorong untuk memperoleh akses dan sumber informasi sehingga memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup dalam mencari solusi persoalan publik, khususnya terkait upaya menuju kemandirian warga.

Selama ini, akses informasi dan pengetahuan lebih banyak diperoleh melalui media dan lembaga pendidikan. Dalam konteks masyarakat pedesaan, dua institusi itu memiliki pengaruh dan dampak yang kuat terhadap pembentukan daya kritis dan pengetahuan masyarakat. Melalui lembaga pendidikan, masyarakat memperoleh bekal literasi, sementara melalui media massa,

masyarakat memperoleh pengetahuan mutakhir terkait perkembangan lingkungannya.

Institusi media massa dalam masyarakat juga memiliki peran untuk mendorong keterbukaan informasi, mengingat selama ini sebagian besar masyarakat pedesaan masih tradisional, belum demokratis, dan linear. Arus informasi juga cenderung bersifat dari atas ke bawah (*top down*) (Rahmiati, 2007). Media massa diyakini bisa mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan pembangunan yang selama ini informasinya tertutup dan menjadi lebih demokratis.

Komunikasi demokratis diperlukan untuk pengembangan masyarakat pedesaan. Masyarakat akan terus belajar menjadi komunikatif, mengembangkan sikap terbuka, berada pada posisi setara, egaliter, dan saling respek. Hal ini positif untuk menciptakan tatanan masyarakat demokratis dan mengeliminasi dominasi antara satu kelompok dan kelompok lainnya, serta dapat mengontrol kekuasaan. Intensitas komunikasi interaktif kolektif itu menjadi awal pembentukan ruang publik yang sehat.

Masyarakat Madura yang paternalistik dan hierarkis menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan demokratisasi komunikasi. Untuk itu, perlu usaha untuk membuka informasi melalui media sebagai pintu awal untuk menciptakan ruang publik terbuka, sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga tentang hak-hak komunikasi. Masyarakat Madura harus didorong untuk memiliki media yang membahas tentang permasalahan mereka, agar masyarakat semakin melek terhadap informasi dan menjadikan informasi sebagai salah satu basis pengembangan diri. Bagaimanapun, informasi adalah bagian dari ilmu pengetahuan dan itu aset berharga bagi masyarakat modern. Jika informasi dapat dikuasai, maka itu akan menjadi modal sosial dan ekonomi masyarakat. Apalagi jika penyebaran informasi itu cepat, adil dan merata, maka akan dapat membentuk masyarakat yang cerdas dan mandiri dalam meraih modal sosial ekonomi (Surokim, 2018).

Keterbukaan Informasi

Perjalanan demokrasi Indonesia, sebagaimana dicatat Surokim (2018), menghadapi tantangan yang kompleks. Idealnya, demokrasi seharusnya tumbuh secara alamiah sesuai dengan potensi budaya, politik, dan masyarakat. Namun, perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami fase naik turun. Salah satu yang menjadi indikator adalah posisi dan kekuatan publik sebagai benteng pertahanan dan kualitas demokrasi. Jika menilik perjalanan demokrasi Indonesia, harus diakui ada percepatan sehingga proses konsolidasi dan maturasi demokrasi ada yang yang timpang dan tidak matang, dan beberapa proses bahkan menimbulkan paradoks. Seharusnya proses pematangan demokrasi diikuti dengan kesadaran kolektif warga dalam memperjuangkan *virtue* publik berkelanjutan.

Kekuatan dan posisi publik menjadi benteng demokrasi karena ia menjadi pengawal utama cita-cita demokrasi. Agen ini relatif steril dari kepentingan bisnis dan kekuasaan, dan menjadi pengawal sejati perjalanan demokrasi demi kebaikan publik. Posisi agen ini seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuatan pasar dan negara, dan senantiasa mampu memperkuat diri menjadi penyeimbang bagi kekuatan politik agen lain. Posisi publik di tengah kontestasi politik tidak boleh berada dalam kuasa hegemonik dan harus sejajar dengan aktor politik yang lain. Sehingga publik memiliki soliditas bagi pengawal perjalanan demokrasi. Kenyataannya, selama ini posisi dan kekuatan konsolidasi publik sering naik turun, tergantung pada soliditas publik. Pada saat awal reformasi, kita melihat posisi publik yang kuat, tetapi terus melemah seiring dengan mobilisasi tokoh-tokoh sipil yang naik menjadi kekuatan negara (*penguasa, peny.*).

Harus diakui, relasi publik dan negara serta pasar selama ini agak timpang. Publik senantiasa dalam posisi yang terus melemah seiring dengan pertumbuhan kapitalisme dan liberalisasi ekonomi negara. Peran publik semakin termarginalisasi oleh kekuatan pasar dan negara. Situasi ini memang terjadi hampir di berbagai negara

yang tengah mengalami transisi demokrasi. Alih-alih menuju demokrasi, itu justru melahirkan liberalisasi yang mengancam kekuatan dan kedaulatan publik.

Patut disimak pula bahwa hampir sebagian besar negara maju juga memiliki pengalaman dalam menghadapi liberalisasi. Mereka mampu menghadang liberalisasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan mendorong penguatan *civil society*. Penguatan *civil society* melalui instrumen keterbukaan informasi mampu mendesak agenda-agenda publik menjadi isu utama. Proses demokrasi akan bisa dikendalikan dan tetap berada di relnya dengan baik. Cita-cita untuk memiliki tata pemerintahan yang baik untuk masa depan yang lebih baik bisa dijalankan dengan jalan memperkuat peran publik. Agar publik mampu menjadi pengawas yang baik, maka berbagai informasi dan adanya akses yang cukup terhadap informasi publik itu harus dibuka. Selama ini justru ketertutupan informasi itu yang membuat malpraktik dan dominasi kelompok tertentu atas urusan publik. Di situ, letak asal muasal dari munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Keterbukaan informasi, merujuk Surokim (2018), memang tidak berprinsip membuka segalanya, tetapi tetap berada dalam menjaga kepentingan publik. Dengan demikian, pengelolaan informasi publik juga didesain sesuai perkembangan dan kebutuhan publik. Informasi dapat dikategorikan dalam beberapa kategori agar dapat didayagunakan secara efisien dan bermanfaat. Informasi publik adalah informasi yang terkait dengan kemaslahatan publik. Publik memiliki hak untuk tahu karena menyangkut hajat hidup, masa depan, dan nasib atas perkembangan masa depannya. Dengan demikian, ini menjadi hak dasar dan harus dijamin oleh negara. Jika hak ini sudah dijamin, maka publik harus terus disadarkan dan didorong untuk memiliki kesadaran untuk menggunakan secara bertanggungjawab. Bertanggungjawab harus menjadi perhatian, karena masih banyak pihak tidak mampu

bertanggungjawab atas informasi yang didapatnya, sehingga sering terjadi distorsi.

Keterbukaan informasi, tambah Surokim (2018), juga akan mendorong kebijakan dan regulasi menyangkut publik akan lebih berkualitas. Alasan yang bisa diajukan karena regulasi telah mendapat masukan, aspirasi, pendapat, dan dukungan publik. Publik akan turut berkontribusi atas kebijakan dan regulasi tersebut, sehingga secara moral memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung regulasi tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini akan membuat relasi masyarakat dan negara menjadi positif dan saling mendukung.

Dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan informasi juga akan membuat keluhan dan keberatan publik justru menjadi berkurang. Publik telah mendapatkan saluran atas berbagai pertanyaan yang selama ini muncul dalam benaknya dan tersedia jawaban melalui berbagai media informasi publik. Keterbukaan benar-benar merupakan investasi masa depan.

Sejarah, menurut catatan Surokim (2018), juga membuktikan bahwa bangsa yang maju selalu bisa adaptif, cepat, dan bisa memanfaatkan peluang dalam perubahan. Semua itu direspons melalui keterbukaan informasi. Terbukti, negara yang responsif terhadap informasi memiliki keunggulan untuk memperoleh keuntungan. Apalagi saat ini aset yang penting bagi negara telah berubah, dari yang sifatnya fisik menjadi non fisik. Kreativitas dan inovasi menjadi kunci dalam mengelola aset non fisik yang sifatnya *intangible* tersebut. Negara yang responsif terhadap informasi seperti USA, Kanada, Jepang, Finlandia, Perancis, Jerman, Inggris, dan Australia, terbukti telah memperoleh keuntungan lebih cepat atas perubahan yang ada di masyarakat. Kini negara tersebut juga kian membuka diri dengan melakukan kerja sama untuk merancang skema upaya responsif bersama masyarakat (media massa dan LSM) dengan prinsip kolaboratif dan saling percaya guna mendorong kesetaraan dan keadilan dalam bidang informasi.

Masyarakat maju semakin menuntut adanya kesetaraan dan saling berbagi (*shared meaning*) kepemilikan informasi, berbanding sejajar dengan tingkat ekonomi, budaya, dan penguasaan teknologi.

Masyarakat harus terus didorong agar selalu butuh informasi. Tahapan inilah yang sering disebut para ahli sebagai *learning society*, masyarakat yang tiada henti belajar. Belajar dan menjadikan informasi menjadi aset dan pengembangan industri kreatif di masyarakat. Informasi untuk masa depan yang lebih baik dan melalui keterbukaan informasi untuk memperoleh jaminan akan akses dan partisipasi publik.

Dalam keterbukaan informasi publik, menurut catatan Surokim (2018), semua pihak khususnya badan publik, harus menyiapkan diri dan terus beradaptasi dengan perubahan. Sebagai konsekuensi, hak publik untuk memperoleh Informasi yang dikuasai oleh badan publik. Kewajiban badan publik adalah untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik (secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana). Publik dijamin untuk mengajukan keberatan dan gugatan apabila mendapat hambatan dalam memperoleh informasi publik. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi publik, kecuali informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas.

Reposisi *Mindset* Netizen

Surokim (2018) mengemukakan bahwa siapa yang menguasai informasi, maka ia yang akan mendapat kekuasaan. Mereka yang menguasai informasi akan memiliki nilai tambah, keunggulan, dan keuntungan. Selama ini masyarakat pedesaan tidak cukup informatif, karena sumber informasi relatif tertutup dan tidak terbuka. Sumber informasi tersebut berada di kalangan tertentu dan tidak dibagi ke publik.

Informasi mengandung kuasa, baik dalam politik, ekonomi maupun budaya. Dalam masyarakat tradisional, kuasa informasi itu

biasanya berada pada elite dan tokoh tertentu. Informasi itu sering tidak terbagi ke publik. Akibatnya, informasi menjadi kuasa bagi elite untuk melegitimasi kekuasaannya. Patut diwaspadai jika elite itu tidak memahami prinsip kebaikan publik dan berupaya menutup informasi itu, dan itu biasanya terkait menyembunyikan malpraktik urusan publik.

Dalam masyarakat yang tertutup biasanya muncul tokoh sentral dan menjadi rujukan. Tokoh itu cenderung akan menjadi *public opinion* dan tokoh sentral, hingga dalam tahap tertentu pada masyarakat tradisional, tokoh-tokoh tersebut menjadi kultus personal. Kecenderungan tokoh-tokoh tersebut tampil menjadi pribadi *introverse* yang kuat dan jauh dari koreksi serta kritik (Joko Wahyono, 2015). Dalam jangka waktu lama, hal ini membuat publik memiliki kepatuhan yang besar dan kadang memaklumi pelanggaran-pelanggaran kebaikan publik. Pengawasan publik menjadi nihil karena ketergantungan yang tinggi terhadap tokoh-tokoh tersebut. Situasi ini menurut banyak ahli dianggap sebagai *pseudo* demokrasi.

Kita semua sudah belajar dari sejarah bahwa negara-negara maju telah melewati tahapan di mana setiap warga negara memiliki peran serta dan kontribusi terhadap kehidupan bersama. Semua memiliki hak untuk memperoleh kemajuan melalui berbagai peluang. Setiap warga memiliki kesempatan untuk berkompetisi meraih jalan terbaik bagi kehidupannya. Jika situasi ini mampu diwujudkan, maka keswadayaan publik akan muncul dan di situlah sejatinya demokrasi dimulai.

Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk menjadi *public opinion* sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Keberadaan kultus personal harus direduksi supaya kekuasaan tidak menjadi absolut dan partisipasi publik bisa tumbuh kembang. Masyarakat harus merasa aman (*secure*) untuk menyampaikan gagasannya dan tidak berada dalam bayang-bayang kultus personal tersebut.

Jika kita membaca sejarah, memang majunya sebuah negara tidak ditentukan oleh lamanya negara itu berdiri, jumlah dan keunggulan sumber daya alam, dan juga ras warna kulit. Perbedaannya ada pada mental, sikap, dan perilaku masyarakat yang *open minded*. Singkatnya, penguasaan ilmu teknologi dan *open minded*. Dalam konteks masyarakat modern, *open minded* tersebut terkait dengan kemampuan untuk meraih peluang dengan meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang. Sesungguhnya masa depan bangsa tetap dikonstruksi melalui proses yang terus diciptakan dan tidak sekadar menunggu nasib dan berkah zaman. Terbukti, bangsa yang maju adalah bangsa yang adaptif, cepat, dan meraih keunggulan.

Penting bagi masyarakat Madura untuk merubah pola pikir bahwa *open mindset* akan membawa implikasi dan manfaat yang lebih besar dari kemudaratannya (kerugian). Bagaimanapun, persaingan saat ini adalah persaingan global yang lebih mementingkan kualitas dan tidak menyoal dari mana pun datangnya ide dan gagasan itu. Masyarakat Madura harus mulai melihat dunia luar untuk memperoleh peluang dan daya saing. *Open mindset* akan justru membawa dampak lebih besar bagi kehidupan publik. Masyarakat akan tergabung dalam jaringan masyarakat dunia yang terkoneksi, saling respect, dan juga menjauhkan dari konflik yang selama ini menjadi sumber masalah masyarakat modern. Komunikasi adalah kata kunci bagi masyarakat modern untuk saling berinteraksi, saling respect, dan saling berkolaborasi. Semua itu bisa dimulai jika kita mau membuka diri.

Era Digital dan Teknologi Komunikasi sebagai Determinan

Perkembangan teknologi digital tidak dipungkiri telah mengubah masyarakat dan struktur kehidupan masyarakat secara drastis dan bahkan cukup fundamental. Teknologi digital telah membawa cara-cara baru dan pola adaptasi baru dalam kehidupan masyarakat, sekaligus membutuhkan proses dan strategi adaptasi

baru. Teknologi digital tengah mengubah zaman lebih cepat dan juga masif. Teknologi digital memungkinkan kita terkoneksi dengan semua pihak di mana saja, kapan saja, dan juga bersama siapa saja. Penggunaan teknologi ini secara sosial, ekonomi, dan politik menjadi terkoneksi, sehingga terjadi model *sharing* dalam hampir semua sisi kehidupan ekonomi politik.

Saat ini kita tidak lagi terhambat dengan ruang dan waktu. Orang bisa terhubung dan menjalin relasi lebih bebas, tanpa sekat, dan bisa melakukan komunikasi dan transaksi di mana saja dan kapan saja. Tentu saja selalu ada konsekuensi dalam konteks ini, mengingat teknologi sesungguhnya bersifat netral dan sangat tergantung kepada penggunaannya: mau dibuat untuk apa. Teknologi selalu berdimensi ganda, laksana pisau bermata dua.

Andriadi (2017) mengemukakan bahwa teknologi digital akan memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi warga karena memiliki kelebihan interaktif dan multimedia. Dengan teknologi digital, seseorang bisa menonton video, membaca teks, dan mendengarkan audio secara bersamaan. Teknologi komunikasi massa sebelumnya tidak mampu melakukan hal ini. Teknologi digital juga memungkinkan seorang pengguna untuk membuat pesan sendiri, mempublikasikan konten, terlibat dalam interaksi *online*, dan komunikasi dua arah (Andriadi, 2017). Efektivitas dan efisiensi media *online* bisa meningkatkan partisipasi dari *online* ke *offline*.

Kita tengah memasuki era digital 4.0 yang disebut-sebut berjalan relatif cukup cepat. Bahkan kedatangan era baru juga sudah mulai dirasakan. Sebagaimana disebut Subiakto (2021), teknologi pasca digital, yakni teknologi *blockchain* dan quantum. Teknologi benar-benar muncul menjadi faktor determinan kehidupan masyarakat saat ini. Percepatan ini tentu saja butuh kesadaran (*awarenes*), kewaspadaan (*alertnes*), kesigapan, dan kesiapsiagaan (*readiness*).

Fenomena melimpahnya informasi seiring dengan pemakaian gawai (*smartphone*) membuat budaya *cyber* dan digital kita

berkembang kian kompleks dan kian luas. Bahkan bisa kian tak terkendali, mengingat konten apa saja aktif berseliweran di internet tanpa batas. Isi media kian melimpah dan juga kompleks. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Konten negatif seperti fitnah, hoax, dan misinformasi muncul menjadi problem mutakhir dan memantik konflik *online* antar pelaku komunikasi. Perubahan konflik fisik sudah berubah tempat dan menjadikan medsos sebagai medan pertempuran baru. Semua ini secara telanjang dapat diikuti di medsos sebagai jejak digital tanpa batas (*borderless*).

Media sosial memang bisa mempertemukan semua kepentingan dengan kebebasan. Semua aktivitas netizen secara tidak sadar bisa terekam dan bisa menjadi data yang bisa dikapitalisasikan. Berkomunikasi dengan siapa saja, melakukan apa saja, semua terdeteksi dan bisa diproyeksi sebagai tren dan kebutuhan masa depan. Tak syak lagi, medsos bisa menjadi pengawas abadi perkembangan *habit* dan aktivitas sehari-hari kita. Data pribadi yang bisa diawasi sepanjang waktu dan bisa dipolakan menjadi data yang bisa dikonversi dalam beragam kepentingan. Perilaku publik di era digital mudah dipotret dan diamati, termasuk bagaimana perubahan bentuk dan polanya. Kebiasaan kita di media sosial dijadikan data potensial untuk kapitalisasi. Kita diawasi medsos sehari-hari. Kebiasaan dan kesukaan kita dibuatkan *big data* sebagai rekam jejak digital.

Perubahan drastis dan radikal tersebut membuat pola adaptasi masyarakat juga menghadapi situasi yang problematik. Apalagi data-data pribadi di medsos juga bisa saja digunakan secara tidak bertanggungjawab. Sementara di sisi lain, regulasi juga sering ketinggalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Media baru akan menjadi kanal favorit dan akan bisa menjadi panduan efektif untuk mengetahui bagaimana aspirasi publik saat ini dan di masa depan. Penguasaan data menjadi kunci di masa depan. Perubahan teknologi bisa terjadi sangat cepat dan mungkin lebih cepat dari apa yang kita bayangkan.

Keterlibatan netizen dalam isu politik, ekonomi, dan lainnya, dalam bentuk *sharing* memunculkan kebebasan dalam dunia digital. Di balik kebebasan itu, muncul problem seperti fanatisme dan chauvinisme. Lalu muncul persaingan dalam bentuk perang-perang baru. Ada *buzzer*, *influencer*, *cyber army*, *cyber troops*, dan gejala menguatnya radikalisme atas nama kelompok, dan lain-lain. Semua itu jelas butuh antisipasi, sehingga perkembangan teknologi ini bisa diantisipasi sejak awal untuk mengurangi dampak negatif.

Dinamika dan potret itu cepat atau lambat juga akan mempengaruhi dinamika masyarakat Madura. Jika kita terus bisa mendiskusikan Madura, maka saya yakin perkembangan Madura akan fungsional bagi pembangunan peradaban Madura. Di sinilah letak pentingnya kajian dan diskusi, sebagai tradisi masyarakat literasi. Paling tidak, ada tiga faktor determinan penting yang selalu menarik untuk dicermati: teknologi, pandemi, dan lingkungan hijau. Ini akan menjadi faktor penting dalam membaca Madura masa depan, khususnya mencermati pergerakan arus bawah Madura.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah salah satu bentuk difusi informasi publik dan pengetahuan mengenai dinamika perubahan sosial di Madura. Sebagai sebuah ikhtiar untuk mendorong diskursus publik, tentu saja saya menyambut baik semua upaya yang dilakukan oleh para dosen FISIB untuk terus berbagi pengetahuan mengenai Madura kepada khalayak luas. Saya juga percaya bahwa publikasi mengenai Madura akan membuat kawasan ini akan kian diperhatikan, dikenal, dan membuat Madura menjadi kawasan yang terus bisa diperbin-cangkan. Sekaligus juga mendapatkan solusi atas masalah dan problem yang sedang dihadapi, sehingga bisa berkembang baik sebagaimana diharapkan masyarakatnya. Tentu saja, hal itu

sejalan dengan tekad UTM untuk menjadi menara air yang memiliki kemanfaatan bagi masyarakat Madura.

Terima kasih kepada semua dosen yang sudah menyumbangkan tulisannya. Terima kasih juga kepada Dekan FISIB UTM yang terus istikamah memperbanyak publikasi Madura sebagai bentuk usaha menguatkan posisi FISIB UTM dalam diskursus sosial budaya Madura dan juga pembangunan masyarakat Madura dan Jawa Timur. Semoga semua ikhtiar ini bisa membuat posisi UTM kian penting dan strategis dalam pembangunan Madura. Seraya berharap semoga perkembangan dan perubahan lingkungan bisa membuat Madura kian maju dan berkembang positif. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Wallahu muwafiq ila aqwamitthariq

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bangkalan, Desember 2021

Dr. Drs. Ec. H. Muhammad Syarif, M.Si.

Pengantar Penerbit

Ada banyak dimensi dalam kehidupan ini, dan kita dapat mengklasifikasinya lewat berbagai macam kategori, baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan berbagai macam kategori lain. Itu berlaku dalam masyarakat apa saja, tidak peduli suku, agama, ras, dan bahkan dalam teritori apa pun. Secara akademik, ragam dimensi itu membuatnya sangat menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih jauh. Dan tentu, ini juga berlaku untuk Madura dan masyarakatnya.

Buku yang ada di tangan Pembaca ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menelaah, mengkaji, dan menganalisis kompleksitas kehidupan masyarakat Madura yang banyak dimensinya itu. Secara umum, ada tujuh tema yang diangkat. Di dalamnya, khusus untuk edisi ini, dikaji banyak sekali tema-tema krusial seperti soal kelas menengah, agenda konsolidasi demokrasi, peran politik kiai, perjodohan perempuan, seksisme, bisnis budaya, internet, akses informasi, gerakan arus bawah, pemberdayaan psikologi, media lokal, dan banyak tema lain.

Buku ini ditulis oleh sejumlah dosen dan kalangan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura (FISIB UTM), yang sering menerbitkan publikasi secara berkala soal-soal termutakhir masyarakat Madura, dan yang ada di tangan Pembaca sekarang ini merupakan seri I, dengan tema besar Madura 2055: Masyarakat Arus Bawah dan Menengah Madura. Khusus edisi ini, isu signifikan utama yang digarisbawahi adalah soal posisi, sikap dan tindakan politik, entah itu terkait kebangkitan kelas menengah, kesadaran masyarakat bawah, atau pun perjuangan gender dalam memperjuangkan hak-haknya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi khalayak luas, khususnya bagi masyarakat Madura dan yang ingin menggeluti isu-isu krusial dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat Madura. Selamat membaca.

Malang, Desember 2021

Penerbit

Daftar Isi

Pengantar Editor __ v
Kata Pengantar __ vii
Pengantar Penerbit __ xxiv
Daftar Isi __ xxvi

Kelas Menengah Baru Masyarakat Pegaraman Madura
Iskandar Dzulkarnain __ 1

Kelas Menengah dan Agenda Konsolidasi Demokrasi
Mohammad Afifuddin __ 23

**Kiai Kampung Madura: Mekanisme Survival dan Penguatan
Peran Politik dalam Himpitan Perubahan Sosial Mutakhir**
Surokim __ 48

**Perjodohan Perempuan Madura Generasi Mileneal: Dari Isu
Seksisme hingga Pemeran Bisnis Budaya**
Suci Suryani __ 61

**Internet, Akses Informasi, dan Gerakan Arus Bawah
di Madura**
Surokim __ 97

Jamu Madura: Melestarikan Budaya Melalui Pemberdayaan Psikologi

Netty Herawati __ 112

Urgensi Pengembangan Media Lokal Warga sebagai Medium Alternatif Penguatan Suara Arus Bawah Madura

Surokim __ 125

KELAS MENENGAH BARU MASYARAKAT PEGARAMAN MADURA

- Iskandar Dzulkarnain -

Pendahuluan

Belum ada yang mengkaji atau menulis soal kelas menengah di Madura, khususnya masyarakat pegaramannya. Meskipun banyak yang mengkaji mengenai kelas sosial di Madura, terutama mengenai struktur sosial *Bappa'-Babbu'-Guru-Rato* (Abdurachman, 1988). Ketika membaca Madura dalam konteks kelas sosial, Zamroni (2012) melihatnya dari berbagai status sosial, ekonomi, budaya dan politik, mulai dari masa Kerajaan "Sentana" dan poskolonial "Klebu-Juragan-Kiai".

Pembahasan mengenai kelas menengah di Indonesia, termasuk di dalamnya Madura, semakin menguat sejak era Reformasi setelah tahun 1998 (van Klinken, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa lahirnya kelas menengah tidak bisa dilepaskan dari kekuatan politik elitis (yang dikemas dalam kekuatan demokratisasi). Demokratisasi dan gerakan politik elite telah melahirkan kaum borjuis-borjuis baru di sebuah wilayah. Demokratisasi dan perebutan kuasa elite

masyarakat Madura telah menciptakan borjuasi elite lokal di masyarakat Madura (Dzulkarnain, 2021).

Meskipun dalam sejarahnya, kolonialisme telah menciptakan stratifikasi kelas dalam masyarakat. Petani (buruh tani) atau pun nelayan—dalam hal ini masyarakat pegaraman—dianggap sebagai kelas bawah dalam stratifikasi ala Kolonial yang diistilahkan sebagai kelas rakyat jelata. Kaum priayi dan pejabat pemerintahan (kerajaan–kolonial) dianggap sebagai kaum elite yang menjadi embrio lahirnya elite modern di Indonesia (Madura) saat ini (van Niel, 1984). Kolonialisme yang membawa sistem ekstraksi kapitalis industri ala monopolistiknya telah mengklasifikasi pemilik moda produksi dalam kelas sosial baru dalam masyarakat. Moda produksi telah menjadi bagian penting dalam penentuan stratifikasi kelas sosial di sebuah masyarakat (Suseno, 1999). Moda produksi akan membentuk formasi sosial dalam masyarakat (Dhanaraju, 2011) atau Bernstein (2015) menyebutnya sebagai determinasi salah satu kelas sosial. Hal ini juga terjadi di pegaraman, di mana industrialisasi kapitalisme Belanda dan industri ekstraktif telah menciptakan kesenjakaan masyarakat pegaraman dengan terciptanya dehumanisasi industri pegaraman (Dzulkarnain, 2021).

Kedatangan kolonialisme dengan kapitalisme industri di Indonesia sebenarnya merupakan kapitalisme *ersatz* (kapitalisme semu) (Kunio, 1990). Hal ini terlihat dari kuatnya campur tangan pemerintah, dengan semakin berkembangnya rente-rente birokrasi dalam pemerintahan. Hal ini juga terjadi di pegaraman, dengan tidak berkembangnya usaha-usaha pegaraman rakyat, dikarenakan kuatnya fasilitas dan kebijakan yang diberikan kepada pemilik modal (perusahaan-perusahaan swasta) atau korporasi ekstraktif, dengan kuatnya jaringan akses, properti, dan legitimasi dengan pemerintah. Kedua, pengembangan kapitalisme di Indonesia tidak dibarengi dengan pengembangan teknologi yang memadai, bahkan kebanyakan industrialisasinya tanpa teknologi, sebagaimana yang terpotret dalam industrialisasi pegaraman. Kapitalisme *ersatz* dan

kaum rente birokrat pemerintah–pegaraman merupakan akar embrio lahirnya kelas menengah di pegaraman Madura.

Kelas Sosial Masyarakat Pegaraman dalam Sejarah

Legenda Raden Syekh Anggasuto dan peperangan Kerajaan Blambangan Bali–Kerajaan Sumenep merupakan akar sejarah struktur sosial masyarakat pegaraman Madura (pra kolonialisme) (Werdisastra, 1996). Kemenangan Kerajaan Sumenep dan larinya tentara Kerajaan Blambangan Bali ke Pinggir Papas untuk meminta perlindungan dari Raden Syekh Anggasuto, yang pada akhirnya tercipta akulturasi di masyarakat Pinggir Papas. Bekas-bekas peninggalan dengan ciri Bali masih sangat nampak di masyarakat Pinggir Papas termasuk dalam ritual *nyadar* (National Geographic Indonesia n.d.).

Raden Syekh Anggasuto yang diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah timur Jawa (Sumenep Madura) dengan membawa *panjhâng*, yang kini *panjhâng* merupakan alat yang paling sakral dalam ritual masyarakat pegaraman melalui *nyadar*. Kisah ini terjadi sekitar abad ke 16. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada di wilayah Pinggir Papas, sebagai daerah pesisir dengan tanah tegalan tadah hujan menyebabkan sulitnya masyarakat Pinggir Papas untuk bercocok tanam sebagai petani. Wabah penyakit juga merajalela, bahkan banyak masyarakat Pinggir Papas yang meninggal dunia akibat wabah ini.¹

Garam di Madura pada masa Kerajaan Sumenep telah diabaikan sebagai sumber penghidupan perekonomian bagi kerajaan, sehingga tidak dijadikan sebagai sumber penghidupan perpajakan oleh para Panembahan Kerajaan Sumenep (Kuntowijoyo, 2002). Hal ini bisa dimaklumi, karena Desa Pinggir Papas merupakan

¹ Kue-kue tersebut memiliki makna simbolik, kue apem yang berasal dari kata *apuan* bermakna permohonan maaf kepada Tuhan; jadah bermakna bila telah mengalami kebersihan jiwa akan diampuni; wajik bermakna jika menjalankan kewajiban secara bersih akan diberi kemakmuran; dan kelewang maupun ketupat bermakna sebagai tanda syukur (National Geographic Indonesia n.d.).

daerah pesisir dengan sumber daya alam yang sangat minus, terutama untuk lahan-lahan pertanian dan merupakan daerah ‘pelarian’ para tentara-tentara Kerajaan Blambangan Bali. Desa Pinggir Papas merupakan wilayah yang ‘diasingkan’ oleh Kerajaan Sumenep karena dianggap sebagai daerah tempat berkumpulnya para pemberontak. Meskipun Kerajaan Sumenep tidak berani melakukan penyerangan terhadap para tentara-tentara Blambangan Bali yang kalah perang dengan Kerajaan Sumenep dikarenakan adanya Raden Syekh Anggasuto (Wawancara).²

Di Kerajaan Sumenep, secara agraris desa terbagi dalam tiga bentuk, yakni *dèsā dalēman*, *dèsā pērcaton*, dan *dèsā pērdikan*. *Dèsā dalēman* adalah desa yang menjadi milik raja karena mendatangkan penghasilan bagi panembahan. Oleh karenanya, desa tersebut biasanya sepaket dengan lahan-lahan pertanian terbaiknya. Panembahan memiliki hak kepemilikan sepertiga dari semua lahan pertanian dari setiap *dèsā dalēman*, sisanya adalah kepemilikan petani. Sedangkan pajak hasil bumi di *dèsā dalēman* disebut *piakan*, yakni pembagian sawah menjadi dua. Orang-orang yang berpenghuni di *dèsā dalēman* diwajibkan untuk mengerjakan lahan-lahan pertanian para raja atau panembahan tanpa imbalan apa pun, kecuali hanya dibebaskan dari semua pajak dan mendapatkan bagian yang sangat sedikit dari hasil panen pertanian yang digarap di lahan-lahan pertanian milik raja, yakni hanya sekitar seperenam belas atau seperlima belas. Pembebasan pajak bagi mereka, kecuali untuk membayar *obeng dedeg* sekitar 8 duit per tahun (Kuntowijoyo, 2002).

Sedangkan *dèsā pērcaton* merupakan tulang punggung dari organisasi kerajaan, dikarenakan sebagai sumber penghidupan para raja, panembahan, dan keluarga-keluarganya. Di *dèsā pērcaton* atau *dèsā apanage*, bentuk produksinya melalui sistem pembayaran

² Wawancara dengan Suhrawi, Sekdes Desa Pinggir Papas dan Pj. Kades Desa Pinggir Papas, tanggal 19 September 2019

upeti sebagai ciri khas utamanya (Kuntowijoyo, 2002). *Dèsà pērcaton* atau *dèsà apanage* merupakan kewajiban bagi para penduduk yang menggarap lahan-lahan pertanian di *dèsà pērcaton* atau *dèsà apanage* untuk membayar pajak hasil bumi untuk membiayai rumah tangga istana, raja, panembahan dan keluarga-keluarganya, yang biasanya penggarap lahan-lahan pertanian di *dèsà pērcaton* atau *dèsà apanage* disebut sebagai *bēkēl* (Suhartono, 1989) atau di Madura disebut dengan *bēkarang* (Kuntowijoyo, 2002).

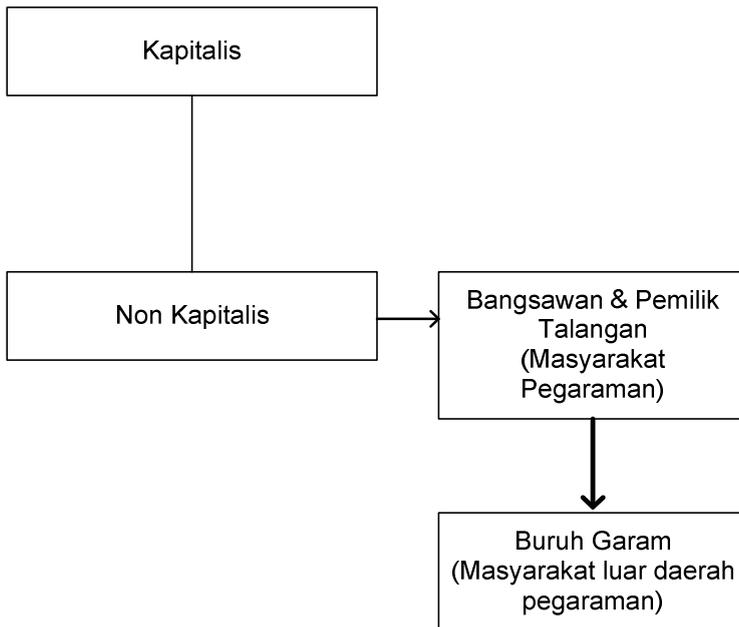
Kemudian *dèsà pērdikan* merupakan bentuk desa yang independen, yakni desa yang diorganisasikan dalam sistem pembayaran pajak dengan ragam ketetapan khusus. Artinya, *dèsà pērdikan* memiliki otonomi. *Dèsà pērdikan* seringkali diasumsikan sebagai daerah kecil atau kerajaan kecil yang memiliki otonomi sendiri dengan sistem pembayaran pajaknya juga tersendiri. Pemilik atau pengendali *dèsà pērdikan* adalah tuan desa yang langsung memiliki hubungan dengan raja. Sehingga masyarakat atau *kalebun* (kepala desa) dan para aparatnya yang ada di *dèsà pērdikan* biasanya lebih mengabdikan kepada pemilik atau pengendali *dèsà pērdikan* ketimbang kepada raja. Sedangkan aturan terkait perpajakan di *dèsà pērdikan* diatur oleh raja dengan *piagè̃m* yang diberikan kepada pemilik atau pengendali *dèsà pērdikan*, apakah dibebaskan dari semua pajak dan jasa (tenaga kerja) ataukah salah satunya saja (Kuntowijoyo, 2002). *Piagè̃m* merupakan sertifikat yang diberikan oleh raja atau panembahan yang berisi nama penerima, desa, peraturan-peraturan, dan tanggung jawab penerima kepada raja atau panembahan. Para pemegang *piagè̃m* diperbolehkan untuk menyewakan lahan-lahan pertaniannya, namun harus terlebih dahulu ada sertifikat sewa (*pēpadang*) yang dicatat maupun disahkan oleh kantor kepatihan dan *gedong negeri* (bendaharawan). Kemudian sebagai gantinya, para pemegang *pērcaton* atau *apanage* membayar pajak kepada raja atau panembahan untuk biaya perawatan raja atau panembahan (*obeng tundan*) (Kuntowijoyo, 2002).

Di Kerajaan Sumenep, tidak ada desa yang terbebas dari sistem *pērcaton* atau *apanage*, kecuali termasuk ke dalam *dèsā dalēman* (milik raja) atau *dèsā pērdikan* (bebas pajak) (Kuntowijoyo, 2002). Setiap petani diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemegang desa *pērcaton* atau *desa apanage*, yang dikumpulkan melalui beberapa cara, salah satunya adalah dengan *obeng tandun* atau pajak kontan sebanyak seperempat dari penghasilan bersihnya. Cara yang kedua adalah pajak *in natura*, yakni hasil bumi yang dipungut waktu panen hasil pertanian. Selain itu, para pemegang *pērcaton* atau *apanage* juga menerima pajak *pamengkang* atau pajak untuk tempat tinggal, dan ada juga *pajēg bungka* yakni pajak untuk pohon buah-buahan, yakni pohon asam jawa, kemiri, kapuk randu, gebang, siwalan, dan bambu (Kuntowijoyo, 2002; de Jonge, 2020).

Selain pajak-pajak yang diberikan oleh masyarakat Sumenep kepada Kerajaan Sumenep, mereka juga mendapatkan jasa-jasa pelayanan tenaga kerja untuk menggarap lahan-lahan pertanian yang dimiliki oleh kerajaan maupun di *dèsā dalēman* dan *dèsā pērdikan*. Dalam hal ini, jasa tenaga kerja terdiri dari dua bentuk, yakni bersifat personal atau *pancèn* dan umum atau *heerendiensten*. *Pancèn* diberikan kepada raja dan keluarganya atau *kalebun* dan pejabat-pejabat desa (*desa-diensten*). *Oreng kuwat*, *oreng kēncēng*, *oreng pekolan*, yang sudah menikah, dan laki-laki akan dikenakan kewajiban untuk menyediakan jasa tenaga kerja dengan tidak memandang tingkat kekayaannya maupun kepemilikan lahan-lahan pertanian seperti di Jawa, dikarenakan sempitnya lahan-lahan pertanian di Madura, sehingga tidak akan menambah beban para petani (Kuntowijoyo, 2002). Bahkan menurut Stockdale (2010), Sumenep merupakan daerah yang tidak menghasilkan hasil pertanian (hasil bumi) apapun, dan hanya dijadikan sebagai wilayah pengawasan untuk kepulauan oleh kolonialisme.

Dalam konteks kerajaan, semua lahan-lahan pertanian dianggap sebagai milik raja. Meskipun di Madura pola pertaniannya berbentuk tegalan yang berbeda dengan kepemilikan

tanah seperti di Jawa, karena di Madura tidak ada yang sifatnya kepemilikan tanah secara komunal atau tidak adanya tanah yang dimiliki oleh desa seluruhnya. Di Madura, semua tanah dimiliki oleh individu, dan pemindahan tanah tidak bisa dipengaruhi oleh kerajaan atau pemegang *pērcaton* atau *apanage*, namun diputuskan oleh individu petani sendiri (Kuntowijoyo, 2002). Oleh karenanya, pembagian kelas di Madura masa kerajaan dalam formasi sosialnya terdiri dari kelas sosial bangsawan kerajaan dan pemilik *talangan* garam, yang berasal dari masyarakat pegaraman Desa Pinggir Papas, dan para buruh-buruh produksi garam, yang berasal dari masyarakat luar daerah pegaraman, meskipun masih ada di satu Kabupaten Sumenep. Adapun Kuntowijoyo (2002) membaginya menjadi kelas penguasa dan kelas petani. Lantas, bagaimana dengan kondisi formasi sosial masyarakat pegaraman saat ini (Orde Reformasi)?



Gambar 1. Pola Formasi Sosial Masa Kerajaan (Feodal)

Se Andhik Nama: Kelas Menengah Baru Masyarakat Pegaraman Masa Orde Reformasi

Terbukanya keran-keran swasta dan ‘monopoli’ pemerintah terhadap pegaraman makin menyebabkan masyarakat pegaraman Madura terperosok dalam kemiskinan. Perampasan terhadap lahan-lahan pegaraman yang dilakukan oleh pemerintah kolonialisme Belanda melalui program “reorganisasi total” pegaraman tahun 1936 dan proyek “modernisasi dan renovasi pegaraman” oleh pemerintah Indonesia rezim Orde Baru tahun 1975, telah menjadikan masyarakat pegaraman Madura tidak lagi memiliki kekuatan produksi utama dalam moda produksi pegaramannya.

Liberalisasi kapitalis yang mulai menjadi urat nadi pegaraman di Madura semakin membelenggu masyarakat pegaraman Madura dalam ketidakberdayaan, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Keterbelengguan ini semakin diperparah dengan disetujuinya Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Undang-undang ini kemudian diikuti oleh Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 terkait kualitas garam melalui pengadaan garam beryodium. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil produksi garam diperkuat dengan keluarnya standar nasional kualitas garam, melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 29/M/SK/2/1995, yakni pengesahan dan penerapan standar nasional Indonesia (SNI) serta penggunaan tanda SNI terhadap 10 macam produksi industri, termasuk di dalamnya adalah garam (Rochwulaningsih, 2008).

Yodiumisasi garam yang dicanangkan oleh pemerintah rezim Orde Baru melalui Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994, merupakan potret dari mulai terbukanya keran impor garam. Tujuan yodiumisasi garam sebagai program kesehatan untuk menanggulangi penyakit gondok melalui sosialisasi dan intervensi dari pemerintah Orde Baru untuk mengkonsumsi garam yodium, merupakan bentuk dari dukungan Indonesia terhadap perdagangan

internasional yang bercorak liberalistik kapitalis. Pengadaan garam beryodium dengan standar kualitas gram tertentu dan alat teknologi modern yang dibutuhkan atau zat iodium, maka pemerintah melakukan kebijakan untuk melakukan impor, yang pada akhirnya menjadikan garam hasil produksi rakyat semakin terpuruk. Ini semakin menyebabkan terjerembabnya masyarakat pegaraman dalam lingkaran kemiskinan (Rochwulaningsih, 2008).

Tahun 1998 sebagai awal lahirnya Orde Reformasi dengan dijatuhkannya kepemimpinan otoritarianisme Soeharto, membuka optimisme baru bagi masyarakat pegaraman Madura untuk mendapatkan kembali lahan-lahan pegaramannya yang telah 'dirampas' dengan dalih 'sewa dan beli' pada masa pemerintahan kolonialisme Belanda, dengan proyek 'reorganisasi total' pegaraman di tahun 1936 dan 'perampasan' *talangan-talangan* pegaraman pada masa rezim Orde Baru dengan proyek 'modernisasi dan renovasi' pegaraman di Sumenep pada tahun 1975. *Talangan* pegaraman sebagai moda produksi utama bagi masyarakat pegaraman, yang telah hilang kepemilikannya dari mereka, akan berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat pegaraman Madura, yang semakin terjerembab dalam jurang kemiskinan.

Tahun-tahun awal Orde Reformasi, sebagai tanda terbukanya demokratisasi, masyarakat pegaraman Madura melakukan beragam upaya untuk melakukan protes dan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia untuk mengembalikan *talangan-talangan* pegaraman (Dzulkarnain et al., 2020; Dzulkarnain, Soetarto, A. Kinseng, et al., 2020) yang telah dirampas oleh pemerintah kolonialisme Belanda dan pemerintah Indonesia Orde Baru, yang kini lahan-lahan pegaraman dimiliki oleh negara melalui 'nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda' dan 'integralisasi pegaraman' negara dan rakyat pada masa Orde Baru.

Reformasi dengan demokratisasinya ternyata dibarengi dengan liberalisasi kapitalisme dalam kebijakan-kebijakannya. Hal ini terlihat dari kebijakan impor garam dengan standar kualitas

tertentu dari pemerintah semakin terbuka luas, seiring dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 360/MPP/Kep/5/2004 tertanggal 31 Mei 2004 mengenai ketentuan impor garam, maupun perubahan naungan dari Kementerian Perindustrian ke dalam naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Suhelmi, 2013). Perubahan ini berdampak terhadap orientasi perusahaan garam negara (PT. Garam) yang sepenuhnya berorientasi untuk mengejar keuntungan, sebagai bentuk upaya untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pembangunan perekonomian nasional.

Kebijakan tata niaga impor garam melalui kebijakan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian ini telah membuka jalan pembuka impor garam, meskipun ada upaya untuk menstimulasi produksi garam rakyat, terutama hasil produksi garam rakyat (Maflahah, Iffan dan Asfan, 2019). Tahun 2005, pemerintah mengeluarkan lagi kebijakan terkait ketentuan impor garam, yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/9/2005. Kebijakan peraturan menteri perdagangan ini telah menjadi jalan pembuka untuk melakukan impor garam, dengan kualifikasi impor garam untuk iodisasi garam dan impor untuk non iodisasi. Aturan kebijakan ini dirubah dengan terbitnya kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/10/2007, terkait kebijakan mengenai syarat-syarat bagi perusahaan-perusahaan importir garam, dan diperkenankan impor di luar masa pungut produksi garam rakyat.

Untuk mengembalikan kejayaan pegaraman di Madura dan pegaraman rakyat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan swasembada garam di akhir tahun 2009-2010 melalui Program Pemberdayaan Usaha Garam (Pugar) (National Geographic Indonesia n.d.), tepatnya tanggal 29 Desember 2010 oleh Wakil Presiden Budiono di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (Suhelmi, 2013). Program ini memiliki beberapa target yang harus dicapai, di antaranya adalah: a) pemenuhan kebutuhan garam

konsumsi di tahun 2012, b) pemenuhan garam industri di tahun 2015, c) meningkatkan daya saing produksi garam rakyat untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap impor garam, dan d) dibentuknya lembaga yang dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat pegaraman.

Program Pugar yang dicanangkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan upayanya untuk mencapai swasembada garam, garam konsumsi di tahun 2012, dan garam industri di tahun 2015, dengan pendanaannya mencapai 90 Miliar (National Geographic Indonesia n.d.). Program Pugar dilaksanakan di 40 kabupaten, dengan difokuskan di sembilan daerah yang dikategorikan sebagai sentra garam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian di tahun 2012. Meskipun ada beberapa daerah yang tidak dijadikan sebagai prioritas daerah Pugar, seperti Kabupaten Bima, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Jeneponto, sekalipun daerah-daerah tersebut posisinya juga sebagai sentra pegaraman. Sembilan daerah yang difokuskan untuk program Pugar adalah Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Nagekeo (Gozan, 2018).

Program Pugar sebenarnya merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan, diprioritaskan untuk menyelesaikan enam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pegaraman, yakni a) peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan masyarakat pegaraman, b) penguatan infrastruktur dan sarana produksi serta pemanfaatan talangan pegaraman, c) akses modal bagi masyarakat pegaraman, d) tata niaga pegaraman yang lebih berpihak kepada masyarakat pegaraman dan stabilisasi harga garam, e) regulasi lintas sektoral yang memiliki keberpihakan dan kepedulian serta proteksi pemerintah terhadap usaha pegaraman masyarakat, dan f)

dukungan teknologi dalam proses produksi dan pengolahan garam untuk meningkatkan kualitas hasil produksi masyarakat pegaraman (Suhelmi, 2013).

Program Pugar ini mendapat perhatian langsung dari unit kerja presiden bidang pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan (UKP-4). Hal ini sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011, mengenai percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional (Gozan, 2018). Kebijakan Pugar berbarengan dengan peluncuran Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) (Suhelmi, 2013), yang pada saat bersamaan diterbitkan juga suatu dokumen setebal 210 halaman terkait strategi, tata cara, dan protokoler mengenai mega proyek pembangunan (Yanuardy, 2014). Program yang sangat ambisius ini menargetkan Indonesia menjadi negara terbesar ke 12 di dunia pada tahun 2025, dengan pendapatan per kapitanya berkisar \$ 14.250 - \$ 15.500. Mega proyek ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dari berbagai perusahaan-perusahaan raksasa dunia untuk berinvestasi di Indonesia (Yanuardy, 2014).

Pugar dan MP3EI merupakan dua program yang saling menguatkan untuk pengembangan pegaraman masyarakat Madura. Madura memiliki posisi strategis sejak berdirinya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang diresmikan pada tahun 2009, yang berhadapan langsung dengan kawasan industrialisasi wilayah Jawa Timur, sebagai arah untuk mengembangkan industrialisasi di Madura melalui Badan Pengembangan Wilayah Suaramadu (BPWS), badan non struktural yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008, di mana Jawa dalam Koridor Ekonomi (KE) ditekankan untuk mendorong industri dan jasa dalam bidang industri petrokimia, perkapalan, makanan, dan minuman (Suhelmi, 2013). Artinya, seharusnya dengan adanya

Pugar dan MP3EI, industrialisasi pegaraman masyarakat di Madura semakin berkembang dengan kualitas dan kuantitas hasil produksi garamnya.

Program Pugar yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai 2014 dan dilanjutkan di tahun 2015, melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari program ini sebanyak 3.500 Kelompok Usaha Garam Rakyat (Kugar), dengan jumlah masyarakat pegaramannya sebanyak 31.432 orang. Meskipun banyak yang menganggap bahwa Pugar berhasil mencapai targetnya, terutama garam konsumsi dengan swasembadanya pada tahun 2012, namun banyak juga masyarakat pegaraman yang menganggap bahwa Pugar hanya semakin memperkaya para pemilik *talangan* garam. Karena berbagai bantuan baik berupa uang maupun berbentuk barang yang terkait dengan pegaraman tidak pernah diberikan kepada para penggarap maupun buruh pegaraman, bahkan barang untuk alat-alat produksi pegaraman dijual oleh pemilik talangan dan uangnya diambil sendiri, seperti geomembran.³

Mulai tahun 2015, Program Pugar tidak lagi memberikan BLM, namun berubah kepada penerapan teknologi baru bagi masyarakat pegaraman untuk mengoptimalkan peningkatan produktivitas hasil produksi garam dan peningkatan kualitas produksi garam, seperti penerapan geomembran (Efendi, 2014). Geomembran ini pertama kali diujicobakan di Kabupaten Sampang. Ada beberapa keunggulan geomembran, di antaranya adalah pembentukan kristal garam lebih cepat, kualitas premium, tidak perlu membentuk dasar garam selama 30 hari, lebih hemat terhadap air laut tua, ukuran kristal sesuai kebutuhan pasar ekonomi, dan biaya produksinya lebih irit (National Geographic Indonesia n.d.). Meskipun masyarakat merasa was-was dengan garam hasil produksi geomembran, terutama terkait unsur plastik dalam garam yang belum diteliti oleh pihak-pihak terkait,

³Wawancara dengan Rahnawi, Mantong Pegaraman, tanggal 05 Oktober 2019

dikarenakan rasa garam produksi geomembran terasa pahit, tidak ada rasa unsur manis asin seperti produksi garam di atas lantai tanah.⁴

Beragam regulasi dan perencanaan yang dicanangkan oleh pemerintah terlihat sangat bagus dalam tataran konseptualisasi dan teoritik, namun tidak dengan kondisi masyarakat pegaraman Madura yang masih sangat memprihatinkan dalam belenggu kemiskinan. Hal ini terlihat dari kuatnya pemilik-pemilik modal (perusahaan-perusahaan swasta maupun PT. Garam) dalam pengaplikasian beragam regulasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, misalnya pengadaan garam beryodium, pengolahan, pengemasan, maupun pelabelan garam beryodium. Persoalan penerapan kebijakan harga awal (*minimum price*) di pengumpul (pengepul), sebuah kebijakan yang sangat bagus, namun realitanya perusahaan-perusahaan swasta maupun broker perdagangan menentukan standar harga yang berbeda.

Kemudian, kebijakan terkait impor garam yang awalnya bertujuan untuk menstabilkan harga garam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pegaraman, tidak memiliki mekanisme yang jelas dan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan impor sangat lemah bahkan cenderung manipulatif. Pada akhirnya, kebijakan impor ini berdampak terhadap garam impor yang berkeliaran di berbagai pangsa pasar (industri dan kadang konsumsi) yang berdampak terhadap pangsa pasar produksi garam rakyat. Sehingga produksi garam akan tersumbat distribusi penjualannya, garam hasil produksi rakyat menumpuk, harga sangat murah, dan pada akhirnya masyarakat pegaraman semakin terjerebab dalam jurang kemiskinan (Efendi, 2012).

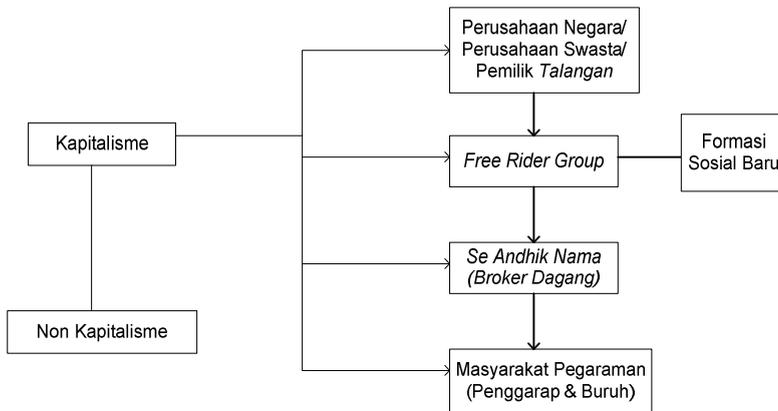
Kebijakan ini semakin nampak dengan diberlakukannya kebijakan *Jo*. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88/M-

⁴ Wawancara dengan Sahnawi, Pegawai Kemenag Sumenep yang terbiasa membeli garam krosok hasil produksi masyarakat pegaraman, tanggal 20 Oktober 2019

DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam, yang kemudian diperbaharui lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015. Regulasi kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah menunjukkan bahwa investasi impor garam dibuka dengan sangat bebas, dengan tidak adanya keharusan bagi perusahaan importir garam untuk menyerap garam rakyat sebagaimana kebijakan sebelumnya, yang diharuskan untuk menyerap garam hasil produksi rakyat minimal 50% dari total produksi garam rakyat. Ketiadaan keharusan penyerapan garam rakyat oleh perusahaan importir garam akan semakin mempersulit garam-garam produksi rakyat dengan standar kualitas yang relatif kurang baik menurut perusahaan-perusahaan importir garam. Harga garam impor yang lebih murah akan menyebabkan semakin sulitnya masyarakat pegaraman untuk bersaing dalam pangsa pasar garam. Kemudian, kebijakan ini diperparah lagi dengan ketiadaan standar harga pembelian pemerintah sebagaimana kebijakan sebelumnya, yang mengatur harga minimum garam di pengumpul. Terakhir, tiadanya batasan untuk melakukan impor garam, meskipun pada saat itu masyarakat pegaraman sedang melakukan panen raya garam.

Kemudian, pemerintah mengeluarkan kembali regulasi kebijakan pada 8 April 2016 dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Impor Garam dan pada 3 Agustus 2017 dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2017. Kedua kebijakan ini merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015. Meskipun demikian, perubahan kebijakan ini pada prinsipnya tidak merubah pola tata niaga garam rakyat, karena yang diatur dalam kebijakan ini adalah persoalan tata niaga pegaraman, sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut pegaraman rakyat hanya diselipkan dalam kebijakan impor. Sehingga tidak mengherankan jika persoalan pegaraman rakyat akan mengalami ragam persoalan, terutama

dalam tata niaganya, karena ketidakjelasan arah mata rantai dan kebijakan khusus maupun otonom terkait tata niaga pegaraman rakyat (The CDMI Consulting Group, 2019). Sehingga tidak mengherankan jika tren impor garam cenderung terus meningkat, dan garam hasil produksi masyarakat pegaraman menumpuk tidak terjual atau harganya sangat murah, karena melonjaknya stok garam. Meskipun pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 mengenai tata cara pengendalian impor komoditas garam sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pegaraman, meskipun jaminan ketersediaan garam untuk industri kadangkala tidak bisa dihindari oleh impor garam yang dilakukan oleh industri perusahaan-perusahaan swasta maupun PT. Garam.



Gambar 2. Pola Formasi Sosial ‘Baru’ Masa Reformasi

Formasi sosial periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo adalah liberalisme kapitalistik. Hal ini terlihat dengan ragam kebijakan maupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang cenderung berpihak kepada para pemilik modal atau perusahaan-perusahaan importir garam (perusahaan swasta), perusahaan negara (PT. Garam), maupun para pemilik *talangan* garam. Program Pugar sebagai salah satu upaya yang coba dijadikan program pemberdayaan bagi masyarakat

pegaraman ternyata hanya untuk semakin memperkuat jarak kuasa antara para pemilik *talangan* garam dengan para masyarakat pegaraman (penggarap dan buruh garam). Bantuan Langsung Masyarakat maupun bantuan infrastruktur pegaraman hanya menguntungkan bagi para pemilik *talangan* garam, sedangkan masyarakat pegaraman tetap tereksplorasi dalam ketidakberdayaan dan kemiskinannya.

Masyarakat pegaraman yang tetap menjadi penggarap pegaraman dan buruh pegaraman semakin terjatuh dalam jaring-jaring kemiskinan. Kemiskinan itu semakin kuat dengan beragam regulasi dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat pegaraman. Keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal (perusahaan swasta, PT. Garam, dan pemilik *talangan*), seolah-olah menafikan peran penggarap dan buruh pegaraman dalam melakukan proses produksi garam. Di tangan merekalah sebenarnya kualitas dan kuantitas garam ditentukan. Kenihilan pemerintah dalam mengawal kepentingan masyarakat pegaraman dan kepedulian terhadap masyarakat pegaraman nampak dari beragam regulasi dan kebijakannya dalam tata niaga pegaraman. Ketidakjelasan arah tujuan tata niaga hasil produksi garam rakyat dan semakin dipermudahkannya keran impor garam, semakin mempersulit gerak masyarakat pegaraman. Membludaknya stock garam rakyat yang tidak terserap oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun oleh PT. Garam, dikarenakan PT. Garam juga hasil produksinya melimpah dan bahkan gudang-gudang penyimpanan garam tidak cukup untuk menyimpannya sejak dua tahun yang lalu (2016), memperjelas amburadulnya tata niaga pegaraman.

Hal ini diperparah dengan ditunjuknya Tim Pelaksana Pembelian hasil produksi pegaraman Madura melalui Surat Direksi PN. Garam No. 039/D/SK/V/1974, yang semakin menunjukkan adanya peran broker perdagangan di pegaraman (PT. Garam, 1993). Hadirnya broker dalam perdagangan pegaraman masyarakat

Madura berdampak sangat signifikan pada perkembangan formasi sosial masa Reformasi, yang mana masyarakat pegaraman Pinggir Papas dan Gersik Putih mengistilahkannya dengan '*se andhik nama*'. Kini, tidak hanya PT. Garam yang menggunakan 'broker perdagangan', perusahaan-perusahaan swasta pun ikut memberlakukan hal yang sama.

Se andhik nama inilah penentu apakah garam hasil produksi rakyat akan terbeli dengan harga berapa dan masuk dalam kategori kualitas berapa. Mereka mendapatkan kepercayaan dari pihak perusahaan-perusahaan swasta maupun oleh PT. Garam untuk membeli dan menentukan kualitas dari hasil produksi pegaraman rakyat. Saking kuatnya peran *se andhik nama*, sehingga kadangkala masyarakat memberikan tips bagi mereka supaya garam hasil produksinya terbeli. *Se andhik nama* pun mendapatkan uang dari pihak perusahaan antara 1.000-2.000 rupiah per Kg. *Se andhik nama* dengan bekal nama tanpa modal mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah dari hasil produksi garam rakyat. Perusahaan-perusahaan swasta maupun PT. Garam biasanya menentukan orang-orang kepercayaannya untuk membeli garam-garam hasil produksi rakyat di saat akan mulai panen raya pungut garam.⁵ Pola ini meneruskan apa yang dilakukan sejak masa Orde Baru, yang dilakukan oleh PT. Garam melalui Surat Direksi PN. Garam di tahun 1974.

Kesimpulan

Madura sebagai daerah dengan lahan tegalan pesisirnya merupakan sebuah daerah yang tidak memiliki potensi ekonomis. Lahan ini tidak produktif untuk wilayah pertanian maupun untuk wilayah perikanan. Namun sejak abad ke 16, dengan ditemukannya garam oleh Raden Syekh Anggasuto bersama muridnya, lantas

⁵Wawancara dengan Mas Adi, penyewa lahan-lahan pegaraman dan tokoh pemuda Pinggir Papas, tanggal 19 September 2019

merubah Desa Pinggir Papas (Madura) menjadi sebuah daerah dengan potensi ekonomi yang luar biasa melalui garam.

Garam telah menjelma menjadi “butiran-butiran mutiara” yang sangat berharga bagi masyarakat pegaraman, bahkan telah berubah menjadi potensi yang harus diperebutkan sebagai sumber daya perekonomian bagi negara dan bangsanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh VOC maupun pemerintahan kolonialisme Belanda. Memonopoli dan merampas lahan-lahan pegaraman masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya perekonomian dari potensi garam telah menambah laba atau keuntungan-keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh pemerintahan kolonialisme Belanda. Penguasaan monopolis terhadap semua sumber daya perekonomian garam, mulai dari proses produksi, lahan, distribusi, dan tata niaga pegaraman untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemerintahan kolonialisme Belanda telah diupayakan dengan beragam kebijakan regulatif yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda.

Potensi dan beragam persoalan yang menghinggapinya masyarakat pegaraman Madura telah menjelma struktur sosial dalam masyarakat pegaraman Madura, sejak masa kerajaan hingga Orde Reformasi. Moda produksi yang menciptakan formasi kelas sosial di masyarakat pegaraman Madura telah menciptakan formasi sosial kapitalis dan non kapitalis dalam masyarakat pegaraman Madura. Masyarakat pegaraman masa kerajaan dengan bentuk formasi sosial non kapitalis terpola dengan dua struktur sosial kelasnya, yakni bangsawan kerajaan dan pemilik *talangan* sebagai kelas atas dan buruh pegaraman sebagai kelas bawah. Pada masa Reformasi, formasi sosial kapitalis melahirkan kelas sosial “menengah” baru dalam masyarakat pegaraman Madura, yakni ‘*se andhik nama*’, yang lahir sebagai *free rider group* dalam pola tata niaga pegaraman di Madura.

Daftar Pustaka

- Abdurachman. 1988. *Sejarah Madura Selayang Pandang*. Sumenep: S.N.
- Bernstein, H. 2015. *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria: Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria*. Yogyakarta: Insist Press.
- Dhanaraju, V. 2011. "A Debate on Colonial State and Sosial Formation in India," in *International Conference on Sosial Science and Humanity*. Singapore: IPEDR 5 IACSIT Press.
- Dzulkarnain, Iskandar. 2021. *Deindustrialisasi Garam: Formasi Sosial dan Kesenjakaan Agraria Masyarakat Pegaraman Madura*. IPB University.
- Dzulkarnain, Iskandar, Endriatmo Soetarto, Rilus A. Kinseng, dan Sofyan Sjaf. 2020. "Nyadar: Religious and Cultural Resistance of Madurese Salt Farming Community." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 8(2):53–68.
- Dzulkarnain, Iskandar, Endriatmo Soetarto, Rilus A. Kinseng, dan Sofyan Sjaf. 2020. *Disguised Resistance of Madurese Salt Farming Community*. 9:100–113.
- Efendi, Makhfud et al. 2012. *Garam Rakyat, Potensi dan Permasalahannya*. Bangkalan: UTM Press.
- Efendi, Makhfud et al. 2014. *Korporatisasi Usaha Garam Rakyat: Perspektif Teknis Sosial Ekonomis*. Bangkalan: UTM Press.
- Gery van Klinken. 2016. "Demokrasi, Pasar, dan Kelas Menengah yang Asertif." Pp. 1–40 in *In Search Of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah*, edited by Gerry van Klinken dan Ward Berenschot. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia- KITLV Jakarta.
- Gozan, Misri et al. 2018. *Hikayat Si Induk Bumbu: Jalan Panjang Swasembada Garam*. Jakarta: KPG Press.
- Iskandar Dzulkarnain. 2021. "Demokrasi, Kapitalisme, dan Etnisitas: Berebut Kuasa Elit Lokal Madura." P. 131 in *Rebutan*

- Lahan di Pesisir Pantai Sumenep (Refleksi dan Kritik)*, edited by Bernardo J Sujibto. Yogyakarta: Cantrik.
- de Jonge, Huub. 2020. *Sumenep Abad Ke-19*, edited by H. de Jonge. Yogyakarta: Cantrik.
- Kunio, Yoshihara. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Jakarta: Mata Bangsa.
- Maflahah, Iffan dan Asfan, Dian Farida. 2019. *Agroindustri Garam*. Bangkalan: UTM Press.
- National Geographic Indonesia. n.d. *Hikayat Garam: Sebutir Garam Untuk Kehidupan di Bumi Seribu Masjid*. Jakarta: Bank Mandiri.
- van Niel, Robert. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial bekerjasama dengan Pustaka Jaya.
- PT. Garam. 1993. *Sejarah PN. Garam 1961-1981*. Surabaya: PT. Garam (Persero).
- Rochwulaningsih, Yety. 2008. "Marjinalisasi Petani Garam dan Ekspansi Ekonomi Global: Kasus di Kabupaten Rembang Jawa Tengah." IPB.
- Stockdale, John Joseph. 2010. *Eksotisme Jawa: Ragam Kehidupan dan Kebudayaan Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Progresif Book.
- Suhartono. 1989. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suhelmi, I. R. et al. 2013. *Garam Madura: Tradisi dan Potensi Usaha Garam Rakyat*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Suseno, Franz Magnes. 1999. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.

- The CDMI Consulting Group. 2019. *Studi Potensi Bisnis dan Pelaku Utama Industri Garam di Indonesia, 2019-2023*. Jakarta: CDMI.
- Werdisastra, Raden. 1996. *Babad Sumenep*. Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah.
- Yanuardy, Dian et al. 2014. *MP3EI Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia: Studi Kritis Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*. Bogor dan Yogyakarta: Sajogyo Institute dan Tanah Air Beta.
- Zamroni, M. I. 2012. "Dinamika Elit Lokal Madura." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* 7 (1 Januari): 23–48.

KELAS MENENGAH DAN AGENDA KONSOLIDASI DEMOKRASI

- Mohammad Afifudin -

A. Pendahuluan

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai sosok kelas menengah. Terutama dalam bentuk dan konteks apa kelas menengah ini memanifestasikan dirinya, dan apa urgensi kehadiran kelas menengah terkait dengan agenda konsolidasi demokrasi. Terlebih lagi kajian kelas menengah ini akan dikontekstualisasikan dengan sebuah ruang sosial-kultural yang bernama Madura. Madura adalah pulau seluas 5.304 km persegi yang memiliki struktur topografi dan juga karakter kultural yang khas. Di mana kekhasan tersebut menurut para ahli (Kuntowijoyo, 2017; Jonge, 1989; Wiyata, 2013) berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan watak keras maupun tegas orang Madura. Sehingga dalam konteks konsolidasi demokrasi, seperti pelaksanaan Pemilu/Pilkada, Madura seolah menjadi “sub-kultur“ dari pelaksanaan Pemilu/Pilkada di Pulau Jawa. *Event* elektoral di Madura selalu lekat dengan nuansa *ontran-ontran* (Afifuddin, 2019).

Titik pijak tulisan ini bermula dari upaya untuk menyempurnakan kajian sebelumnya tentang kelas menengah di Madura yang dilakukan Haliq (2014) dan Surokim (2016). Kelemahan utama dari dua penelitian itu adalah kedua penulisnya belum menjelaskan secara proporsional tentang apa dan siapa kelas menengah yang dimaksud. Sehingga secara ontologis, mereka mengandaikan bahwa kelas menengah (di Madura) sudah ada begitu saja (*given*), eksis di masyarakat, karena itu tidak perlu lagi diperdebatkan terkait sosok yang menjadi “perantara” kelas borjuis dan kelas proletar tersebut. Konsekuensinya, Haliq (2014) dan Surokim (2016) cenderung menyamakan begitu saja kelas menengah dengan elite politik, elite media, tokoh agama (kiai, guru), *klebun*, dan tokoh-tokoh yang dianggap punya pengaruh di masyarakat, tanpa penjelasan yang cukup.

Padahal dalam diskursus ilmu sosial, kelas menengah belum jelas betul secara definitif maupun batasan-batasan operasionalnya. Heryanto (1993) pernah mengatakan kelas menengah adalah sosok yang masih samar. Tiga dekade lebih dari pernyataan Heryanto tersebut, hingga saat ini pun sesungguhnya kesamaran itu tidak kunjung terungkap dengan tegas. Konsep kelas menengah tidak hanya problematis bagi tradisi sosiologi yang berkembang di Amerika Utara, seperti perspektif fungsionalisme dan neo-populisme. Bahkan kajian tentang kelas menengah juga belum menemukan titik terang dalam tradisi sosiologi Marxisme. Padahal Marxisme sangat kental dengan analisa kelas dan ekonomi politik (White, 2016).

Untuk itu, tulisan sederhana ini ingin menghadirkan perdebatan mengenai sosok kelas menengah. Tentu, kajian ini tidak berpretensi untuk mengambil posisi konklusif tentang definisi kelas menengah. Tapi setidaknya, satu sub-bab dalam tulisan ini akan berupaya merekonstruksi diskursus yang pernah berlangsung dalam ranah ilmu sosial terkait fenomena kemunculan kelas menengah di Indonesia. Lebih jauh lagi, tulisan ini bermaksud

untuk mengkontekstualisasikan diskursus tentang kelas menengah tersebut dalam konteks yang spesifik, yakni Madura, dengan segenap kekhasan sosial, budaya, dan politiknya. Sehingga dalam beberapa sub-bab yang lain, akan dimunculkan ruang pembahasan terkait potensi kemunculan kelas menengah, sekaligus transformasi kelas menengah di Madura dengan segenap permasalahan sosial yang masih menghinggapinya.

Karena itu, penulis sangat terbantu dengan penelitian yang pernah dilakukan Klinken dan Berenschot (2016) maupun White (2016), yang berhasil mengkaji fenomena kemunculan kelas menengah di kota-kota menengah di Indonesia. Bisa dikatakan, sebagian dari tulisan ini adalah upaya rekonstruksi atas apa yang pernah dilakukan para Indonesianis tersebut di kota-kota “pinggiran” Indonesia untuk kemudian dikontekstualisasikan di Madura. Bagi penulis, hal itu relevan karena sekalipun pulau Madura dibagi menjadi empat kabupaten, tapi tidak ada satu pun dari empat kabupaten itu yang berstatus ‘di atas’ rata-rata. Semua kabupaten di Madura masih berada di level kota menengah. Bahkan dari sudut pandang capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah, Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep masih di bawah rata-rata capaian IKU Provinsi Jawa Timur.

B. Mengungkap Sosok Kelas Menengah: Sebuah Peta Perdebatan

1. Pencarian Definisi

Pada dasawarsa 1980-an, muncul sebuah kategori sosial yang diyakini eksis namun susah diidentifikasi: “sosok” yang dianggap samar-samar, membingungkan, sekaligus multitafsir. Sampai-sampai, digelarlah konferensi internasional di Monash University, Australia tahun 1986 untuk memperjelas sosok misterius tersebut. Mengambil tema “Politik Kelas Menengah Indonesia,” konferensi itu dihadiri ilmuwan dan Indonesianis kondang

semacam Daniel Lev, William Liddle, Howard Dick, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ariel Heryanto, dan kawan-kawan. Setelah berdebat sengit dan makalah masing-masing ilmuwan dibukukan oleh Tenter dan Young (1993), kesamaran sosok kelas menengah Indonesia juga belum benar-benar tersingkap.

Ariel Heryanto yang menulis pengantar untuk buku itu mengatakan bahwa kelas menengah memang kategori analisis yang merepotkan banyak ilmuwan sosial. Dua dekade setelah kemunculan buku itu, Dhakidae (2012) masih berkesimpulan sama: kelas menengah selalu membingungkan sebagai konsep. Artinya, diskursus tentang kelas menengah Indonesia sebagai kategori konseptual belum sampai pada titik konklusif. Apalagi wacana tentang “kelas sosial” sempat menghilang lama dalam analisa ilmu sosial di Indonesia (Farid, 2006).

Artinya, memang belum ada definisi tunggal mengenai kelas menengah. Sosiolog Inggris Anthony Giddens, misalnya, menyebut kelas menengah sebagai mereka yang karena pendidikan dan kualifikasi teknisnya dapat menjual tenaga serta pikirannya untuk mencari penghidupan yang hasilnya secara materi dan budaya jauh di atas buruh (*Kompas*, 9 Desember 2011). Pertanyaannya kemudian, apa batasan untuk kualifikasi pendidikan dan kualifikasi teknis yang dimaksud? Jawabannya masih multitafsir.

Perdebatan membingungkan tersebut sempat menemukan titik terang ketika Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) mengukur klasifikasi kelas menengah dari tingkat pengeluarannya. Dalam laporan semester II tahun 2010, batasan kelas menengah di Asia dapat diukur berdasarkan tingkat pengeluaran, yakni USD 2-20 per kapita per hari. Dari patokan itu, ada tiga lapis kelas menengah. Pertama, kelas menengah-bawah yang berpengeluaran USD 2-4 per hari. Kedua, kelas menengah-tengah yang berpengeluaran USD 4-10 per hari, dan

ketiga, kelas menengah-atas yang berpengeluaran USD 10-20 per hari (Afifuddin, 2011).

Jika menggunakan parameter Bank Dunia dan ADB tersebut, jumlah kelas menengah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari catatan ADB, jumlah kelas menengah di Indonesia tumbuh dari 45 juta orang di tahun 1999 menjadi 93 juta orang di tahun 2009. Bahkan merujuk pada data Bank Dunia, jumlah kelas menengah Indonesia sampai tahun 2010 sudah mencapai 134 juta orang.

World Bank Acting Country Director for Indonesia, Rolande Pryce mengatakan peningkatan kelas menengah terjadi karena sekitar 80 persen dari masyarakat miskin di Indonesia pada 1993 tidak lagi berada di jurang kemiskinan pada 2010. Bahkan, Bank Dunia mencatat pertumbuhan masyarakat kelas menengah merupakan salah satu yang tercepat daripada kalangan lain (Afifuddin, 2011).

Bahkan Boston Consulting Group (BCG) dalam laporan berjudul, *“Asia’s Next Big Opportunity: Winning Over Indonesia’s Middle Class and Affluent Consumers”* (2013) menyebut pertumbuhan kelas menengah yang selama ini didominasi oleh kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) akan menyebar (terdesentralisasi) ke kota-kota lain seperti Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar. BCG memperkirakan jika saat ini baru ada 12 kota besar di Indonesia yang memiliki lebih dari 1 juta kelas menengah, dan tahun 2020 jumlahnya akan melonjak hingga 22 kota (Afifuddin, 2014).

2. Kritik Terhadap Definisi ADB dan Bank Dunia

Pada tahun 2016, terbit buku yang dieditori oleh Gerry van Klinken dan Ward Berenschot. Judulnya, *In Search of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah*. Dalam buku tersebut, alih-alih memantapkan definisi kelas menengah yang sudah mengerucut, justru definisi *a la* Bank Dunia dan ADB

yang sudah mulai diyakini oleh banyak orang tersebut digugat. Selain menggugat secara definitif, buku itu juga membahas kelas menengah Indonesia yang cakupannya meluas tersebut dari jarak dekat. Sama sekali tidak mengandalkan data statistik seperti Bank Dunia atau ADB, Klinken dan Berenschot malah mengandalkan data-data etnografi yang sangat kaya mengenai identifikasi kelas menengah beserta perilaku-perilaku khasnya di kota-kota menengah Indonesia (*provincial towns*).

Jika kajian kelas menengah sebelumnya banyak bersandar pada topik ekonomi (pendapatan dan konsumsi kelas menengah), dalam buku yang berisi hasil penelitian dari sepuluh peneliti di delapan kota menengah yang berbeda itu, yang ditawarkan justru ide-ide tentang cara mengidentifikasi kelas menengah dalam sudut pandang yang bersifat relasional dan politis. Asumsi dasar yang ditawarkan Klinken dan kawan-kawan adalah konsep kelas pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan tentang kategori pendapatan maupun pengeluaran. Kelas adalah sebuah konsep politik yang dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa perbedaan tetap terjadi antara perilaku orang-orang kaya dan miskin terhadap hal-hal yang merupakan kebaikan bersama (*common goods*) (Klinken, 2016).

Artinya, kerangka paradigmatik yang dikembangkan dalam buku ini adalah perluasan gagasan tentang kelas menengah Indonesia dalam kaitannya terhadap peristiwa-peristiwa politik dibandingkan hanya terpaku pada analisis pola konsumsi. Klinken (2016) meyakini jika kepemilikan barang-barang oleh para konsumen tidak mengatakan apa-apa tentang komitmen politik yang baru, dengan meyakini bagaimana kelas menengah tersebut berperilaku. Buku tersebut berhasil menghadirkan ciri-ciri kelas menengah yang sangat berbeda dari yang Bank Dunia atau ADB lihat dalam statistik.

Hal tersebut nampak dari apa yang dijelaskan oleh Ben White tentang kritik terhadap gagasan *Mojokuto*-nya Geertz, di

mana “*Mojokuto*” adalah istilah Jawa untuk menyebut kota menengah. Kemudian analisis Nicolaas Warouw tentang kelas menengah pekerja di kota industri Cilegon yang menghasilkan perspektif menarik sebagaimana juga penjelasan Jan Newberry mengenai kultur kelas menengah di Yogyakarta. Tilikan lain yang jarang disentuh secara mendalam oleh para ilmuwan adalah analisis tentang kelas menengah pamong praja (PNS) yang mengambil *setting* di Pontianak. Lantas, kelas menengah juga tidak semata-mata golongan yang pro perubahan melainkan juga resisten terhadap reformasi sebagaimana ditunjukkan Amalinda Savirani di Pekalongan. Sementara itu, gejala komodifikasi simbol-simbol keagamaan nampak begitu kuat dalam perilaku kelas menengah muslim di Kebumen dan Martapura seperti dijelaskan oleh Noorhadi Hasan (Klinken dan Berenschot, 2016).

3. Asal Usul Kelas Menengah di Indonesia: Identifikasi Awal

Dalam konteks historis, menurut Daniel S. Lev (1993), pembentukan kelas menengah Indonesia modern baru terjadi sejak pemberlakuan politik etis oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad XX. Pada periode ini, ekspresi kepentingan berupa hasrat ekonomi dan politik, juga ideologi mereka, terlihat bangkit secara nyata.

Lev (1993) mengutip penjelasan Soetjipto Wirosardjono, salah seorang cendekiawan Muslim terkemuka dan bekas kapala Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan bahwa akar feodal masih terlalu kuat dalam kelas menengah Indonesia. Akar feodal inilah yang menjelaskan mengapa di era Orde Baru, ketiadaan hasrat akan perubahan sosial yang mendasar justru dialami oleh kelas menengah Indonesia, khususnya kelas menengah di wilayah urban. Akar feodal pula yang menyebabkan arah perubahan justru tertuju ke atas, ke sasaran-sasaran pencapaian posisi politik dan ekonomi yang ditawarkan oleh birokrasi Orde Baru, ketimbang posisi kepeloporan untuk memprakarsai

perubahan mendasar dalam tatanan politik dan ekonomi, sejalan dengan semangat memperkuat posisi tawar dan kemandirian.

William Liddle (1993) berpendapat, konsep ilmuwan Barat tidak selalu memadai untuk memahami fenomena sosial di Indonesia. Liddle mengkritisi pendekatan Daniel Lev (1993) yang masih meyakini kelas menengah merupakan satu lapisan dalam masyarakat yang punya “jarak” dengan negara, sehingga bisa kritis dan memainkan peran sebagai kelompok penekan. Padahal, kategorisasi kelas menengah juga bisa didasarkan pada status dan perilaku ekonominya (pendapatan maupun tingkat konsumsinya), tidak hanya sikap politiknya terhadap negara.

Dalam kaitannya dengan perspektif kelas yang disampaikan Marx, proses pembentukan kelas menengah di Indonesia juga tidak sesuai dengan analisa kelas Marx. Menurut Howard Dick (1993), tahapan pembentukan kelas menengah, juga terkait dengan pembentukan kelas borjuis. Ciri-ciri borjuis sebagaimana diungkapkan Marx menurut Dick belum terjadi dalam kelas menengah Indonesia. Ikatan kohesif terhadap kepemilikan alat-alat produksi, juga kontrol terhadap modal sebagaimana terjadi dalam kapitalisme modern, masih merupakan sesuatu yang amat langka dimiliki oleh kelas menengah urban. Kehadiran kelas menengah, khususnya mereka yang mendiami lokus urban, menurut Dick (1993) hanya sedikit menggambarkan kemampuan melakukan posisi tawar politik. Namun *political bargaining* ini tidak atau belum mencerminkan suatu jenis kemampuan penuh mempengaruhi perubahan arah kebijakan politik yang dirancang pemerintah, demi mendekatkan kebijakan politik itu dengan kepentingan politik kelas menengah urban.

Kenyataan itulah yang menurut Dick (1993) menjelaskan mengapa kelas menengah urban, khususnya yang arah pertumbuhannya disponsori dan bahkan dilindungi negara Orde Baru, tidak memiliki garis tegas pro perubahan, meski tak bisa pula diartikan telah menyerahkan diri sepenuhnya sebagai

semata-mata menjadi aparat politik dan ekonomi kelas yang berkuasa. Hal yang menambah kegelisahan menurut Dick adalah fakta bahwa kelas menengah di luar negara, yang peranannya didominasi golongan pengusaha keturunan Tionghoa, justru berada dalam kondisi lebih tak menguntungkan. Meski kelompok kelas menengah yang terakhir ini peranannya sangat besar dalam menggerakkan perekonomian negara, namun mereka masih menunjukkan kategori sebagai *rent seekers* (para pencari untung), dan bukan *welfare maker* atau pencipta kemakmuran.

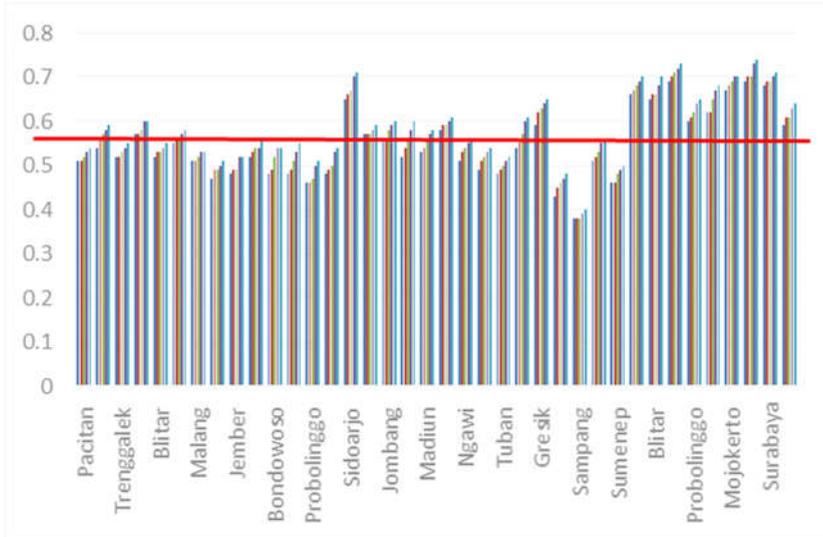
C. Kondisi Pembangunan di Madura dan Potensi Berseminya Kelas Menengah

Mengapa sub-bab ini relevan? Karena dalam perspektif yang ditawarkan Klinken dan Berenschot (2016), eksistensi kelas menengah sangat terkait dengan respons sosial-politik mereka terhadap kondisi di daerahnya. Dengan menghadirkan data-data mengenai pembangunan di Madura yang diindikasikan oleh angka kemiskinan dan IPM, maka capaian indikator kinerja utama tersebut diharapkan menjadi “basis material” bagi munculnya kelas menengah baru di Madura. Di mana kelas menengah baru tersebut memiliki daya kritisisme tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah melalui jalur-jalur yang demokratis.

Sebagai salah satu cara untuk mengukur keberhasilan proses pembangunan yang berorientasi pada manusia, UNDP telah mengembangkan indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) (Azahari, 2000). Sejauh ini angka IPM di empat kabupaten di pulau Madura masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata capaian IPM Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan LKPJ Gubernur Jatim Tahun 2019, capaian IPM Provinsi Jawa Timur mencapai angka 71,5. Bandingkan dengan capaian IPM Kabupaten Pamekasan sebesar 67,17, Kabupaten Sumenep sebesar 66,89, Kabupaten Bangkalan sebesar 66,19, atau bahkan

Kabupaten Sampang yang hanya 62,39. Level IPM keempat kabupaten tersebut jauh dengan prestasi tetangga Pulau Madura, yakni Kota Surabaya yang IPM-nya mencapai 78,97 (Halim, 2020). Capaian IPM di empat kabupaten di Pulau Madura menduduki rangking terbawah dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur (Sari, 2019).

Dalam rumusan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), IPM merupakan indeks komposit yang tersusun atas beberapa aspek, yakni kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (pengetahuan), dan daya beli masyarakat (standar hidup layak). Dari ketiga komponen tersebut, aspek pendidikan banyak disorot karena menjadi kontributor dari rendahnya angka IPM di Pulau Madura. Sebagai contoh, 95 persen warga Kabupaten Sampang hanya lulusan SD (Halim, 2020). Indeks pendidikan di Pulau Madura memang masih jauh dari ideal. Apabila dibandingkan dengan indeks pendidikan di kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, capaian Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Sumenep menempati rangking tiga besar dari bawah. Hanya Kabupaten Pamekasan yang capaiannya relatif kompetitif (Dokumen RPJMD Jawa Timur 2019-2024).

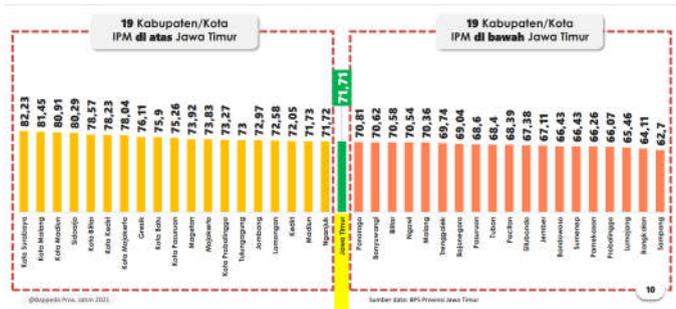


Gambar 1. Indeks Pendidikan Kab/Kota se-Jawa Timur

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Fenomena tersebut cukup memprihatinkan, mengingat aspek pendidikan yang menjadi salah satu kompositor IPM merupakan pilar penting dalam proses pembangunan sumber daya manusia. Sebab pendidikan adalah faktor penentu kemajuan bangsa di masa depan. Jika sebagai bangsa berhasil membangun dasar-dasar pendidikan nasional dengan baik, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan di bidang-bidang lain. Pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat merupakan upaya pengejawantahan salah satu cita-cita nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pencerdasan bangsa dilakukan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Pada gilirannya, kesempatan untuk memperoleh pendidikan untuk semua (*education for all*) semakin dirasakan masyarakat, karena pendidikan dijadikan kebutuhan pokok (*basic needs*) dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia (*human investment*), yang menentukan kualitas SDM suatu bangsa (Azahari, 2000).

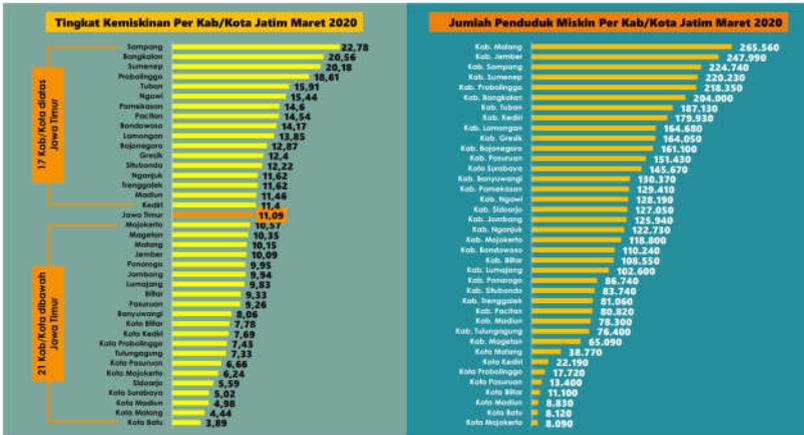
Di tahun 2020, capaian IPM di Madura juga malah mengalami penurunan. Artinya, prestasi keempat kabupaten di Madura di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat mengalami pertumbuhan negatif. Capaiannya lebih buruk dibanding rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur. Bahkan posisi Kabupaten Sampang dan Bangkalan berada di urutan paling buncit se-Jawa Timur. Tentu hal tersebut berimplikasi terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat Madura.



Gambar 2. IPM Kab/Kota se-Jawa Timur Tahun 2020

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur (2021)

Selain IPM, angka kemiskinan di Madura juga tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Sumenep menempati urutan tiga besar kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Sedangkan Pamekasan menduduki peringkat ketujuh sebagai Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur (sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini).



Gambar 3. Tingkat Kemiskinan Per Kab/Kota se-Jawa Timur Tahun 2020

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur 2021

Dengan kondisi pembangunan di Madura yang masih memprihatinkan semacam itu, seharusnya peran kelas menengah menjadi krusial. Sebab, kontribusi kelas menengah sungguh sentral dalam proses perubahan sosial di Indonesia. Kelas menengah merupakan tumpuan Bergeraknya laju pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya kelas menengah merupakan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi daya beli maupun kemampuan membangkitkan gerak ekonomi produktif. Sedangkan dalam konteks politik, kelas menengah adalah penikmat kebebasan berekspresi, hak-hak istimewa, dan kemewahan demokrasi yang lain. Mereka menikmati bicara bebas, menulis bebas, berorganisasi, menjadi elite partai, berdaya beli, dan menikmati segala fasilitas publik jauh lebih baik dibandingkan dengan massa rakyat (Afifuddin, 2011).

Karena itu, seperti dikatakan Lange dan Meier (2009, dalam Kompas, 14 Januari 2011), kelas menengah yang berkualitas bukan hanya tulang punggung masyarakat ekonomi, tetapi juga motor penggerak masyarakat melalui dukungan mereka pada proses demokrasi. Sehingga dengan basis material semacam itu, sesungguhnya kelas menengah yang kritis dan demokratis

potensial untuk tumbuh di Madura. Terutama dari segmentasi demografi bernama generasi milenial (usia 24-39) dan generasi Z (anak muda di bawah usia 24 tahun).

Salah satu representasi dari kelas menengah baru yang bisa tumbuh di Madura adalah kaum demokrat kritis. Sebuah konsep sosiologis tentang sekelompok warga yang memiliki militansi tinggi terhadap demokrasi dan bercita-cita untuk terus memperbaiki kondisi sosial-politik melalui jalur politik. Hal ini relevan dengan kondisi Madura, mengingat laju pemerintahan di empat kabupaten di Madura masih belum maksimal. Dan, belum optimalnya kinerja pemerintah daerah tersebut berkorelasi dengan masih rendahnya level kesejahteraan warga Madura.

D. Kaum Demokrat Kritis: Representasi Kelas Menengah

Dalam kajian terbaru yang dilakukan Saiful Mujani, William Liddle, dan Kuskrido Ambardi tahun 2019, saat ini ada gejala perilaku politik baru di Indonesia yang dinamakan sebagai kaum demokrat kritis. Penamaan istilah tersebut merujuk pada satu lapis generasi politik di Indonesia (terutama generasi muda) yang punya kepekaan lebih tinggi terhadap isu-isu politik, kepedulian dalam menanggapi fenomena politik, maupun kapasitas untuk menganalisa persoalan politik di Indonesia, dan aspirasi politiknya berada dalam koridor demokrasi. Karena itulah, mereka diistilahkan sebagai 'kaum demokrat kritis.'

Norris (1999, dalam Mujani, dkk, 2019) mengidentifikasi munculnya fenomena warga negara yang kritis, yakni kelompok yang percaya bahwa demokrasi adalah sistem dan model politik yang ideal. Akan tetapi secara bersamaan, mereka juga mengkritisi implementasi demokrasi di negara mereka. Artinya, kalangan masyarakat yang dikategorikan sebagai kaum demokrat kritis adalah warga masyarakat yang punya komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, di satu sisi, dan sangat kritis

terhadap penyimpangan-penyimpangan praktik demokrasi, di sisi lain.

Terkait dengan komitmen warga Indonesia terhadap demokrasi, berdasarkan survei yang pernah dilakukan Mujani (2007), Liddle dan Mujani (2007), serta Lembaga Survei Indonesia dalam Pemilu 2004, 2009, dan 2019, secara umum mayoritas pemilih Indonesia setuju atau sangat setuju dengan pernyataan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan dan sistem politik terbaik bagi Indonesia (Mujani, dkk, 2019). Hal tersebut diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh Asian Barometer Wave 2 yang menunjukkan bahwa komitmen warga Indonesia terhadap sistem demokrasi mencapai angka 73,5 persen. Di mana capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan negara-negara demokratis lain di Asia, seperti Jepang (70,4 persen), Philipina (55,3 persen) maupun Korea Selatan (47,3 persen) (jef.or.jp).

Mayoritas warga Indonesia menilai bahwa demokratisasi yang berlangsung pasca Reformasi 1998 membawa dampak positif terhadap kehidupan politik nasional dibanding era otoritarianisme Orde Baru. Bahkan secara spesifik masyarakat Indonesia menilai bahwa pemilu-pemilu yang telah diselenggarakan mulai tahun 1999 hingga saat ini berlangsung lebih demokratis dibandingkan masa Orde Baru (Mujani, dkk, 2019).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas warga Indonesia tetap memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan dibandingkan dengan sistem-sistem politik yang lain semisal komunisme, sosialisme, atau bahkan khilafah yang akhir-akhir ini mencuat dalam diskursus sosial-politik di tanah air. Hal tersebut penting, karena bagi Diamond (2003), komitmen warga terhadap nilai-nilai demokrasi adalah fondasi utama bagi proses konsolidasi demokrasi menuju cita-cita terwujudnya kesejahteraan warga.

Akan tetapi, sebagaimana disampaikan oleh Norris di atas, kaum demokrat kritis tidak hanya berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi secara membabi buta, tanpa adanya kritik terhadap kelemahan demokrasi. Terutama terkait dengan implementasi prinsip-prinsip demokrasi yang sejauh ini meninggalkan banyak catatan. Karena itu, kaum demokrat kritis ini akan terlibat aktif dalam pelaksanaan politik yang demokratis dengan berperan sebagai warga yang “cerewet” dan senantiasa kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, dari mana kaum demokrat kritis tersebut muncul? Mengutip riset yang pernah dilakukan Przeworski dan Alvarez (2000), Mujani, dkk (2019) meyakini bahwa warga yang terdidik cenderung lebih mudah menjadi kaum demokrat kritis dibandingkan warga yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan. Pun demikian halnya, warga urban (perkotaan) cenderung menjadi kaum demokrat kritis dibandingkan warga rural (perdesaan) dengan asumsi dasar bahwa warga urban yang terdidik lebih mudah mengakses informasi dan menganalisis fenomena politik yang sedang berkembang (Mujani, dkk, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, terlihat ada kontradiksi. Jika indeks pendidikan di Madura rendah (sebagaimana diuraikan di sub-bab sebelumnya), bagaimana kita berharap kelas menengah bisa muncul di Madura? Penulis melihat potensi munculnya kelas menengah tidak harus dari internal Madura. Sebab ada potensi diaspora Madura (masyarakat migran Madura) yang saat ini tersebar di banyak tempat. Ubaidillah (2014) membedakan tipe warga migran Madura dalam dua kategori. Pertama, Madura pekerja, yakni profil yang menguasai tipikal warga migran Madura di tanah seberang. Mereka terdiri dari masyarakat Madura yang berasal dari kelas sosial bawah, dengan *skill* teknis yang kurang memadai, sehingga banyak terserap menjadi tenaga kerja kasar. Kedua, ‘Madura pelajar’. Kategori ini didominasi oleh anak-anak muda Madura yang merantau ke berbagai kota

(terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa) untuk belajar (sebagian besar menjadi mahasiswa di perguruan tinggi). Misalnya di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang maupun Jember.

Masyarakat migran Madura yang disebut Ubaidillah (2014) sebagai 'Madura pelajar' yang mendiami kawasan urban di tempat perantauan dapat digolongkan sebagai kaum demokrat kritis apabila mereka aktif berpolitik, atau setidaknya mengikuti isu-isu politik yang sedang berkembang dan terlibat dalam upaya mengkritisi isu-isu politik yang dianggap kontraproduktif dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, menjadi menarik sekiranya kaum demokrat kritis Madura yang sedang berada di tanah rantau memberi penilaian terhadap proses pembangunan di empat kabupaten di Pulau Madura.

Kenapa terbentuknya kaum demokrat kritis menjadi urgen untuk revitalisasi peran kelas menengah di Madura? Karena, sebagaimana definisi kelas menengah yang ditawarkan Klinken dan Berenschot (2016), aspek penting dari kelas menengah bukan terletak pada dimensi ekonomi (pendapatan maupun pengeluaran), melainkan pada dimensi peran politiknya. Dalam istilah Klinken dan Berenschot (2016), kelas menengah adalah sebuah lapisan sosial yang punya kemampuan komunikasi secara asertif, terutama asertifitas dalam aspek sosial dan politik.

Secara spesifik, asertifitas kelas menengah di Madura yang salah satunya diharapkan terepresentasi dalam sosok kaum demokrat kritis adalah aspek yang terkait dengan isu konsolidasi demokrasi.

E. Kaum Demokrat Kritis dan Urgensi Konsolidasi Demokrasi di Madura

Ketika mendengar frasa konsolidasi demokrasi, sebagian orang cenderung mengasosiasikannya dengan koalisi politik atau konsolidasi kemenangan dalam pemilu/pilkada. Padahal makna

konsolidasi demokrasi jauh lebih luas dari persepsi tersebut. Menurut Whitehead (dalam Eko, 2003), konsolidasi demokrasi mencakup peningkatan secara prinsipil komitmen seluruh elemen masyarakat pada aturan main demokrasi. Konsolidasi juga dipahami sebagai sebuah proses panjang yang mengurangi kemungkinan pembalikan demokratisasi, mencegah erosi demokrasi, menghindari keruntuhan demokrasi, yang diteruskan dengan melengkapi demokrasi secara berkelanjutan.

Dalam konteks artikel ini, konsolidasi demokrasi di Madura sangat terkait dengan upaya kualitas pembangunan di Madura. Sebab salah satu elemen penting—bahkan yang terpenting—dari konsolidasi demokrasi adalah pemilu, dalam kasus ini berarti pilkada. Karya Linz dan Stephan (1996, dalam Lay, 2006) menunjukkan, perubahan konstitusional ke arah penciptaan kondisi bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis—*free and fair election*—telah ditempatkan sebagai titik masuk paling strategis untuk mengkonversi secara konstitusional, demokratis, dan damai fenomena liberalisasi politik sebagai sebuah *symptom* masa transisi ke arah konsolidasi demokrasi.

Hanya melalui pemilu/pilkada, akan bisa terbentuk pemerintahan yang dihasilkan melalui proses pemilihan yang adil dan jujur. Pemerintahan yang terbentuk melalui proses seperti ini bisa diduga akan mendapat legitimasi yang kuat dari masyarakat, dan karenanya akan memiliki mandat yang besar untuk melakukan perubahan-perubahan menuju demokrasi substantif (Lay, 2006). Di mana dalam banyak contoh ideal—sebagaimana diidealkan Bung Hatta, misalnya—demokrasi politik yang substantif akan berkorelasi positif dengan terciptanya demokrasi ekonomi.

Tepat dalam konteks inilah, kaum demokrat kritis di Madura sebagai representasi kelas menengah yang asertif dapat memainkan perannya, yakni sebagai aktivis yang pro aktif mengawal proses konsolidasi demokrasi. Sebab sebagaimana

diutarakan oleh Hardiman (2005), demokrasi *per definitionem* adalah seperti yang dirumuskan secara padat dalam istilah Jerman, *Regierung der Regierten* (pemerintahan dari mereka yang diperintah). Jika demikian, menyerahkan kepercayaan begitu saja kepada para pelaku dalam sistem politik hasil pemilihan umum—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—tidak akan memenuhi definisi itu. Jika demokrasi ingin maksimal, celah di antara dua pemilu/pilkada harus diisi dengan partisipasi politis warga negara dalam arti seluas-luasnya, dalam konteks ini berarti partisipasi kaum demokrat kritis Madura. Dalam kaitan itulah tercipta ruang bagi kaum demokrat kritis untuk menunjukkan eksistensinya sebagai kelas menengah yang asertif. Mereka tidak hanya bersuara ketika menjelang pemilu semata. Tetapi justru kritik-kritik terhadap kinerja politisi dan juga kinerja pemerintah mereka sampaikan setiap saat. Baik protes secara langsung melalui audiensi dengan pemerintah, melalui aksi demonstrasi, menulis opini di media massa, maupun menggalang opini publik melalui media sosial.

F. Tantangan Kaum Demokrat Kritis dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Melampaui penjelasan preskriptif-normatif seperti di atas, muncul pertanyaan dalam konteks pendekatan eksplanatif-empirik: mengapa sebuah negara/daerah bisa mulus dan sukses melakukan konsolidasi demokrasi, sementara yang lainnya menghadapi kegagalan? Kekuatan-kekuatan apa saja yang mendukung, dan sebaliknya merusak proses konsolidasi demokrasi?

Diamond (2003) menyebut “tiga krisis pemerintahan” sebagai faktor penyebabnya: a) tiadanya akuntabilitas dan *rule of law*, sebagaimana terjadi dalam bentuk korupsi yang merajalela, penyelundupan, kekerasan kriminal, personalisasi kekuasaan, dan pelanggaran HAM; b) ketidakmampuan dalam mengatur pembagian etnis serta wilayah secara damai dan terbuka; c) krisis

ekonomi atau stagnasi yang di antaranya berasal dari gagalnya menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat, serta kegagalan meningkatkan integritas, kemampuan, dan profesionalitas kinerja birokrasi.

Sementara Linz dan Stephan (1996, dalam Eko, 2003) membidik lima arena yang harus berjalan simultan dalam proses konsolidasi demokrasi agar proses tersebut tidak berjalan mundur menuju gelombang balik. Pertama, masyarakat politik yang relatif mandiri dan bermakna. Kedua, tumbuhnya kehidupan masyarakat sipil yang bebas, mandiri, dan semarak. Ketiga, birokrasi negara yang bisa dipakai (*usable*) oleh pemerintahan demokratis yang baru. Keempat, harus ada *rule of law* yang memberi jaminan legal bagi kebebasan warga negara dan tumbuhnya kehidupan asosiasional independen. Kelima, institusionalisasi masyarakat ekonomi, artinya harus ada norma, institusi, dan regulasi yang diterima sebagai jembatan antara negara dan pasar.

Kemudian, bagaimana cara agar proses yang terkonsolidasi itu berjalan simultan dan menjadi agenda bersama pelaku demokrasi? Diamond (2003) mengungkapkan, konsolidasi demokrasi paling berguna jika dimaknai sebagai proses pencapaian legitimasi yang luas dan sedemikian kuat, sehingga semua aktor politik yang signifikan pada tingkat elite maupun massa percaya bahwa rezim demokrasi adalah yang paling benar dan tepat bagi masyarakat mereka, lebih dari alternatif-alternatif realistik lain yang mereka bayangkan. Selain itu, agar demokrasi terkonsolidasi, para elite, organisasi, dan massa, semuanya harus percaya bahwa sistem politik yang mereka miliki di negara mereka ini layak dipatuhi dan dipertahankan. Legitimasi kokoh ini meliputi komitmen normatif dan perilaku bersama pada aturan dan praktik-praktik khusus dari sistem konstitusional negara tersebut, apa yang oleh Juan Linz sebut sebagai “loyalitas” pada rezim demokrasi.

Artinya, apapun yang terjadi dalam pemerintahan, semua jalan keluarnya harus sesuai dengan koridor demokrasi. Haram hukumnya memilih jalur non-demokratis. Karena itu, Diamond (2003) membuat indikator-indikator konsolidasi dalam tiga level, seperti yang dijelaskan dalam bagan ini.

Level	Norma dan Kepercayaan	Perilaku
Elite	Pemimpin-pemimpin dari berbagai organisasi percaya pada legitimasi demokrasi. Menganggap demokrasi adalah sistem terbaik dan layak mendapat dukungan.	Para pemimpin lembaga negara/pemerintahan, parpol, dan kelompok kepentingan saling menghargai dan melakukan kompetisi politik secara damai sesuai konstitusi. Menghindari hasut-menghasut dan penggunaan kekuatan militer.
Organisasi	Seluruh partai, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial yang signifikan secara politik mendukung penuh sistem demokrasi.	Tidak ada partai, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial yang signifikan secara politik melakukan gerakan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional dan menggunakan cara paksaan/kekerasan.
Massa	Lebih dari 70% publik secara konsisten mendukung dan percaya bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik. Juga tidak lebih dari 15% publik yang secara aktif memilih sistem pemerintahan otoriter.	Tidak ada partai, gerakan, atau organisasi anti-demokrasi yang punya massa signifikan yang menggunakan cara-cara ilegal (inkonstitusional) untuk mengekspresikan pilihan-pilihan politiknya atau memburu kekuasaan politik.

Sumber: Diamond (2003)

Dalam konteks demokratisasi dan konsolidasi demokrasi di Madura, perubahan yang terjadi masih bergerak pada level pola (*pattern*) tata politik dan pemerintahan secara kosmetikal, bukan pada struktur sosial-politik secara transformatif menuju

konsolidasi seperti dilukiskan Diamond (Eko, 2003). Akibatnya seperti dikatakan Huntington (dalam Nugroho, 2002), bahwa ketika partisipasi rakyat tiba-tiba meledak, sementara itu tidak diimbangi dengan kesiapan institusi-institusi negara, maka yang terjadi adalah instabilitas politik.

Struktur elite, misalnya, tampak cerai-berai tanpa diikat oleh sebuah visi bersama dalam membangun masa depan Madura yang lebih baik. Elite lebih banyak bertarung untuk memperebutkan kekuasaan demi diri atau golongannya sendiri dibandingkan memperjuangkan nasib rakyat. Akibatnya, terjadi *mutual distrust* di antara sesama elite. Jalan menuju konsolidasi demokrasi juga masih terhalang benteng kuat dari aktor-aktor yang cenderung anti demokrasi dan birokrasi yang tidak berjalan profesional. Namun kerentanan demokratisasi di Madura yang tidak kalah penting juga terjadi di wilayah masyarakat. Secara horizontal, kondisi kurangnya literasi demokrasi bagi masyarakat Madura seringkali menghadirkan konflik ketimbang pluralisme dan kohesivitas.

G. Penutup dan Simpulan

Lantas, bagaimana cara membongkar lingkaran setan kerentanan demokrasi di Madura tersebut? Bagaimana menggerakkan perubahan melalui konsolidasi demokrasi? Persis di sinilah peran dan kontribusi kaum demokrat kritis yang merepresentasikan kelas menengah di Madura ditunggu kehadirannya.

Agenda konsolidasi demokrasi di Madura tidak mungkin meminta “sedekah” para elite, melainkan harus diletakkan dan digerakkan oleh kelas menengah (kaum demokrat kritis) yang terorganisir secara kohesif. Karenanya, kekuatan kaum demokrat kritis harus diperluas tidak hanya berbasis pada kelas menengah kota, tetapi juga harus *interlink* secara kohesif dan masif dengan elemen sosial-kultural di Madura seperti kalangan pesantren. Hanya dengan modal seperti itu, kaum demokrat kritis punya

daya untuk menjadi “oposisi” bagi elite dan partai politik agar mereka berkomitmen terhadap konsolidasi demokrasi dan tanggung jawab atas perubahan Madura menuju pulau yang demokratis, adil, sejahtera, dan makmur.

Daftar Pustaka

- Afifuddin, Mohammad. 2011. *Occupy Wall Street dan Kelas Menengah Kita*. Jawa Pos, 9 Desember 2011. Hlm. 4.
- Afifuddin, Mohammad. 2014. *Kelas Menengah Terdesentralisasi*. Jawa Pos, 3 April 2014. Hlm. 4.
- Afifuddin, Mohammad. 2019. *Ontran-Ontran Pemilu di Sampang dalam Azizah, Nurul (Ed). 2019. Mereka yang Rentan & Butuh Pengakuan (Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur)*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Azahari, Azril. 2000. *Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia Pertanian*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 15, No. 1.
- Budi, Hardiman F. 2005. “Ruang Publik Politis, Komunikasi Politis dalam Masyarakat Majemuk” dalam *Republik Tanpa Ruang Publik*. Yogyakarta: IRE Press.
- Dhakidae, Daniel. 2012. *Kelas Menengah Indonesia: Apa yang Baru?* Jurnal Prisma. Vol. 31. No. 1. Jakarta: LP3ES.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.
- Dick, H.W. 1993. Refleksi Lanjutan Terhadap Kelas Menengah, dalam Richard Tanter dan Kenneth Young (ed). 1993. *Politik Kelas Menengah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Eko, Sutoro. 2003. Pengantar; Pelajaran Konsolidasi Demokrasi untuk Indonesia, dalam Larry Diamond. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.

- Farid, Hilmar. 2006. Masalah Kelas dalam Ilmu Sosial di Indonesia, dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae (ed). *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing Indonesia.
- Halim, Abdul. 2020. *Sosiologi Politik Etnik: Studi Otoritas dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura*. Malang: Intelegensia Media.
- Haliq, Fathol. 2014. Perilaku Politik Kelas Menengah Madura. *Jurnal KARSA*, Vol. 22. No. 2, Desember 2014. hal 526-728.
- Heryanto, Ariel. 1993. Memperjelas Sosok yang Samar, dalam Richard Tanter dan Kenneth Young (ed). 1993. *Politik Kelas Menengah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Jonge, Huub de. 1989. *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*. Jakarta: PT Gramedia.
- Klinken, Gerry van. 2016. Demokrasi, Pasar, dan Kelas Menengah yang Asertif, dalam Gerry van Klinken dan Ward Berenschot (ed). 2016. *In Search of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah*. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. 2017. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Lay, Cornelis. 2006. *Involusi Politik; Esai-Esai Transisi Indonesia*. Yogyakarta: PLOD Fisipol UGM.
- Lev, Daniel S. 1993. Kelompok Tengah dan Perubahan di Indonesia, dalam Richard Tanter dan Kenneth Young (ed). 1993. *Politik Kelas Menengah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Liddle, William R. 1993. Indonesia Adalah Indonesia, dalam Richard Tanter dan Kenneth Young (ed). 1993. *Politik Kelas Menengah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, Heru. 2002. Terpaan Demokrasi Global dan Pasang Surut Demokratisasi di Indonesia; Sebuah Pengantar untuk John Markoff, dalam John Markoff. 2002. *Gelombang*

- Demokrasi Dunia; Gerakan Sosial dan Perubahan Politik.*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mujani, Saiful, R. William Liddle, Wiliam., dan Kuskridho Ambardi. 2019. *Kaum Demokrat Kritis, Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sari, Indah Purnama. 2019. Indeks Pembangunan Manusia di Madura: Analisis Tipologi Klassen. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)* Vol. 6 No. 2. Hlm. 82-95.
- Surokim. 2016. Revitalisasi Kelas Menengah dan Media Lokal dalam Modernisasi Politik di Madura, dalam Khoirul Rosyadi dan Iqbal Nurul Azhar. 2016. *Madura 2045: Merayakan Peradaban.* Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Ubaidillah, Khotim. 2014. *Dinamika Perantau Madura dalam Politik Kota Malang.* Tesis Pascasarjana Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Naskah tidak Diterbitkan.
- White, Ben. 2016. Bertaruh Pada yang Tengah? Middletown, Mojokuto, dan Indonesia Menengah, dalam Gerry van Klinken dan Ward Berenschot (ed). 2016. *In Search of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah.* Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wiyata, A. Latief. 2013. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura.* Yogyakarta: LKiS.

KIAI KAMPUNG MADURA: MEKANISME *SURVIVAL* DAN PENGUATAN PERAN POLITIK DALAM HIMPITAN PERUBAHAN SOSIAL MUTAKHIR

- Surokim -

A. Pendahuluan

Peran kiai dalam konteks politik dan perubahan sosial serta proyeksi masa depan selalu saja menantang, menarik, sekaligus seksi dalam konteks masyarakat di negara berkembang. Tidak saja terkait konteks, sejarah, dan proyeksi peran kekinian dan masa depan, tetapi juga kekhasan dinamika yang menyertai di dalam masyarakat negara berkembang. Dalam konteks perubahan sosial, adaptasi dan perubahan peran berbagai aktor dan kelompok strategis memang tak terelakkan. Ada yang mengalami peningkatan peran dan ada juga yang mengalami degradasi peran. Namun, peran kiai selalu saja tetap unik dan khas.

Peran kiai selalu dinamis, kadang-kadang juga tak selalu bisa didekati dan dipahami secara logis-sains, tetapi juga butuh pemahaman transendental. Hal inilah yang membuat peran kiai dan dinamika di dalam masyarakat cenderung kompleks, rumit, dan menjadi salah satu sentra perhatian, khususnya dalam konteks

kajian perubahan sosial. Apalagi pendekatan ilmu sosial kini tidak lagi tunggal, yang membuat kajian tentang kiai dan dinamikanya selalu menjadi menarik dan selalu *up to date*, terbaharukan dengan multi perspektif dan multi disipliner.

Memahami posisi ulama (kiai) dalam dinamika masyarakat tentu saja tidak mudah dan sederhana. Jika dilihat dalam konteks sejarah, kita selalu disuguhi posisi dan peran kiai (ulama) selalu bisa melampaui zamannya, strategis dan terus terlibat dalam kontes dan *interplay* politik secara berkelanjutan. Belum lagi jika perspektif itu diperluas dengan melihat posisi dan peran kiai dalam level makro, meso, dan juga mikro, selalu saja ada dinamika dan juga varian gradasi peran yang menarik. Bahkan bisa berbeda-beda dengan varian yang sangat beragam. Kiai memiliki daya *power* (relasi kuasa) unik yang bisa memainkan peran dan bisa masuk dalam hampir semua sektor sosial, budaya, dan juga politik yang melibatkan masyarakat. Kiai tak terelakkan menjadi salah satu *strong man* penting dalam perubahan sosial.

Dalam wilayah kultural, khususnya wilayah pendidikan, peran kiai seolah tidak pernah pudar dalam tekanan kapitalisasi pendidikan berikut semua perubahan sosial yang kadang berlangsung dramatik, ekstrim, dan kadang radikal. Kiai dan pesantren tetap mampu eksis dan juga tetap bisa adaptif mewarnai, menggerakkan, dan men-*drive* arah perubahan itu. Dalam konteks tekanan liberalisasi dan juga fundamentalisme agama, para kiai (ulama) juga terbukti mampu memainkan peran signifikan. Hal itulah yang membuat posisi kiai selalu menarik, diperebutkan, dan alasan mengapa membicarakan perubahan sosial di negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa lepas dari peran aktor kiai (ulama).

B. *Interplay* Peran Kiai

Sejauh ini, perubahan sosial jika kita cermati memang lebih banyak didorong dan didominasi oleh kekuatan pasar (*market*) dan negara (*state*). Namun, hal ini juga tidak menyurutkan peran

penting dan strategis kiai. Kiai masih bisa dan mampu memainkan peran sentral sebagai kekuatan strategis dan menentukan di masyarakat. Bahkan yang sering terjadi, kekuatan negara dan pasar sering merapat dan dihipit untuk bisa dekat dengan motif bisa menaklukkan atau melunakkan peran kiai agar fungsional dengan kepentingan mereka. Namun, apa yang terjadi? Sulit mengatakan bahwa kiai terjebak dalam kooptasi negara dan pasar. Sulit juga untuk bisa menyimpulkan bahwa kiai dihegemoni negara dan pasar. Justru kiai mampu mewarnai dan menjadi benteng pertahanan dan sebagai kekuatan utama masyarakat dan publik dalam mengawal arah perubahan.

Mengapa hal itu terjadi dan lestari hingga kini? Mengapa dalam *interplay* itu kiai sering memenangkan kontes dalam penguatan peran? Memosisikan kiai sebagai *avant garde* penjaga moral dan benteng pertahanan kultural masyarakat itulah yang membuat perannya abadi dan selalu bisa melampaui zamannya. Inilah sesungguhnya jawabannya. Para kiai selalu istikamah bekerja, berkarya, dan berada pada ruang kultural untuk bersama masyarakat. Sebesar-besarnya ikhtiar untuk memberi kemanfaatan pada kebaikan umat.

Peran itu tentu saja tidak mudah dan dinamis dari waktu ke waktu dan kian kompleks. Bahkan dalam konteks *interplay* aktor selalu saja posisi kiai bisa menjadi kekuatan penyeimbang yang menarik. Dalam banyak peristiwa, justru kiai bisa istikamah menjauhkan diri dari kekuatan *state and market* sehingga membuat posisi kiai memiliki sumber *power* simbolik yang kuat. Menjaga peran kiai dari hegemoni dan himpitan peran negara dan pasar (baca: kekuasaan dan materi) itu juga menjadi tantangan yang dinamis di dalam membaca dan menempatkan peran kiai di masa depan.

Kekuatan kiai dalam himpitan kekuasaan negara dan pasar ini menjadi ruang lingkup kajian yang menarik dan seolah tiada habisnya. Berbagai relasi kuasa, tarik ulur (*interplay*), dan juga

perubahan sosial yang mengiringi selalu menarik dicermati dan ditelaah. Munculnya studi-studi yang dilakukan masyarakat kampus tentu saja bisa menjadi petunjuk berharga agar kajian dan studi tentang kiai tidak didominasi oleh perspektif pasar dan juga kekuasaan negara. Kiai sebagaimana digambarkan banyak penulis dalam buku ini juga bisa dijelaskan dan dipahami dari perpektif masyarakat (publik) sebagai salah satu pilar dan juga kekuasaan penting.

Verdi Firmantoto (2021) mencatat bahwa ulama (kiai) di Indonesia menempati peran penting karena mampu menjadi salah satu *key opinion leader*. Artinya, setiap pandangan atau *hujjah*-nya dapat mempengaruhi dan menggerakkan khalayak luas. Hal ini yang membuat betapa pun perkasa peran media massa dan media sosial, peran kiai tetap sentral dan tak terpinggirkan. Eksistensi dan keberadaan kiai sebagai orang atau kelompok yang lebih berpengaruh membuat terpaan dan kekuatan informasi selalu terlebih dulu melewati dan di-*crosscheck* melalui *opinion leader*. Hal inilah yang membuat peran ulama menjadi salah satu pemuka pandangan yang sangat berpengaruh.

Tantangan ke depan di era disrupsi, tambah Verdi (2021), diakui juga telah menggeser banyak hal, termasuk posisi dan reposisi *opinion leader*. Kehadiran para *opinion leader* membuat pandangan itu semakin beragam, seperti para *influencer* di jagat media digital. Namun, melihat konteks dan kultur Indonesia, peran ulama tetap masih sangat signifikan. Hal ini, tambah Verdi (2021), disebabkan para ulama tentu tak hanya sebagai *opinion leader*, tetapi juga sebagai *gatekeeper* yang bisa memfilter dan menangkal aneka misinformasi, disinformasi atau malinformasi. Ulama (kiai) sekali lagi adalah pelita kehidupan. Eksistensinya diharapkan merajut ikatan kebangsaan, keagamaan, dan kemanusiaan. Peran kiai akhirnya tidak lekang dalam segala kebutuhan prahara zaman baik dalam situasi normal maupun bergejolak, kiai mampu tampil sebagai penjaga kekuatan sipil dan publik yang selalu bisa

diandalkan. Menjaga eksistensi kiai sama halnya menjaga pilar penting *civil society*.

Dinamika peran kiai dan berbagai peristiwa yang melingkupinya menguatkan peran kiai dalam bidang sosial dan budaya. Potret dan perspektif arus bawah mengenai peran kiai dan perubahan sosial ini menurut saya juga menarik, sehingga pemahaman masyarakat akan kian lengkap sesuai dengan perkembangan mutakhir yang dialami, dirasakan masyarakat yang selama ini ditemani, atau lebih tepatnya, dibersamai. Dengan perspektif arus bawah akan semakin memperkaya khazanah dan cara pandang horizon masyarakat mengenai kiai dan perubahan sosial kekinian. Ikhtiar ini tentu saja akan bisa menghantarkan kita mencandra peran masa depan kiai. Tentu saja ada yang selalu menonjol di media massa, yakni peran kiai dalam bidang politik yang khas dan unik.

Kiai (ulama) dalam konteks perkembangan kontemporer bisa jadi muncul dalam banyak peran dan juga banyak wajah. Sesekali jika terseret terlalu dalam ke wilayah *state and market*, maka bisa muncul dan hadir bentuk dan varian kiai lain sebagai penyeimbang kekuatan *civil society* dalam varian bentuk dan peran yang lain. Tak ayal, dalam konteks politik kekinian kita dikenalkan dengan berbagai istilah baru seperti kiai struktural, kiai kultural, kiai kampung, dan lain lain bentuk varian kiai yang membuat peran kiai selalu menarik ditelaah. Dalam konteks kebutuhan saat ini, kiai sebagaimana dicatat Imam Mashud juga memiliki peran penting dalam semangat membangun moderasi beragama dan memelihara soliditas dan solidaritas warga.

Peran strategis itu bisa jadi juga terkait dengan peran kiai dalam mempromosikan adab (akhlak) dan ilmu pengetahuan sebagai basis utama dan sentral. Keberadaan kiai dan institusi pesantren bak dua sisi pasangan yang tak terpisahkan. Peran itu menjadikan kiai sebagai pilar penting—dan juga kadang utama—dalam mengawal pendidikan dan pembentukan karakter anak

bangsa di negeri ini. Hal itu seolah kian mengukuhkan peran suci yang menempatkan kiai dan pesantren dalam posisi terhormat dalam masyarakat. Dalam situasi disrupsi (VUCA), peran kian tak akan lekang digerus zaman, bahkan dalam pandangan saya, akan kian penting sebagai pilar menjaga adab dan akhlak karakter bangsa. Seolah meneguhkan *hujjah* Einstein, bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama bisa lumpuh, dan agama tanpa ilmu pengetahuan bisa buta. Kiai dalam konteks ini selalu bisa memainkan peran strategis sebagai pengawal dan penjaga umat.

Perhatian negara dan pasar terhadap eksistensi kiai dan pesantren juga tidak kalah menarik untuk dicermati. Sebagai satu kekuatan sosial, kiai memang mengalami tarik ulur dan juga gradasi peran. Namun hal itu tidak memudahkan peran sentral kiai dalam masyarakat. Kultur masyarakat religius dan tradisional menjadikan kiai mampu bertahan dalam lintasan sejarah kekinian. Kemampuan *power* simbolik kiai menjadikan kiai memiliki modal sosial yang selalu kuat dalam masyarakat rural dan tradisional. Peran itu sentral hampir dalam semua bidang.

Dalam banyak kajian para akademisi, bisa jadi peran politik kiai itu dapat menjadi jebakan bak pisau bermata dua. Posisi itu bisa menambah daya *power* dan magis kiai sekaligus bisa mendegradasi peran kiai. Jika citra dan respons publik positif dan amanah, maka peran kiai akan tetap lestari dan bisa dijaga. Tetapi demikian juga sebaliknya, jika negatif maka potensial mendegradasi peran kiai. Hal itu menuntut peran publik lebih luas agar bisa menjaga posisi kiai dalam tempatnya yang terhormat dan mulia agar tidak terdegradasi di dalam masyarakat.

Kiai bisa mewakili kekuatan arus bawah yang penuh dinamika. Ada potret sejarah, peran, posisi kekinian, dan juga proyeksi masa depan. Dinamika tersebut menempatkan kiai dalam posisi yang terkadang rumit dan dilematis antara peran sosial, politik, dan menjaga keseimbangan kekuatan dalam masyarakat. Berbagai tuntutan perubahan peran sosial terhadap kiai dalam mengawal

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, ekologi *green environment and society*, dan juga relasi para santri, menjadi salah satu tantangan menarik untuk melihat dinamika kiai dan pesantren. Kecenderungan masyarakat yang kian otonom dengan terpaan teknologi informasi yang masif membuat posisi kiai bisa saja terdegradasi secara signifikan. Tentu ini patut menjadi bahan refleksi, *awareness and alertness*, dan pentingnya ikhtiar revitalisasi peran kiai. Apalagi tantangan perubahan zaman juga kian kompleks dan rumit. Kehidupan sosial dengan basis materi dan teknologi yang kuat bisa jadi akan mengasingkan (alienasi) dan mendegradasi peran sosial dan kultural kiai. Kendati saya selalu yakin bahwa peran itu tidak akan pudar digerus perubahan zaman.

C. Pesantren dan Kekuatan Kiai Kampung Madura

Kiai Madura memiliki sejarah panjang dalam dinamika masyarakat Madura. Ia menjadi kekuatan sentral dan tak terpisahkan dalam gerak perubahan sosial di Madura. Kiai selama ini telah memainkan peran sentral dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di pedesaan Madura. Kiai sebagaimana disebut para ahli, seperti Clifford Geertz (1962), Zamakhsyari Dhofier (1982), Hiroko Horikoshi (1987), dan Wasisto Raharjo (2021), telah memainkan peran sebagai pialang budaya (*cultural broker*), sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang aktif dan selektif hingga menjadi aktor politik yang memiliki kuasa legitimasi (*veto player*).

Perubahan peran tersebut kian membuat peran kiai merambah berbagai peran strategis. Sebagaimana studi Yanwar Pribadi (2018) dalam Wasisto Raharjo (2021), peran politik kiai berkembang dalam tiga hal, yakni a) kiai sebagai mediator yang efektif ketika terjadi konflik tanpa pelibatan elite politik daerah, b) kiai berperan sebagai penyambung lidah rakyat terkait aspirasi dan representasi publik yang tak tersampaikan dalam arena politik formal, dan c) kiai sebagai orang kuat lokal (*local strongman*) yang disegani publik

dan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya transformasi peran kiai dari fungsi *cultural broker* ke *power broker*. Pergeseran ini terjadi dalam rangka menjaga stabilitas relasi dan ideologi antara kiai, elite pemerintahan, dan masyarakat.

Eksistensi kiai kampung sebagaimana dapat dilihat dalam gelar pilkada langsung pasca Reformasi 1998 mulai menguat. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk perluasan peran kiai kultural dalam ranah politik agar bisa menjadi penyeimbang dalam proses perebutan relasi kekuasaan dan kontestasi politik. Kiai kampung menguatkan perannya sebagai *vote getter* di arus bawah yang merasa memiliki dukungan riil dan kuat sebagai penyumbang suara dalam kontes pemilu langsung.

Perluasan peran ini sepertinya menjadi tren dalam konteks peran kiai mutakhir. Pada saat banyaknya keluarga kiai yang terjun dalam dunia politik praktis, tidak dapat dihindari ini juga menjadi tarik ulur dukungan dalam konteks politik. Hal ini kemudian membuat sentrum dukungan partai politik terhadap para kiai yang bisa jadi akan berbeda antara kiai satu dengan kiai yang lain. Tak pelak, muncul faksi-faksi dukungan politik praktis yang berbeda dalam semua perhelatan pilkada, pileg, dan juga pilpres.

Dalam perkembangannya, peran ini membuat varian berbagai jenis kiai guna menguatkan relasi kuasa. Di antaranya adalah munculnya kiai kampung sebagai bentuk penyeimbang akan kekuatan kiai elite dan kiai struktural. Kendati demikian, patron kiai masih terus bisa dipertahankan, dan perbedaan dalam dukungan politik tidak serta merta menjadikan relasi antar kiai menjadi pecah secara ekstrem. Dinamika dan dukungan politik yang berbeda antar kiai menjadikan peran kiai kian variatif dalam pandangan masyarakat.

Melalui pondok pesantren dan juga surau, peran ini bisa terjaga dan terpelihara mengingat pesantren dan surau tetap menjadikan pendidikan akhlak sebagai orientasi utama. Posisi pesantren dan surau dalam konteks ini bisa menguatkan peran dan

eksistensi kiai. Posisi ini terpelihara terus seiring dengan kian melek politiknya warga dan adanya pengalaman dalam dinamika politik praktis yang menjangkau pemilih massa mengambang di pedesaan.

D. Budaya dan Dinamika Politik

Dalam budaya masyarakat yang religius, patron tokoh agama yang kuat membuat dinamika masyarakat menjadi dependen, fanatik, dan amat tergantung pada para tokoh agama dan pemimpin lokal. Apalagi masyarakat Madura sebagian besar adalah Nahdliyin, menganut *Ahlisunnah* dalam jemaah Nahdlatul Ulama, sehingga tawadu dan taat kepada pemimpin (kiai) itu dilakukan tanpa *reserve*. Titah kiai lebih ditaati daripada pemimpin formal. “*Mon tak norok perintane kiai cangkolang,*” kalau tidak ikut perintah kiai dianggap lancang. Keyakinan semacam itu masih dipegang teguh sebagian masyarakat, khususnya kelas bawah.

Masyarakat Madura juga memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Solidaritas, empati, kesetiakawanan, religiusitas, pekerja keras, keuletan, ketangguhan adalah etos Madura. Bahkan soal solidaritas warga Madura sangat kental baik di Madura maupun perantauan yang menjadi basis pengikat sosial mereka. Solidaritas ini membuat jejaring masyarakat Madura di berbagai tempat selalu eksis dan berkembang. Madura, sebagaimana etnis yang lain di Indonesia, adalah masyarakat religius yang memegang budaya Islam tradisional yang kental. Hampir sama dengan kelompok masyarakat Muslim tradisional yang lain di Nusantara, konstruksi budaya lebih banyak dikembangkan melalui nilai-nilai Islam dengan basis kepatuhan kepada orang tua, kiai, dan guru serta penghargaan terhadap adat dan budaya lokal. Kekerabatan ini sungguh khas, dan dalam konteks tertentu, kepatuhan itu bisa menjadi perekat dan resolusi konflik yang efektif.

Sebagai *opinion leader*, kiai memegang peranan kuat dalam politik. Tidak heran, kiai menjadi penentu keberhasilan seseorang untuk bisa dicalonkan dan memenangkan kontestasi politik. Kiai

juga menjadi rujukan dan tempat bertanya bagi masyarakat untuk menentukan dukungan politik. Seiring dengan meningkatnya pendidikan formal di Madura, struktur masyarakat mulai berubah. Kalangan terpelajar, khususnya mahasiswa mulai berani berhadapan dengan elite dan turut menyuarakan aspirasi masyarakat kelas bawah untuk menuntut berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Di samping itu, mereka juga mulai kritis ke bawah. Mereka juga menjadi barisan terdepan yang berani mengkritisi adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Kalangan mahasiswa mulai kritis terhadap adat perjodohan dan pertunangan dini yang berlaku di hampir sebagian desa rural-periferi. Kondisi ini berlangsung hingga kini, sehingga keberadaan perguruan tinggi menjadi salah satu tonggak kebangkitan perlawanan kelas menengah di Madura.

Kepatuhan terhadap para kiai dan elite pemerintah daerah membuat peran masyarakat bawah dan menengah dalam politik relatif dependen. Mereka sering memasrahkan keputusan politik kepada para pemimpinnya. Takzim politik dianggap sebagai bagian dari mendapat berkah dan *barokah*. Independensi dalam politik, khususnya kalangan bawah sulit diwujudkan. Tak pelak, mekanisme pemilu langsung di Madura seringkali menjadi ajang mobilisasi dan peneguhan atas kehendak elite dalam legitimasi tokoh agama.

Masyarakat Madura hingga kini adalah entitas masyarakat yang taat mengamalkan nilai-nilai dan ajaran keagamaan (Islam) dan struktur kebudayaannya berbasis agama Islam tradisional (Kuntowijoyo dalam Haliq, 2014). Meskipun mereka relatif dependen terhadap kiai, tetapi dalam praktik ekonomi masyarakat Madura memiliki dependensi dan etos kerja yang tinggi. Kecerdasan sosial masyarakat Madura juga sering membuat urusan yang serius menjadi cepat cair. Masyarakat Madura memiliki selera humor dan sensitifitas kelucuan (Mahfud, 2015). Mereka memiliki kelincahan dalam berkelit dengan logika-logika polos. Mahfud MD mengemukakan bahwa orang Madura cukup pandai berkelit dan

cerdik tetapi tidak licik, sehingga setiap kelincahan berdebat sering dikaitkan dengan kelincahan. Orang Madura, tambah Mahfud (2015), pada umumnya memiliki etos dan semangat kerja yang tinggi. Mereka bukan tipe orang pemalas dan cerdik. Mereka orang yang agamis, egaliter, pemberani, dan sportif.

Low context communication dalam urusan ekonomi dan *high context communication* dalam bidang agama ini kadang membuat tradisi sosial politik Madura menjadi sulit ditebak dan sering berubah-ubah. Semua bisa berubah dalam waktu yang relatif singkat dan tergantung kepada arahan dan petunjuk para kiai. Partai politik bagi masyarakat Madura tidak lagi menjadi penting atau menjadi basis ideologi. Bagi mereka, partai politik hanya aksesoris dan yang paling penting adalah tokoh. Afiliasi politik mereka sangat bergantung ke mana para kiai berafiliasi politik.

E. Transformasi Peran Kiai dari Perubahan Arus Bawah

Melihat peran dan dinamika kiai dalam pusaran politik dukungan itu, maka kita bisa melihat kian meluasnya peran politik kiai. Potret kiai dari perspektif arus bawah juga akan membawa kita dalam pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran kiai kini dan mendatang. Perbincangan kiai dan potret arus bawah akan memberi nuansa baru mengenai peran kiai sebagai pilar penting penjaga kedaulatan umat dan juga bisa menyuarakan arus bawah lebih kuat, *wabilkhusus* menjadikan ilmu pengetahuan lebih komprehensif dan lengkap dalam memotret dinamika yang terjadi di masyarakat.

Transformasi ini juga dipicu oleh proses liberalisasi informasi yang secara fungsional meningkatkan akuntabilitas publik dan kapasitas masyarakat, sehingga membuat masyarakat kian kritis memahami peran perubahan kiai dalam bidang sosial dan politik. Selain itu juga meluasnya ekspansi dan akses internet di Madura serta terjangkaunya alat komunikasi melalui gadget telah mendorong aktivitas sipil dan munculnya daya kritis publik

terhadap peran pesantren dan kiai dalam politik praktis. Kekuatan arus bawah yang selama ini diam dan terhegemoni kepatuhan struktural dan kultural bergeliat, bergejolak memunculkan daya kritis publik dan tuntutan keterbukaan informasi publik. Internet dan juga gadget memberi harapan baru pada penguatan suara arus bawah dan aktivitas sipil yang berdaya dalam konteks Madura yang khas.

Aktivitas masyarakat Madura dalam menggunakan media telah merubah kesadaran politik dan perubahan sosial secara mendasar, termasuk dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Kita berharap fenomena itu akan memberi *impact* pada keswadayaan masyarakat sipil yang aktif dan berani menyuarakan aspirasi untuk turut menentukan daulat publik.

Eksistensi kiai (ulama) saat ini berada dalam pusaran dinamika masyarakat dan teknologi informasi yang kompleks seperti itu. Bisa jadi akan tergerus jika tidak mampu merevitalisasi perannya. Kendati harus diakui bahwa kiai sesungguhnya adalah aset kultural, yang dalam pandangan saya tetap harus dijaga dan ditingkatkan perannya. Dalam beragam perubahan posisi kiai ini relatif memiliki daya tawar kuat di hadapan *market* dan juga *state*. Kiai harus tetap menjadi pilar utama kekuatan *civil society* agar bisa meningkatkan daya tawar dan posisi umat dalam konteks perubahan zaman. Masyarakat tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai obyek dalam konteks perubahan, tetapi harus ditingkatkan sebagai aktor dan subyek dalam perubahan. Sehingga perubahan sosial itu fungsional bagi pembentukan peradaban madani (*civil society*—kedaulatan publik).

Munculnya varian kiai struktural, kultural, kiai kampung, dan juga varian jenis kiai yang lain menurut saya akan membuat kajian tentang kiai dan perubahan sosial akan kian menarik dan juga khas. Ikhtiar memperkuat *civil society* dan demi kebaikan dan kemaslahatan umat. Memosisikan umat dan *civil society* sebagai sentra kajian utama agar mampu memainkan peran lebih signifikan dalam

membangun peraban sipil yang lebih maju dan beradab. Menurut saya itu juga menjadi tugas peneliti dan para akademisi saat ini, agar tetap istikamah bisa menjaga kiai sebagai kekuatan dan pilar utama *civil society*.

Referensi

- Sukarwo (2019). *Rekonstruksi Pendidikan Diniyah Pesantren: Model Pendidikan Berbasis Spiritual*, Naskah Pidato dalam penganugerahan gelar doktor honoris causa sidang senat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Surokim (2015). *Madura: Masyarakat, Media, Budaya dan Politik*, Bangkalan: Puskakom Publik UTM dan Prodi Komunikasi UTM.
- Surokim (2016). *Media Arus Bawah di Madura: Kontestasi dan Dinamika*, Bangkalan: Puskakom Publik UTM dan Prodi Komunikasi UTM.
- Wasisto Raharjo Jati, dkk (2021). *Agama, Kiai Tradisional, dan Perubahan Sosial: Sudut Pandang dari Pinggiran Indonesia*, RFM Pramedia: Jember.

KELAS MENENGAH PERJODOHAN PEREMPUAN MADURA GENERASI MILENIAL: DARI ISU SEKSISME HINGGA PEMERAN BISNIS BUDAYA

- Suci Suryani -

A. Pendahuluan

Perjodohan yang dialami oleh perempuan Madura merupakan budaya yang telah berlangsung sejak lama. Suatu penelitian menyebutkan bahwa perjodohan ini bahkan lazim terjadi pada saat yang dijodohkan masih dalam kandungan, yang dikenal dengan istilah *bhokal ekakoaghi*, yang artinya adalah calon yang disepakati untuk dijodohkan (Karisyati dan Moh 2017:2). Perjodohan ini terjadi dengan didahului oleh pengajuan dari orang tua pihak laki-laki ke orang tua pihak perempuan dan orang tua pihak perempuan menerimanya. Di sini orang tua menjadi penentu perjodohan anak-anak mereka. Terutama orang tua pihak laki-laki yang menjadi penentu pertama dan utama dalam perjodohan tersebut. Orang tua pihak laki-laki memiliki alasan tertentu untuk menjatuhkan pilihan pada seorang perempuan yang akan dijadikan tunangan bagi anak laki-laki mereka. Orang tua pihak perempuan dengan senang hati

dan bahkan dengan rasa syukur menerima pengajuan perjodohan untuk anak perempuan mereka.

Perjodohan untuk anak-anak dari kedua belah pihak orang tua calon mempelai kemudian akan ditindaklanjuti dengan rencana melaksanakan pernikahan. Calon mempelai perempuan yang akan dinikahkan ini usianya sangat belia, yakni di bawah 16 tahun (Fajarina dan Budi, 2011:1). Satu referensi menyebutkan lebih spesifik bahwa rencana pelaksanaan pernikahan tersebut adalah di saat calon mempelai perempuan telah selesai masa menstruasi pertama (Mardhatillah, 2014: 2). Masa menstruasi pertama kali yang dialami anak perempuan adalah masa yang menjadi penanda adanya perubahan biologis, yakni masa awal pubertas pada anak perempuan. Masa ini sesungguhnya adalah masa awal bagi anak perempuan yang memasuki masa remaja. Masa tersebut adalah masa transisi perubahan biologis yang sesungguhnya membutuhkan persiapan mental untuk menerimanya dan memahaminya bagi kesehatan reproduksi mereka.

Perjodohan perempuan Madura juga masih dialami oleh generasi milenial. Generasi Y yang lahir di rentang waktu tahun 1980 hingga tahun 2000 (Carlson di Badan Pusat Statistik, 2018). Ini adalah generasi yang tumbuh kembang di era modern. Di era ini, pernikahan dini bagi generasi milenial adalah suatu ketidaklaziman, sebab mereka adalah generasi yang merencanakan pernikahan mereka di saat mereka dewasa secara usia, pemikiran, sifat, dan mandiri secara ekonomi. Fenomena sosial tentang pernikahan dini bagi generasi milenial dianggap sebagai fenomena sosial budaya yang merupakan budaya zaman dahulu. Budaya ini mencerminkan tentang terjadinya ketidakseimbangan bagi perolehan hak-hak laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Seiring dengan perubahan zaman dan pola pikir masyarakat yang lebih moderat menyebabkan budaya ini menjadi semakin tergeser. Namun dalam faktanya, masih ada generasi milenial yang mengalami budaya itu dikarenakan masih adanya pengaruh budaya lokal tentang perjodohan dan

pernikahan dini. Penelitian tentang perjodohan generasi milenial ini menarik untuk diangkat karena mereka adalah wajah bonus demografi negara Indonesia.

Ketidakseimbangan yang terjadi pada tidak proporsionalnya hak-hak yang dimiliki sebagai anggota masyarakat dan warga negara ini disebabkan oleh isu yang tiada berkesudahan, yakni seksisme pada gender perempuan. Gender perempuan adalah gender yang terdampak pada terjadinya ketidakadilan antar gender laki-laki dan perempuan. Hal ini dipicu oleh adanya pandangan yang menempatkan perempuan di posisi marginal. Pandangan tersebut merendahkan gender perempuan dalam segala tatanan kehidupan. Perempuan lemah adalah isu seksisme yang populer didengungkan dan tertanam dalam pola pikir masyarakat sehingga perempuan terhalang untuk berkembang lebih baik. Namun halangan ini tidak dirasakan oleh laki-laki sebab laki-laki memiliki hak istimewa.

Berdasarkan uraian panjang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang perjodohan perempuan Madura pada generasi milenial. Pertanyaan yang patut diajukan pada fenomena sosial budaya tersebut adalah terkait apa saja isu seksisme dan tekanan seksisme yang dialami oleh perempuan Madura yang menjalani perjodohan tersebut? Bagaimana pula akibat tekanan seksisme menjadi titik balik untuk menumbuhkan solidaritas bagi perempuan Madura tersebut? Terakhir, bagaimana kekuatan dasar personal perempuan Madura tersebut dipraktikkan sehingga mereka bertransformasi menjadi pebisnis budaya dengan kekuatan bonding yang didapat? Penelitian akan menganalisa lebih dalam tentang isu seksisme, tekanan seksisme, solidaritas, dan kekuatan dasar personal yang muncul bersamaan dengan fenomena tersebut.

B. Kerangka Teori

Tinjauan pustaka yang paling utama digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah buku karya Bell Hooks (1984)

yang berjudul *Feminist Theory from Margin to Center*. Di samping itu, ada juga artikel yang ditulis oleh Shatema Threadcraft (2015) yang mereview pendapat Bell Hook (1984) tentang *Reflecting on the Power of Hooks*. Artikel tersebut berperan sebagai pendukung untuk uraian pemikiran Bell Hooks (1984) tentang perubahan perspektif soal *power*. Terkait tentang tinjauan pustaka utama yang digunakan pada penelitian ini, pada sub bab ini perspektif Bell Hooks (1984) akan dibagi ke dalam tiga hal, yakni isu seksisme, solidaritas, dan *power*.

1. Isu Seksisme

Isu seksisme yang dijelaskan Bell Hooks (1984) menggambarkan tentang perempuan kulit putih Amerika sebagai korban seksis harian secara fisik, mental, dan spiritual. Namun demikian, mereka tidak menganggap dan tidak menyuarakan diri bahwa mereka adalah korban. Mereka justru menerima keadaan mereka sebagai korban tanpa protes dan marah. Karena itu, keadaan mereka sebagai korban pun tidak bisa dipertanyakan dengan pertanyaan yang jelas. Dalam hal ini, Betty Friedan dalam bukunya *The Feminist Mystique* tentang pergerakan kaum feminis kontemporer mendeskripsikan bahwa perempuan yang dimaksud tersebut seakan tidak eksis.

Selanjutnya dijelaskan oleh Bell Hooks (1984) bahwa feminis liberal, yang populer di Amerika dengan istilah “*women’s lib*”, adalah gerakan yang bertujuan untuk membuat posisi sosial wanita sejajar dengan laki-laki. Tujuan ini yang dipopulerkan di media dan di segmen pergerakan yang *mainstream* menyulut pertanyaan seputar supremasi, kapitalis, dan struktur kelas patriarki kulit putih (*white supremacy*), posisi sosial laki-laki pun tidak sejajar. Jadi, perempuan ingin sejajar dengan laki-laki yang mana? Apakah sudah ada satu visi tentang apa yang dimaksud dengan “sejajar”? Dengan demikian, secara terselubung definisi *women’s lib* adalah penolakan terhadap ras, kelas, dan juga seksis yang menjadi faktor

pencetus terjadinya diskriminasi, eksploitasi, dan penindasan terhadap individu. Perempuan borjuis kulit putih yang tertarik pada isu tentang hak-hak perempuan puas dengan istilah tersebut karena alasan yang jelas. Secara retorika, istilah tersebut menempatkan mereka pada posisi sosial sebagai perempuan yang tertindas, mereka tidak sadar untuk terpanggil memperhatikan tentang ras dan keutamaan kelas.

Sekarang banyak feminis radikal sadar bahwa tidak ada gerakan feminisme yang menitikberatkan pada perjuangan untuk kemerdekaan individu perempuan dan kesetaraan kondisi sosial perempuan dengan laki-laki, dan bahwa perjuangan mereka berhasil meniadakan seksisme dan dominasi laki-laki. Lebih lanjut, Bell Hooks (1984) menjelaskan bahwa sebenarnya perjuangan feminis adalah untuk menghentikan penindasan seksis. Untuk itu, diperlukan perjuangan untuk memberantas ideologi dominasi yang telah tertanam di segala level kehidupan di Barat dan komitmen untuk menata kembali masyarakat yang membela penjajahan, melakukan ekspansi ekonomi, dan memiliki keinginan terhadap kebutuhan material, sehingga mampu melakukan pengembangan diri dengan baik. Secara mendasar, feminisme itu adalah perjuangan menghentikan penindasan seksis. Perjuangan tersebut tidak hanya bertujuan menguntungkan sebagian grup perempuan, ras atau kelas perempuan. Itu juga tidak dimaksudkan untuk memberi keistimewaan pada perempuan di atas yang lainnya.

2. Solidaritas Perempuan

Gerakan feminis kontemporer seharusnya menyediakan pelatihan dasar bagi perempuan untuk mempelajari solidaritas politik. *Sisterhood* tidak bisa dianggap sebagai pencapaian revolusioner dari perempuan yang akan bekerja dan berjuang untuk itu. Hal itu disebabkan karena visi *Sisterhood* yang digaungkan oleh orang-orang liberal berdasar pada ide persamaan penindasan. Itu adalah ide dari perempuan borjuis kulit putih, baik yang radikal atau

liberal, yang mengakui adanya persamaan dalam hal penderitaan. Ide tentang persamaan tersebut tidaklah benar dan merugikan, menyamakan, dan membingungkan keaslian keberagaman perempuan dan realitas sosialnya yang kompleks, yakni bahwa perempuan dibagi ke dalam perilaku seksis, keistimewaan kelas, ras, dan prasangka-prasangka yang lain.

Sesungguhnya ikatan perempuan yang kuat akan terjadi bilamana pembagian seperti disebutkan di atas dapat dihalangi, dan tindakan-tindakan yang penting dilakukan untuk meniadakan pembagian tersebut. Sebab pembagian tersebut tidak akan bisa diiadakan dengan pemikiran yang bijak dan angan-angan yang romantis tentang persamaan penindasan, meskipun nilainya tentang menyorot beberapa pengalaman bagi perempuan.

Sustained woman bonding can occur only when these divisions are confronted and the necessary steps are taken to eliminate them. Divisions will not be eliminated by wishful thinking or romantic reverie about common oppression despite the value of highlighting experiences all women share (Hooks, 1984: 44)

Perempuan yang dieksploitasi dan ditindas setiap hari tidak dapat melepaskan keyakinan bahwa mereka mempraktikkan beberapa kontrol terhadap hidupnya. Sehingga mereka tidak mampu untuk melihat diri mereka sendiri sebagai korban. Sebab daya tahan mereka bergantung pada keberlanjutan praktik kekuasaan personal yang mereka miliki. Dengan demikian, akan mengacaukan secara psikis bagi perempuan yang melakukan ikatan dengan perempuan lain berdasar persamaan nasib sebagai korban. Akan lebih tepat jika ikatan tersebut dibangun berdasar sumber dan kekuatan yang dibagi. Semestinya pemikiran seperti itu yang didukung oleh gerakan kaum feminis. Inilah yang merupakan esensi *Sisterhood*.

It would be psychologically demoralizing for these women to bond with other women on the basis of shared victimization.

They bond with other women on the basis of shared strengths and resources. This is the woman bonding feminist movement should encourage. It is this type of bonding that is the essence of Sisterhood (Hooks, 1984: 45).

3. **Power Perempuan**

Power biasanya oleh masyarakat diterjemahkan sebagai dominasi atau kontrol terhadap orang atau barang. Perempuan yang aktif di pergerakan feminis memiliki tanggapan yang kontradiktif tentang isu *power* ini. Di satu sisi, mereka menekankan pada ketidakberdayaan perempuan dari praktik dominasi. Di lain sisi, mereka menyuarakan tentang *power* perempuan yang menuntut persamaan hak-hak, yakni perlindungan yang setara di arena politik dan akses yang setara untuk kesejahteraan ekonomi. *Power* perempuan menurut Cellestine Ware, seorang aktifis feminis kulit hitam, menunjuk pada konsep *power* yang berbeda dan radikal, yakni praktik *power* untuk mengakhiri dominasi yang di pelihara sebagai prinsip utama dari gerakan feminis radikal.

In this society, power is commonly equated with domination and control over people or things. Women active in feminist movement had ambivalent responses to the issue of power. On the one hand, they stressed women's powerlessness, condemning male exercise of power as domination, and on the other hand they raised the banner of "woman power," demanding equal rights-equal protection in political arenas, equal access to economic wealth (Hooks, 1984: 83).

Perbedaan perspektif *power* di antara gerakan feminis merefleksikan perbedaan kelas individu dalam perspektif politis. Perempuan yang tertarik untuk reformasi menuju persamaan sosial dengan laki-laki menginginkan untuk mendapatkan *power* lebih dalam sistem yang telah ada. Perempuan yang tertarik pada perubahan revolusioner dengan cepat memberi nama praktik *power* sebagai tindakan negatif, tanpa membedakan antara *power* sebagai

dominasi dan kontrol terhadap yang lain atau *power* sebagai hidup yang kreatif dan teguh atau tegas.

Differing perspectives on power within feminist movement reflected individual class biases and political perspectives. Women interested in reforms that would lead to social equality with men wanted to obtain greater power in the existing system. Women interested in revolutionary change were quick to label the exercise of power a negative trait, without distinguishing between power as domination and control over others and power that is creative and life-affirming (Hooks, 1984: 84).

C. Kajian Terdahulu

Tinjauan pustaka berikutnya adalah dari beberapa artikel penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa artikel dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua tema, yakni kajian tentang perjodohan dan pemberdayaan perempuan Madura. Masing-masing artikel memberikan masukan pada penelitian ini untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan arah penelitian Universitas Trunojoyo Madura. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penguatan posisi sosial budaya perempuan dalam masyarakat, sehingga memiliki andil besar untuk pengembangan bisnis budaya lokal menuju kancah internasional.

1. Kajian Terdahulu tentang Perjodohan di Madura

Kajian terdahulu tentang perjodohan di Madura yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah artikel berjudul *Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan*, yang ditulis oleh Mardhatillah (2014). Artikel itu menjelaskan bahwa perempuan Madura dianggap sebagai simbol gengsi laki-laki, sehingga diperlakukan dengan baik agar gengsi laki-laki tersebut terjaga. Namun perempuan memiliki akses terbatas dalam membuat keputusan tentang perjodohan. Dalam hal ini, perjodohan mereka

telah diatur oleh ayah mereka. Hal tersebut menjadi tradisi di Madura dengan menyertakan kearifan lokal untuk hidup sejahtera.

2. Kajian Terdahulu tentang Pemberdayaan Perempuan Madura

Tinjauan pustaka pada artikel berjudul *Women's Empowerment through Creative Industry: a Case Study*, yang ditulis oleh Setyaningsih Santi, dkk dilakukan untuk pengembangan penelitian ini. Artikel tersebut dimuat di *Procedia Economics and Finance* 4, (2012), *International Conference on Small and Medium Enterprises Development with a Theme (ICSMED, 2012)*, yang diterbitkan oleh Elsevier. Artikel tersebut menjelaskan bahwa berbagai komunitas nasional dan internasional telah memfokuskan pada isu perempuan dan mengambil beberapa usaha untuk memberdayakan mereka sebagai upaya untuk meningkatkan status sosial dan kesehatan mereka dan melibatkan mereka dalam aktivitas pengembangan.

Pemberdayaan sebagai perwakilan dari *power* seseorang telah menjadi suatu mekanisme untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan kerja perempuan di dekade akhir-akhir ini. Pendidikan tinggi dan pekerjaan adalah instrumen yang efektif untuk pemberdayaan perempuan. Namun peranan budaya dan kreativitas tidak dapat dihindari dalam hal ini. Tujuan dari artikel tersebut adalah untuk mengidentifikasi bagaimana memberdayakan perempuan dari kemiskinan melalui industri kreatif. Studi kasus diterapkan di artikel tersebut untuk mengeksplorasi bagaimana pemberdayaan perempuan melalui industri kreatif diatur. Beberapa rekomendasi dikembangkan untuk mengetahui bagaimana industri kreatif berperan penting pada pemberdayaan perempuan.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian di mana data yang dianalisis berbentuk kata dan gambar. Metode penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik dasar. Pertama, setting natural, bahwa

penelitian ini melibatkan peneliti dan partisipan, yakni perempuan Madura generasi muda yang telah mengalami perjdohan dari empat kabupaten di Madura, dan kemudian bangkit dalam usaha industri kreatif, yakni sentra batik.

Kedua, peneliti sebagai *key instrument*, bahwa peneliti mengumpulkan data sendiri dengan cara mewawancarai partisipan, yakni perempuan sebagai pengrajin, pekerja, dan pengusaha di sentra batik. Selain itu juga memeriksa dokumen tentang perempuan Madura generasi muda yang pernah mengalami perjdohan dan kemudian berkecimpung di usaha batik yang ada di dinas KB, kantor arsip, perpustakaan daerah, dan dinas pariwisata. Ketiga, data terwujud dalam berbagai macam bentuk, seperti hasil wawancara, pengamatan, atau pun audio visual. Peneliti mendapatkan data itu dari responden dengan proses wawancara, mengamati, dan merekam responden, yakni perempuan Madura generasi muda dengan kriteria seperti disebut sebelumnya.

If you present the basic characteristics, what ones should you mention? Fortunately, there is some common agreement today about the core characteristics that define qualitative research. A number of authors of introductory texts convey these characteristics, such as Creswell (2013), Hatch (2002), and Marshall and Rossman (2011). Natural setting... Researcher as key instrument... Multiple sources of data... (Creswell, 2014: 234).

Penelitian dilaksanakan pada empat kabupaten di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Utamanya, pelaksanaan penelitian dilakukan di sentra batik. Sentra batik yang menjadi tujuan penelitian adalah sentra batik di Tanjung Bumi Bangkalan, Kota Sampang, Klampar Pamekasan, dan Pekandangan Barat Sumenep. Dengan mempertimbangkan bahwa sentra tersebut merupakan industri budaya yang tersohor di tiap kabupaten sebagai tempat produksi batik. Subyek penelitian adalah perempuan Madura generasi milenial yang telah mengalami perjdohan dan

pernikahan dini, dan kemudian perempuan tersebut berkecimpung di usaha industri budaya.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang dihasilkan dari wawancara dan pengamatan dengan subyek penelitian. Sumber data sekunder adalah data yang tersedia di jurnal, prosiding, blog, buku, dan media sosial lain. Tahap penelitian meliputi persiapan, menghimpun data, dan mengolah data. Ada beberapa teknik menghimpun data, yakni observasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*). Kegiatan yang dilakukan dalam analisa data adalah mereduksi data, analisa data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan uji keabsahan data ini diukur dari sudut pandang pakar yang kompeten terhadap isu yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Pembahasan

Bagian ini mendiskusikan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Berdasarkan hal itu, maka bagian ini diorganisir ke dalam tiga bagian. Pertama adalah sub bagian yang membahas isu seksisme (*the attachment to sexism*) dan tekanan seksis (*sexist oppression*) yang dialami oleh responden akibat dari perjudohan dan pernikahan dini yang tertanam dalam tradisi atau budaya lokal. Kedua adalah sub bagian yang mengurai solidaritas yang diperoleh dari lingkungan sosialnya. Ketiga adalah sub bagian yang menjelaskan praktik *power* dasar mereka dalam menjalani tantangan kehidupan hingga berhasil menjadi pemeran bisnis budaya Madura berbasis solidaritas regional, nasional, dan internasional.

1. Isu Seksisme

Isu seksisme merupakan bentuk pengejawantahan penilaian yang merendahkan perempuan. Perempuan adalah masyarakat marginal sementara laki-laki adalah masyarakat sentral. Paradigma berpikir yang tidak sehat dalam kaca mata gender ini menempatkan laki-laki memiliki hak-hak istimewa sementara perempuan tidak.

Paradigma ini dipengaruhi oleh sistem patriarki yang dominan yang ada pada masyarakat yang mengakui kekuasaan laki-laki namun melupakan perempuan (Wiyatmi, 2021: 288).

Pada sub bagian ini akan dibahas tentang isu seksisme (*the attachment to sexism*) yang dialami oleh responden di sentra batik Tanjung Bumi Bangkalan, Kota Sampang, Propo Pamekasan, dan Pekandangan Barat Sumenep. Isu seksisme yang dialami responden tiap-tiap kabupaten memiliki keunikan masing-masing, seiring dengan tradisi dan budaya yang berlaku di kabupaten tersebut. Berikut adalah rangkuman beberapa isu seksisme yang dialami responden di keempat kabupaten di Madura.

a. *Tak Pajuh Lakeh*

Istilah ini merupakan persepsi masyarakat di desa tempat tinggal responden dari keempat kabupaten di Madura untuk perempuan yang tidak segera menikah di usia yang sudah di atas enam belas tahun. Sebagaimana dituliskan oleh Sari (2016), bahwa angka pernikahan usia muda di bawah usia 16 tahun pada masyarakat Madura tergolong tinggi. Persepsi tersebut menjadi alasan utama orang tua anak perempuan untuk segera menikahkan anak perempuannya di usia yang masih belia. Dengan maksud untuk menghindari gunjingan tetangga sekitar, bahwa anak perempuannya tak laku menikah (*tak pajuh lakeh*). Sebutan perawan tua merupakan aib bagi orang tua yang memiliki anak perempuan yang tidak segera menikah.

Hal tersebut semacam hukuman sosial dari masyarakat sekitar untuk orang tua anak perempuan. Sehingga orang tua akan menanggung malu bilamana anak perempuannya tidak kunjung menikah hingga di usia 16 tahun. Sebagaimana diuraikan oleh Rivai (2019), bahwa orang tua merasa khawatir jika hingga usia dewasa anak perempuannya tidak kunjung menikah. Gunjingan dari masyarakat sekitar diberikan ketika bertemu dengan orang tua secara langsung atau lewat kerabat terdekat. Anak perempuan juga

akan jadi olokan tetangga sekitar. Fenomena sosial ini merupakan indikasi terjadinya penindasan seksis terhadap perempuan Madura yang menjalani perjodohan dan pernikahan dini.

b. *Nasabiyah*

Istilah tersebut merujuk pada keturunan. Keturunan di sini maksudnya adalah keturunan dari masing-masing anak perempuan dan laki-laki yang akan dijodohkan dan dinikahkan. Menjaga tetap pada garis nasab atau turunan keluarga yang baik menjadi alasan orang tua untuk menjodohkan anak perempuannya. Pemikiran masyarakat seperti ini terjadi pada masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dan masyarakat golongan kiai. Selain untuk menjaga nasab atau turunan yang baik, perjodohan dengan alasan *nasabiyah* adalah juga karena melaksanakan wasiat dari sesepuh. Alasan lainnya adalah agar mempererat hubungan kekerabatan atau agar hubungan kekerabatan tidak hilang. Sebab lain dilakukannya perjodohan *nasabiyah* adalah supaya harta yang dimiliki orang tua dari anak perempuan dan laki-laki tidak jatuh kepada orang lain (Rifai, 2019). Beberapa alasan tersebut di atas menjadi desakan bagi perempuan Madura generasi muda untuk memenuhi maksud orang tua mereka untuk melakukan perjodohan dan pernikahan dini.

c. *Torok Ocak*

Istilah tersebut merujuk pada kepatuhan anak perempuan pada maksud orang tuanya untuk menjodohkan dan menikahkan mereka di usia belia. Persepsi masyarakat tentang usia muda menjadi penyebab mudahnya anak untuk menuruti apa maksud kehendak orang tua terhadapnya. Usia anak perempuan yang sangat muda—13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, dan seterusnya—meyakinkan orang tua bahwa anak mereka menyetujui apa yang diucapkan orang tua (*torok ocak*). Anak perempuan mereka tidak akan membantah jika dijodohkan dengan pilihan orang tua. Hal ini disebabkan karena mereka belum mengetahui merah hitam dan

timur barat. Sehingga mereka akan menuruti apa yang dikehendaki orang untuk masa depan mereka.

d. Salah Pergaulan

Pemikiran tersebut menjadi dorongan utama orang tua merencanakan perjodohan dan pernikahan dini bagi anak perempuannya. Orang tua merasa khawatir jika anak perempuannya akan melakukan pergaulan bebas yang dilarang oleh syariat agama. Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat religius, dan karena itu, tidak mengherankan jika ada pemikiran masyarakat tentang kekhawatiran akan terjadinya pergaulan bebas pada anak-anak muda. Karenanya, orang tua merencanakan perjodohan dan pernikahan dini untuk anaknya di usia dini agar mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Parameter tidak baik adalah berdasarkan syariat agama, yakni melakukan perbuatan yang melanggar norma agama. Hal tersebut oleh masyarakat lazim disebut dengan zina. Berpacaran merupakan hubungan percintaan sebelum menikah yang membuat orang tua merasa khawatir pada anak perempuannya jika melakukannya. Ditakutkan akan kebablasan dalam berpacaran sehingga bisa jadi hamil di luar nikah dan membuat aib bagi kedua orang tua dan keluarganya. Untuk kemungkinan menghindari pacaran tersebut, orang tua menjodohkan anak perempuannya pada laki-laki pilihan orang tuanya.

2. Tekanan Seksis

Pada sub bab ini akan dibahas tentang tekanan seksis (*sexist oppression*) yang dialami responden di lingkungan sentra batik Tanjung Bumi Bangkalan, Kota Sampang, Propo Pamekasan, dan Pekandangan Barat Sumenep. Tekanan seksis tersebut adalah akibat dari perjodohan atau pernikahan dini yang dialami responden. Perjodohan dan pernikahan dini merupakan pengejawantahan dari pemikiran yang bermuatan seksis dan tertanam dalam tradisi atau budaya lokal. Ada keunikan pada tiap-tiap tradisi atau budaya lokal karena banyak hal yang mempengaruhi. Karenanya, seksisme yang

ditimbulkan juga unik dan personal. Berikut adalah rangkuman beberapa tekanan seksisme yang dialami responden di keempat kabupaten di Madura.

a. Organ Reproduksi

Perjodohan yang selanjutnya diikuti pernikahan dini di bawah 16 tahun merepresentasikan tekanan seksis pada alat-alat reproduksi wanita. Dengan kata lain, pernikahan dini di bawah 16 tahun adalah pernikahan di bawah usia reproduktif sehat. Sehingga bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatnya jumlah angka ibu dan anak sakit, jumlah kematian ibu dan anak saat persalinan, jumlah kelahiran bayi prematur, jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah, hingga jumlah ibu stres (Priohutomo, 2018). Sementara ketetapan pemerintah untuk ketentuan usia pernikahan perempuan adalah di atas 21 tahun. Di usia ini, organ reproduksi perempuan sudah berfungsi secara optimal.

b. Verbal Abuse

Pernikahan dini kerap menimbulkan pelecehan secara verbal pada istri. Tekanan seksis ini dipicu oleh beberapa hal: dominasi suami dalam keluarga dan pandangan masyarakat patriarki bahwa istri adalah hak suami. Suami merasa sebagai kepala keluarga yang berhak melakukan apa pun terhadap istrinya karena telah menjadi haknya. Ini juga disebabkan oleh usia suami yang masih muda yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi. Dengan demikian, tak dapat dipungkiri ketika istri melakukan kesalahan atau tidak menjalankan kewajiban mengurus rumah tangga dengan baik, seringkali menyebabkan suami emosi dan pelecehan secara verbal akan didapat oleh istri. Hinaan, cacian, dan olokan dari suami pada istri di situasi seperti itu seringkali terjadi. Hal ini merupakan tekanan seksis yang memberikan dampak tidak baik bagi istri dalam berumah tangga.

c. Putus Sekolah

Pernikahan dini menyebabkan responden sebagai istri ketika melakukan pernikahan dini akan putus sekolah. Istri tidak lagi bisa melanjutkan sekolah lanjut sebagaimana teman-teman sebayanya. Sekolah dianggap tidak lagi penting bagi seorang istri. Kewajiban istri merawat suami dan mengurus rumah tangga merupakan wajib dan penting dalam kedudukannya yang saat itu menjadi seorang istri. Istri sudah harus mengalihkan segala fokus perhatiannya hanya pada keluarga barunya bersama suaminya. Responden menerima hal tersebut. Namun terkadang terjadi rasa iri jika mendengar atau melihat media sosial atau cerita teman sebaya tentang pengalamannya di sekolah. Hal ini mencerminkan tekanan seksis pada responden.

d. Pembatasan Akses Sosial

Setelah menjalani pernikahan dini, responden mengalami pembatasan akses sosial. Responden tidak diizinkan untuk melakukan kontak sosial baik secara *online* atau *offline* tanpa izin dari suami. Karena posisi istri dalam perspektif masyarakat dengan sistem patriarki adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga dan merawat suami dan anak. Di samping itu, istri diperbolehkan untuk ke luar rumah dengan batasan-batasan tertentu. Jika istri melanggar, maka akan ada sanksi untuk istri, baik secara verbal atau fisik oleh suami atau masyarakat.

e. Tekanan Mental

Responden mengalami tekanan mental ketika *verbal abuse* dan *physical abuse* terus ditujukan pada responden, terutama di saat responden melakukan kesalahan. Pada awalnya seperti tiada reaksi negatif dari tekanan tersebut. Namun setelah menimbun dalam jumlah yang tidak bisa ditampung lagi, seringkali mengakibatkan tekanan mental bagi responden. Tidak mendapat perhatian suami dengan baik, sehingga seakan-akan si istri hanya bertugas mengurus rumah tangga juga memberikan tekanan mental bagi responden.

f. Beban Fisik

Kewajiban merawat suami, anak, dan mengurus suami yang harus dilakukan 24 jam penuh tiap hari menjadi beban fisik bagi responden. Apalagi jika kewajiban tersebut dibebankan sepenuhnya ke responden karena merupakan kewajibannya kini sebagai seorang istri. Tidak berhenti hingga di urusan rumah tangga, responden pun punya tanggung jawab secara ekonomi untuk membantu ekonomi keluarga, seperti membantu berkebun dan membatik. Kegiatan tersebut sungguh membutuhkan fisik yang prima. Tak jarang responden sakit karena kelelahan mengerjakan kewajiban yang berjibun.

g. Tiada Ruang

Dimulai dari perjodohan dan dilanjutkan dengan pernikahan dini, responden mengalami tekanan seksis berupa tiada ruang. Semua hal yang berkaitan dengan rumah tangga dan anggotanya, suami sebagai kepala keluarga yang mengambil peran sebagai pemberi keputusan. Istri tidak terlibat dalam mengambil keputusan karena dianggap pendapatnya tiada berguna. Ini merupakan gambaran tentang tiada ruang untuk menunjukkan eksistensi responden.

h. Kekerasan Fisik

Istilah tersebut merujuk pada responden yang mengalami tekanan seksis dimulai sejak awal rencana perjodohan. Apa pun terkait perjodohan responden dengan calon suami merupakan hak prerogatif ayah responden dan keluarga calon suami. Artinya, responden tidak disertakan keterlibatannya untuk masa depan kehidupannya sendiri (Munawara, et al. 2015). Hal ini merepresentasikan bahwa posisi responden sebagai anak perempuan adalah subordinat. Ia diatur oleh ayah dengan posisi sentral yang mengatur dan mengontrolnya. Fenomena ini menunjukkan secara jelas bahwa tiada ruang bagi responden untuk menyuarakan pendapat, walaupun itu menyangkut kehidupannya pribadi.

3. Solidaritas

Sebagaimana dijelaskan Bell Hooks (1984) bahwa perempuan harus hidup dan bekerja dalam solidaritas. Solidaritas sangat diperlukan untuk melawan tekanan seksis. Perempuan sebaiknya menjalin ikatan bukan berdasarkan persamaan nasib sebagai korban, tetapi berdasar kekuatan dan sumber daya bersama. Ini adalah tipe ikatan yang merupakan esensi *sisterhood*. Perempuan harus belajar arti yang benar dari nilai *sisterhood*. Halangan yang memisahkan perempuan harus dieliminasi agar solidaritas hadir, sebab perubahan dan transformasi masyarakat secara menyeluruh tidak dapat diharapkan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, sistem patriarki dalam masyarakat yang dihadapi oleh responden tidak dapat dirubah secara total, maka yang dapat dilakukan adalah dengan pro aktif mendapatkan solidaritas dari *social circle*. Artinya, saat terbangun solidaritas untuk responden, saat itulah rintangan di antara responden dan *social circle* dapat dieliminasi.

Berikut adalah beberapa rangkuman tentang solidaritas yang terbangun untuk responden sebagai “korban” tekanan seksis akibat perjodohan dan pernikahan dini yang telah dijalani. Untuk tiap-tiap solidaritas yang didapat disertakan uraian tentang berbagi sumber daya dan kekuatan. Sebab hal ini merupakan nilai ikatan yang benar sebagai dukungan terhadap perempuan yang menghadapi tekanan seksis. Dengan demikian, manfaat yang ditimbulkan adalah semangat untuk bersatu menghadapi, melalui, dan menghentikan tekanan seksis. Bukan melakukan ikatan dengan cara berbagi pengalaman sebagai korban tekanan seksis, sebab hanya akan memperlemah semangat untuk berjuang melawan tekanan seksis, dikarenakan alasan bersatu adalah senasib sesama korban tekanan seksis.

a. Solidaritas Keluarga

Solidaritas keluarga merupakan hal yang paling primer bagi responden untuk tetap memiliki semangat di saat menjalani krisis

diri dalam rumah tangganya. Salah satu bentuk ikatan persaudaraan yang dibentuk dari rasa empati keluarga terdekat seperti ibu dan saudara kandung terhadap responden menumbuhkan energi dan kekuatan baginya. Ibu responden menceritakan pengalaman yang dialaminya di masa perjodohan dan pernikahan dini, dan ini menjadi faktor menumbuhkan sumber daya bagi responden untuk memiliki rasa sabar dan berlapang dada dalam menghadapi tekanan seksis ini.

b. Solidaritas Teman

Teman, terutama sahabat responden, menjadi faktor penguat responden. Sebelum mengalami perjodohan dan pernikahan dini, responden dan sahabatnya senantiasa bertukar cerita, perasaan, dan pikiran. Karenanya, di saat menikah, ketika responden membutuhkan sahabatnya, maka sahabatnya akan menunjukkan solidaritas secara material atau non material untuk responden sehingga menguatkan ikatan psikologis di antara mereka.

c. Solidaritas Tetangga

Tetangga yang mengetahui keadaan responden akan memberikan solidaritas pada responden dengan berbagai cara, seperti mengunjungi, membantu meringankan pekerjaan rumah tangga, dan memberikan dukungan material untuk responden. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Madura adalah masyarakat berkelompok yang kuat hubungan persaudaraan dan bertetangganya. Tidak heran ketika ada tetangga di desanya mengalami hal tidak baik, maka sensitifitas mereka terstimulasi untuk segera memberi dukungan.

d. Solidaritas Tokoh Agama

Solidaritas ini didapatkan dari pemuka agama di *social circle* responden. Beban berat psikis yang dihadapi mendorong responden untuk curhat ke ustazah di desa tempat responden tinggal. Nasihat dan saran diberikan pada responden untuk tetap menjalani

rumah tangganya sebagai nilai ibadah dan mereka memberikan wirid (doa) untuk diamankan responden agar bisa sabar, kuat, dan terhindar dari bala. Masyarakat Madura adalah masyarakat agamis yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Pemuka agama Islam menjadi referensi untuk segala masalah yang dihadapi.

e. Solidaritas dari Media Sosial

Bentuk solidaritas yang diperoleh melalui media sosial adalah pemberian dukungan dan semangat dari teman-teman sebaya atau teman-teman virtual dari curhatan responden. Responden dengan sembunyi-sembunyi memposting curhatan tentang pengalaman yang dihadapi. Responden menggunakan nama akun yang tidak mudah dikenali oleh suami dan keluarganya. Teman-teman sebaya dan virtual memberikan dukungan dan saran positif untuk responden. Responden juga mencari referensi generasi yang sama dan memiliki pengalaman yang sama untuk mendapat dukungan secara virtual dari media sosial.

f. Solidaritas Pemerintah

Responden juga mengikuti kegiatan workshop yang diprogram oleh kabupaten setempat. Responden juga mengikuti acara expo yang difasilitasi oleh Pemkab setempat. Salah satu manfaatnya mengikuti expo adalah untuk meningkatkan akses pasar. Kementerian Perindustrian memiliki program *e-Smart* IKM (Industri Kecil Menengah) yang bertujuan mendorong pelaku usaha untuk masuk dalam pemasaran *online*. Manfaat lain mengikuti expo adalah agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengapresiasi kain batik Madura, khususnya karena batik Madura ini dilukis oleh para perajin secara otentik sehingga menghasilkan motif yang berbeda dan unik. Salah satu kegiatan expo yang pernah diikuti oleh responden adalah *Event* Pesona Batik Wastra Nusantara pada tanggal 25 September-6 Oktober 2019 di Summarecon Mall Kelapa Gading (MKG) yang ke-4 dalam rangka Hari Batik Nasional, 2 Oktober 2019.

g. **Solidaritas Asosiasi**

Solidaritas asosiasi adalah berkaitan dengan beberapa program yang ada di asosiasi untuk membantu responden agar memiliki kekuatan strategis, daya tawar (*bergaining power*), dan posisi tawar (*bergaining position*) yang sederajat di arena industri kreatif berbasis budaya. Ada beberapa manfaat yang didapatkan dengan bergabung di Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Pertama, mendapat *support* untuk peningkatan bidang ekonomi bagi perajin dan pengusaha batik yang bergabung. Hal ini sejalan dengan slogan dari asosiasi, yakni “bersama APPBI bantu perekonomian perajin batik Indonesia.” Asosiasi ini dibentuk dengan tujuan untuk melestarikan dan memasyarakatkan batik tulis dan batik cap yang semakin tergusur dengan tiruan batik.

APPBI dibentuk tahun 2017 dengan tujuan berikutnya adalah menggalang persatuan dan kesatuan dengan memiliki visi misi yang sama, yakni memiliki kekuatan yang strategis, daya tawar, dan posisi tawar yang sederajat di arena industri kreatif berbasis budaya. Tujuan yang tidak kalah penting adalah melahirkan temuan teknologi baru untuk kerajinan batik Indonesia dan mensinergikan dengan program pemerintah yang berhubungan dengan kerajinan batik Indonesia. Asosiasi ini terbentuk dari kepedulian perajin dan pengusaha batik untuk menjaga tradisi luhur budaya bangsa Indonesia. Beberapa program webinar yang dilaksanakan oleh APPBI di masa pandemi bertujuan untuk membantu perajin dan pengusaha batik bertahan dan terus berkembang di masa krisis pandemi. Salah satu program webinar tersebut adalah webinar dengan tema “Batik Story Caretanah Salbut Cerita Klasik Batik Madura” dilaksanakan pada Sabtu, 23 Oktober 2021. Disiarkan secara live dengan aplikasi Zoom dengan menghadirkan narasumber Dra. Hj. Siti Maimona sebagai bidang keanggotaan di APPBI dan pemilik sentra Batik Pesona Madura. Webinar tersebut juga memosting akses Instagram yang menampilkan koleksi batik-batik cantik di Bursa Batik Indonesia di #BakulBatikAPPBI.

h. Solidaritas Peneliti

Solidaritas yang diberikan tim peneliti untuk responden adalah pendampingan pembuatan media sosial, yakni Instagram, dengan *caption* berbahasa Inggris. Medsos ini mengunggah tentang perempuan dan batik Madura yang bertujuan untuk pengenalan secara global batik Madura sebagai warisan budaya Indonesia dan perempuan dengan budaya Madura yang memiliki keunikan tersendiri. Dengan demikian, pemasaran batik Madura akan lebih luas jangkauannya dan juga penghargaan terhadap perempuan dan budaya Madura lebih meningkat dari sebelumnya yang lebih cenderung dianggap rendah.

Bentuk solidaritas lain yang diberikan peneliti untuk responden adalah bersama responden mendaftar di kelas pelatihan “Seni, Desain Aplikatif dan Literasi Digital untuk Kesiapan Kerja” yang dilakukan secara daring. Hal ini bertujuan untuk membantu responden menggali dan meningkatkan *sense* tentang seni yang digunakan untuk mendesain motif batik dan pewarnaannya. Sehingga bisa diterima oleh konsumen regional, nasional, internasional, lintas zaman, berbagai kelas masyarakat, dan di berbagai acara. Lebih lanjut, dengan pelatihan tersebut responden bisa membuat batik yang lebih revolusioner dengan bantuan desain aplikatif. Literasi digital responden juga akan meningkat dengan pelatihan tersebut. Sebab responden akan dilatih memanfaatkan IT di *handphone*, tablet, atau komputer untuk membantu kebutuhannya menulis batik.

4. Power Dasar Pribadi

Power dasar pribadi adalah istilah yang digunakan Bell Hooks (1984) saat mengusulkan tentang perubahan perspektif *power*. Ketika seseorang berhasil mendominasi yang lain, maka dia disebut sebagai *powerfull*, suatu definisi yang sekian lama diterima di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, artinya perempuan tidak berdaya ketika laki-laki dalam sistem patriarki

menjadi figur yang mendominasi perempuan. Sesungguhnya *male supremacy* adalah bentuk dasar dominasi paling tua yang berlaku pada segala bidang, yakni politik, ekonomi, lembaga budaya, dan membeking kontrol mereka dengan kekuatan fisik. Mereka menggunakan *power* mereka untuk mempertahankan perempuan agar tetap berada di posisi inferior. Agar mereka tetap mendapatkan manfaat ekonomi, seksual, dan psikologi. Sementara perempuan tetap tertekan.

Usulan Bell Hooks (1984) tentang konsep *power* yang berbeda secara radikal, bahwa perempuan kuat merujuk pada praktik *power* dasar pribadi mereka untuk menghentikan dominasi laki-laki atas mereka. Dengan demikian, *power* bukanlah ketika berhasil mengontrol dan mendominasi yang lain. Akan tetapi, *power* adalah sesuatu yang kreatif dan menguatkan kehidupan. Hal ini sama dengan bahwa *power* adalah kemampuan untuk bertindak dengan kekuatan dan kemampuannya, atau dengan tindakan yang menghasilkan prestasi. Sehingga walaupun perempuan dalam kondisi lemah, dieksploitasi, atau dijebak dalam keadaan yang menekan, sesungguhnya mereka mampu melakukan praktik *power* dasar personal mereka. Perempuan seharusnya menyadari bahwa ketika mereka mempraktikkan *power* tersebut, itu merupakan tindakan perlawanan dan kekuatan.

Sejalan dengan konsep konstruktif positif tentang perspektif *power*, maka *power* responden akan dianalisa berdasarkan berbagai macam praktik *power* dasar personal yang dilakukan. Praktik *power* dasar personal mereka adalah untuk menghentikan tekanan seksis dari dimulainya perjodohan dan pernikahan dini yang mereka alami. Tradisi pernikahan dan perjodohan dini merepresentasikan tentang dominasi laki-laki yang terikat dalam budaya. Praktik dasar personal mereka dibagi ke dalam tiga bagian: energi, kekuatan, dan interaksi efektif. Berikut adalah beberapa rangkuman praktik *power* dasar responden untuk menghentikan tekanan seksis.

a. Energi

Istilah ini merujuk pada sumber daya yang dimiliki oleh responden untuk menghentikan tekanan seksis yang dihadapi. Sumber daya berupa semangat keberanian untuk menghentikan tekanan seksis meliputi semangat berani bertanya, menyampaikan pendapat, dan menolak keputusan ayah atau pihak keluarga calon suami tentang perjodohan yang diatur untuk responden. Di samping itu, sumber daya yang dimiliki responden berupa ketegasan, kecerdasan pikiran, dan verbal, yang semuanya adalah sumber daya immaterial. Sementara untuk sumber daya material adalah kekayaan materi.

Semua sumber daya tersebut sebagai energi bagi responden untuk mempraktikkan *power* dasar pribadinya guna menghentikan tekanan seksis yang dialami. Saat masa perjodohan, responden atau yang mewakili (bisa jadi ibu, kakak, dan keluarga dekat responden) mereka memiliki semangat keberanian untuk menanyakan ke ayah atau keluarga pihak calon suami tentang siapa dan apa pekerjaan calon suaminya. Pertanyaan lain juga terkait calon suami yang akan menjadi pendamping dalam hidupnya. Semangat keberanian tersebut sebagai bentuk perlawanan verbal secara persuasif terhadap perjodohan dan pernikahan dini yang telah membudaya di desa tempat tinggalnya.

Diperlukan semangat keberanian untuk menanyakan tentang calon suami pada ayah sebagai puncak tertinggi pembuat keputusan dalam rumah tangga dan keluarga calon suami. Dikarenakan hak istimewa ayah adalah berkuasa penuh atas anggota keluarganya dan tabu untuk dikritik, ditolak, apalagi dilawan. Ayah sebagai simbol sentral dalam keluarga yang menjadi penentu kewibawaan keluarga. Demikian juga dengan keluarga calon suami yang memiliki posisi sosial lebih tinggi dari keluarga calon perempuan. Keluarga calon suami juga memiliki martabat yang harus dijaga di hadapan keluarga calon istri dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Hooks (1984) bahwa *male supremacy* merupakan dasar

dari hierarki dalam masyarakat. Di samping semangat keberanian bertanya, responden atau yang mewakili, memiliki semangat keberanian untuk menyatakan pendapat pribadi pada ayah atau keluarga calon suami tentang calon suami yang akan dijodohkan. Untuk semangat keberanian menyatakan pendapat, diperlukan tingkatan energi satu tahap yang lebih tinggi dibandingkan dengan bertanya. Di tingkat yang lebih tinggi lagi setelah bertanya dan menyatakan pendapat, responden memiliki semangat keberanian untuk menolak.

Pengajuan pertanyaan tentang calon laki-laki yang dijodohkan dengan responden adalah sebagai upaya untuk mengaktualisasi diri secara persuasif. Ayah perlu melibatkan responden atau yang mewakili untuk masa depan dirinya dan keluarganya. Pengajuan menyatakan pendapat dengan ditujukan ke ayah atau keluarga calon suami dilakukan ketika calon laki-laki yang akan dijodohkan tidak sesuai dengan maksud responden atau yang mewakili. Pernyataan pendapat pribadi ini merupakan bentuk aktualisasi diri yang lebih tegas pada simbol sentral dalam keluarga. Dengan demikian, dapat dikatakan melecehkan simbol tertinggi dalam sistem patriarki, di mana ayah sebagai simbol tertinggi di keluarga. Pun juga tidak menghargai keluarga calon suami yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari keluarga calon istri. Pengajuan penolakan adalah semangat keberanian yang sangat ekstrem yang dilakukan responden atau yang mewakili dalam mengaktualisasi dirinya.

Energi yang menumbuhkan semangat keberanian bertanya, mengemukakan pendapat, dan mengajukan keberatan pada ayah atau keluarga calon suami diperoleh dari solidaritas yang dibangun antara responden dan *social circle*. Solidaritas itu menciptakan jalinan ikatan yang kuat antara responden dan *social circle*, dan menumbuhkan semangat keberanian tersebut. Semangat keberanian yang dimiliki perempuan Madura generasi milenial lebih besar dibanding dengan generasi sebelumnya. Hal ini disebabkan karena praktik perjodohan perempuan Madura generasi milenial sudah

berkurang. Banyak teman sebaya yang tidak menjalani praktik tersebut. Sehingga responden meyakini bahwa dirinya tidak harus menjalani perjodohan tersebut. Ini juga disebabkan oleh zaman di mana responden tinggal, zaman dengan era teknologi tinggi. Suatu era yang memudahkan responden mengakses informasi hanya dengan sentuhan jari. Dengan sentuhan jarinya, responden mendapat referensi tentang masa muda yang penuh dengan pengalaman indah dan menyenangkan. Sehingga responden memiliki keputusan untuk menikmati masa mudanya daripada menikah di usia dini dengan menanggung banyak kewajiban besar yang menyebabkan kehilangan masa muda.

b. Kekuatan

Istilah ini merujuk pada kekuatan untuk melakukan *action* melawan tekanan seksis. Saat responden menjalani perjodohan dan dilanjutkan dengan pernikahan dini, di saat itulah awal mula responden mempraktikkan *power* dasar personal untuk bisa menjalani, melalui, dan menghentikan tekanan seksis yang timbul dari pernikahan dini yang dijalani. Rangkuman berikut adalah beberapa narasi kekuatan dasar yang dipraktikkan oleh responden di beberapa masa pernikahan dini, yakni menahan diri, membela diri, dan melawan.

Menjalani masa pernikahan dini dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya memberikan tantangan bagi responden dalam menjalani hubungan suami istri. Di fase awal pernikahan dini, demi untuk menjaga citra sebagai anak yang baik, maka responden menjalani posisi sebagai istri yang patuh pada suami. Kewajiban yang berat di mana pada di usia dini responden sudah harus melayani semua kebutuhan suami dan merawat rumah. Kewajiban tersebut dimulai dari bangun tidur hingga sampai tidur lagi. Kewajiban yang menjadi suatu tradisi yang dilekatkan pada diri seorang istri. Sebagaimana Bell Hooks (1984) menjelaskan, ketika seksisme itu dilegalkan dalam sebuah lembaga, seperti salah satu

contohnya pernikahan dalam masyarakat patriarki, maka perempuan tersebut tidak akan menganggap tugas-tugas tersebut sebagai suatu tekanan. Responden menjalaninya dengan sebaik mungkin. Sumber daya berupa kesabaran membantu responden melakukan *action* dengan menerima lapang dada semua kewajiban baru yang harus dipikul.

Bahkan atas nama agama, yakni sebagai nilai ibadah yang dilegalkan dalam kewajiban yang tiada henti. Hingga ketika ada kekurangan dari menjalani kewajiban tersebut, beberapa mengalami kekerasan fisik atau verbal dari suami. Responden dalam hal ini pun menerima disebabkan karena usianya yang masih dini dan orang tua responden pun menganggap bahwa responden sudah menjadi hak suaminya. Tidak berhenti sampai di kewajiban rutinitas harian, responden masih memiliki kewajiban tambahan membantu suami di ladang bertanam jagung, ketela pohon, hasil bumi yang lain, dan membatik. Kewajiban tambahan tersebut adalah untuk menambah ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Fase awal pernikahan dini, yakni tahun pertama hingga tahun kedua, responden menjalani kewajiban yang super berat dalam peranan sosial yang baru sebagai istri dan ibu rumah tangga. Status sosial ibu rumah tangga yang membawa konsekuensi adalah tanggung jawabnya mengurus rumah tangga. Dengan artian, suami tidak berkewajiban di wilayah rumah tangga. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan seksis dalam pernikahan dini. Sikap responden adalah menjalani semua dengan usaha sebaik mungkin. Keadaan ini disebut oleh Bell Hooks (1984) bahwa perempuan itu *powerfull* manakala dia telah mempraktikkan *power* dasar pribadi (*personal basic power*) sehingga kuat menjalani tekanan seksis yang dihadapi.

Fase terberat rumah tangga adalah tahun ketiga pernikahan. Masa di mana terjadi adaptasi antara suami dan istri. Responden yang sudah semakin dewasa sehingga memberikan pengaruh pada pemikirannya untuk berpikir kritis tentang keadaan dirinya dalam

rumah tangga. Apalagi jika dalam berumah tangga tersebut sudah hadir anak. Hal ini menambah beban kewajiban bagi responden. Tak bisa dipungkiri bahwa seringkali terjadi pertengkaran. Responden menunjukkan keberadaan dirinya bahwa dia perlu perhatian dan pertolongan dalam menjalani kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Ini merupakan alasan untuk melakukan *action* pembelaan diri pada suaminya yang tidak ikut membantu mengurus rumah tangga. *Action* ini muncul dari adanya sumber daya keberanian, kedewasaan usia, cara berpikir dan sikap.

Suami yang enggan mengerjakan pekerjaan rumah tangga disebabkan karena perspektif masyarakat bahwa memang laki-laki hanya bertanggung jawab untuk urusan di luar rumah. Tak jarang kekerasan verbal diselingi dengan kekerasan fisik diterima oleh responden di saat fase melalui masa-masa kritis pernikahan dini. Respons responden untuk keadaan ini adalah dengan melawan untuk menyadarkan suami akan posisinya yang tidak seharusnya dikerdilkan hanya dalam urusan rumah tangga. Fenomena ini sejalan dengan uraian Bell Hooks (1984) tentang *personal basic power* perempuan dalam menghadapi dominasi laki-laki dalam rumah tangga.

Masa kritis yang dialami juga memicu responden untuk melakukan *action* meninggalkan suaminya dan kembali ke orang tuanya. Dengan kata lain, responden mengajukan perceraian. Keputusan yang diambil responden adalah bentuk kekuatan untuk menghentikan tekanan seksis. Dengan kembali ke orang tua atau bercerai, artinya tekanan seksis yang dialami respon tidak lagi dijalani. Sesungguhnya keputusan untuk bercerai sangat sulit, apalagi jika ada anak hasil pernikahan dini tersebut. Karena dampak psikologis akan berakibat pada anaknya. Keputusan bercerai menunjukkan eksistensi diri seorang perempuan yang perlu pengakuan dari laki-laki dan masyarakat.

Perempuan, juga sama halnya dengan laki-laki, sebagai manusia yang perlu diakui hasil karya dalam kewajiban besarnya

mengurus rumah tangga. Supaya tidak ada anggapan bahwa kewajiban rumah tangga yang dikerjakan hanya kewajiban rutinitas yang tidak ada nilainya jika dibanding seorang laki-laki yang menghasilkan uang. Inilah yang kemudian dianggap oleh masyarakat patriarki bahwa laki-laki lebih bernilai. Keadaan ini merepresentasikan praktik kekuatan dasar personal responden untuk menghentikan tekanan seksis dalam pernikahan dini yang dijalani bersama suaminya. Suatu bentuk pelaksanaan *action* pengajuan perceraian yang tumbuh dari sumber daya ketabahan, ketegasan, kedewasaan, dan keberanian.

c. Interaksi Efektif

Istilah tersebut merujuk pada bonding atau ikatan yang dibangun dengan responden, yang kemudian menjadi suatu interaksi yang efektif dan menumbuhkan *power* bagi responden. Ikatan yang terjalin dengan responden adalah memberikan *support* material dan moral untuk memajukan kemanusiaan. Artinya, interaksi antara *social circle* dengan responden berlangsung efektif ketika dari interaksi tersebut mampu memberikan solusi. Sehingga responden mampu mempraktikkan *power* dasar personalnya untuk masalah kemanusiaan yang dihadapi. Karena sesungguhnya tekanan seksis yang dialami dalam pernikahan dini membuat responden menjadi korban dan ini melanggar nilai kemanusiaan.

Jalan keluar yang diberikan membuat responden bergerak melakukan *action* untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Perubahan harus dilakukan pada masalah kekerasan seksis yang dijalani untuk memperbaiki nilai kemanusiaan yang tercoreng karena kekerasan seksis tersebut. Responden melakukan *action* dengan usaha membatik untuk mencari tambahan ekonomi bagi keluarga, dan ini menunjukkan eksistensi dirinya. Keputusannya untuk melakukan *action* usaha membatik, baik dirinya sebagai pekerja, perajin, maupun pengusaha adalah untuk pengaktualisasian dirinya sebagai perempuan yang bisa membantu perekono-

mian keluarga dan masyarakat luas. Kegiatan tersebut meningkatkan perekonomian bagi diri, keluarga, masyarakat, dan negara.

Bahkan interaksi yang efektif menciptakan jejaring untuk pemasaran batik dari mulai tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, dan cara pemasaran secara reguler dan *online*. Untuk tingkat lokal, regional, dan reguler, ada beberapa cara pemasaran yang ditempuh. Salah satunya adalah menjual secara *door to door* yang dilakukan terutama saat panen tembakau di desa tempat responden tinggal. Berikutnya adalah menyimpan batik di rumah responden bagi pembeli yang datang berkunjung ke rumah atau *workshop*. Pemasaran juga dilakukan dengan menitipkan di toko-toko pasar terdekat bagi pembeli yang berminat. Cara pemasaran reguler yang lain adalah memasarkan dengan cara *jastip* (jasa titip).

Untuk pemasaran tingkat lokal, regional, nasional, internasional, dan *online*, ada beberapa cara yang ditempuh. Pemasaran *online* dilakukan di media sosial, seperti Instagram, Shopee, Whatsapp, dan Facebook. Cara pemasaran ini membutuhkan literasi digital yang baik agar responden dapat memanfaatkan secara optimal teknologi informasi dari media sosial tersebut sebagai media untuk memasarkan batik. Dengan interaksi yang efektif dengan *social circle*, responden mendapat bantuan untuk memiliki literasi digital guna memasarkan karya-karya batik yang diproduksi. Literasi digital yang diperlukan terkait dengan pemasaran batik adalah menampilkan batik dalam bentuk foto sesuai aslinya dan menarik, membuat *caption* yang menarik konsumen, dan melakukan pengamanan untuk transaksi secara *online*.

Responden yang berhasil menjalankan *action*-nya tidak saja berhasil meraup rupiah untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, tapi juga masyarakat sekitar. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah menjaga kelestarian batik Madura sebagai warisan kekayaan budaya lokal yang telah diakui oleh UNESCO sebagai kekayaan budaya Indonesia. Kini telah tampak jelas dari *action* responden untuk mengubah peranan positif sosial ekonomi budaya telah

dicapai. Karenanya, posisinya telah bergeser dari *secondary* menjadi *primer society* yang menjadi pemeran penting untuk pemasaran bisnis budaya batik.

F. Kesimpulan

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari bab sebelumnya, yakni hasil penelitian. Seperti telah diuraikan dalam hasil penelitian, bahwa ada tiga hasil penelitian berdasarkan tiga tujuan penelitian. Karenanya, pada bab kesimpulan akan dibagi ke dalam tiga bagian, dengan masing-masing bagian menguraikan ringkasan dari tiga hasil penelitian. Pertama adalah sub bab yang membahas tentang isu seksisme (*the attachment to sexism*) dan tekanan seksis (*sexist oppression*) yang dialami oleh responden akibat dari perjudohan dan pernikahan dini yang tertanam dalam tradisi atau budaya lokal. Kedua adalah sub bab yang menguraikan tentang solidaritas yang diperoleh dari lingkungan sosialnya. Ketiga adalah sub bab yang menjelaskan tentang praktik *power* dasar mereka dalam menjalani tantangan kehidupan hingga berhasil menjadi pemeran bisnis budaya Madura berbasis solidaritas regional, nasional, dan internasional. Ketiganya merupakan tujuan dijalankannya penelitian ini, yakni “Perjudohan Perempuan Madura Generasi Milenial: Praktik Kekuasaan untuk Pemberdayaan Diri hingga Pemeran Penting Pengembang Bisnis Industri Kreatif di Madura Berbasis Solidaritas Regional, Nasional, dan Internasional.”

Kesimpulan tentang hasil penelitian pertama adalah tentang isu seksisme (*the attachment to sexism*) dan tekanan seksis (*sexist oppression*). Responden yang mengalami masa perjudohan di usia yang sangat belia adalah karena budaya di desa tempat responden tinggal. Budaya ini merupakan isu seksisme yang menjadi alasan dasar dan kuat untuk menjalankan perjudohan. Budaya tersebut berupa pola pikir masyarakat dengan sistem patriarki. Beberapa di antaranya adalah *tak paju lakeh*, *nasabiyah*, *torok ocak*, dan salah

pergaulan. *Tak pajuh lakeh* merupakan pola pikir yang memberikan stigma pada orang tua yang memiliki anak perempuan bila mana tidak segera menikahkan anaknya akan mendapat cemoohan masyarakat sekitar sebagai *tak pajuh lakeh*. *Nasabiyah* merupakan pola pikir yang dijalankan sebagian besar oleh pemimpin pondok, yakni kiai demi menjaga keturunannya agar tetap pada jalur keturunan orang-orang yang berilmu agama Islam.

Nasabiyah juga merupakan jalan berpikir orang tua yang memiliki tujuan untuk tetap menjaga hubungan kekerabatan atau agar hubungan kekerabatan tidak hilang. Untuk orang tua dengan ekonomi yang sangat mapan, pola pikir tersebut bertujuan agar harta kekayaannya tidak jatuh pada keturunan yang lain yang bukan dari nasabnya, yakni turunan dari ayah atau ibu. *Torok ocak* merupakan standar berpikir orang tua yang menjodohkan anak perempuannya di usia dini. Karena dengan usia masih belia, sang anak masih menuruti apa saran, arahan, dan kemauan orang tua. Salah pergaulan merupakan dasar pemikiran orang tua yang menjodohkan anaknya di usia sangat belia dengan tujuan agar anaknya tidak salah dalam pergaulan, seperti hamil di luar nikah.

Isu seksisme tersebut berdampak pada terjadinya tekanan seksis (*sexist oppression*). Tekanan seksis yang dialami oleh responden meliputi organ reproduksi, *verbal abuse*, putus sekolah, dan pembatasan akses sosial. Perjodohan yang dilanjutkan dengan pernikahan dini, yakni di usia kurang dari 16 tahun, kemudian menyebabkan masalah pada organ reproduksi. Karena di usia ini, organ reproduksi perempuan belum siap untuk melakukan hubungan intim. Pernikahan dini juga mengakibatkan *verbal abuse*, salah satunya cemoohan pada responden jika ada kesalahan yang diperbuat dan karena usia responden sangat belia sehingga dengan mudahnya cemoohan itu dilakukan. Setelah menjalani pernikahan dini, responden harus mengalami putus sekolah. Ini mencerminkan tekanan seksis karena keputusan tidak boleh meneruskan sekolah adalah karena kewajiban utamanya untuk merawat suami, anak,

dan mengurus rumah tangganya yang baru. Setelah menjalani pernikahan dini, responden diharuskan untuk membatasi akses sosial yang selama ini terjalin. Ini menggambarkan adanya tekanan seksis yang dialami oleh responden yang mengakibatkan rasa kesenangan karena berhubungan dengan teman-temannya terputus karena batasan tersebut. Dengan kata lain, responden tidak bisa bercerita, bersendau gurau, berkeluh kesah tentang pengalamannya pada teman-temannya sebagaimana sebelumnya telah dilakukan.

Kesimpulan tentang hasil penelitian kedua adalah tentang solidaritas yang didapatkan oleh responden dari *social circle*. Ikatan yang terjadi di antara responden dan *social circle* adalah karena adanya *sharing sources* bukan atas dasar persamaan nasib sebagai korban seksis. Dengan ikatan karena berbagi sumber yang dimiliki, baik sumber material maupun non material, akan menguatkan tujuan dari terjadinya ikatan di antara responden dan *social circle*. Beberapa bentuk solidaritas yang didapat oleh responden dari *social circle* adalah solidaritas keluarga, teman, tetangga, tokoh agama, media sosial, pemerintah, asosiasi, dan peneliti. Masing-masing *social circle* memiliki bentuk solidaritas yang sama dan unik untuk menjalin bonding yang kuat dengan responden yang sangat diperlukan untuk mencapai satu tujuan, yakni memiliki kekuatan melawan dan menghentikan tekanan seksis.

Kesimpulan hasil penelitian ketiga adalah berkaitan dengan *power* yang dimiliki responden. *Power* dibagi dalam tiga poin, yakni energi, kekuatan, dan interaksi efektif. *Power* merujuk pada kekuatan dasar personal perempuan untuk menghentikan tekanan seksis. Energi merupakan sumber daya berupa semangat yang dimiliki responden. Kekuatan merupakan kemampuan responden untuk melakukan *action*. Interaksi efektif adalah bonding antara responden dan *social circle* yang mampu menstimulasi sumber daya yang dimiliki responden untuk mewujudkan dalam bentuk *action*, guna menghentikan tekanan seksis dalam perjodohan dini yang dia hadapi. *Action* terpenting yang dilakukan oleh responden adalah

ketika responden memutuskan untuk menekuni dunia batik sebagai penunjang ekonomi keluarga dan masyarakat. Sehingga pada akhirnya, responden bisa membuktikan dirinya sebagai perempuan yang melampaui *frame* yang dijustifikasi oleh masyarakat patriarki di desa tempat responden tinggal, yakni menjadi pemeran utama bisnis budaya di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Daftar Pustaka

- Bakir dan Hosairi, (2018). Pemberdayaan Wanita Nelayan Madura Melalui Industri Kreatif Batik. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SENIAS)*.
- Creswell, John. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publication, Inc.
- Karisyati, Septi & Moh. Hasin Abd Hadi. (2017). Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī (Perjodohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Supremasi Hukum* Vol. 6, No. 2, Desember 2017.
- Kusumawati, Hesti dan Effendy, Moh Hafid. (2020). Tradisi Perjodohan di Kalangan Masyarakat Madura pada Era Milenial. *Proceeding 1st International Conference on Morality (IncoMora) 2020: Dignity and Rahmatan Li al-Alamin*.
- Mardhatillah, Masyithah, (2014). Perempuan Madura sebagai Simbol Prestige dan Perilaku Tradisi Perjodohan. *Musâwa*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.
- Miswoni, Anis, (2016). Stereotip Kesetaraan Gender terhadap Budaya Pernikahan Dini pada Masyarakat Madura. *Jurnal Pamator*, Volume 9 Nomor 1, April 2016. **Error! Hyperlink reference not valid..**
- Muryanti, Dr, M.A dan Tri Muryani, (2019). Kekuatan Jaringan sebagai Penopang Perempuan Muda Madura di Perantauan.

- Bunga Rampai Sosiologi Masyarakat Madura*. Yogyakarta: Penerbit Elmatara.
- Purnawati, I Gusti Ayu; I Gede Agus Pertama Yudantara; dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. (2019). *Advances in Economics, Bussiness and Management Research*, Volume 69. 3rd International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2018). Atlantis Press.
- Priohutomo, S. (2018). Mencegah Pernikahan Anak melalui Program KKBPK, Banjarmasin. *Seminar Nasional Kependudukan*.
- Rifai, Mohammad, (2019). Thesis: *Persepsi Da'i Madura tentang Perjudohan Dini (Studi Kasus di Pamekasan dan Sumenep)*. Pascasarjana UINSA.
- Rohmah, Wendra G; Susinggih Wijana; M. Andhy Nurmansyah; Ika Atsari Dewi; dan Romy Setiawan. (2017). Pemberdayaan Pengrajin Batik melalui Introduksi Desain Motif Batik Berbasis Cerita Rakyat sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM Batik di Kabupaten Sampang. *Seminar Nasional 6 th UNS SME's SUMMIT & Awards 2017 Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*.
- Sa'dan, Masthuriyah, (2015). Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*. DOI: <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.143-156>.
- Sari, Titi Nur Indah, (2016). *Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura: (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi.
- Setyaningsih Santi, Rucita C.P, Ummu Hani, Ilma Nurul Rachmania, (2012). Women Empowerment through Creative Industry: A Case Study. *Procedia Economics and Finance* 4 (2012) 213 – 222.

Threadcraft, Shatema, (2019). *Reflecting on the Power of hooks-Feminist Theory: From Margin to Center*. New York: Roudledge.

INTERNET, AKSES INFORMASI, DAN GERAKAN ARUS BAWAH DI MADURA

- Surokim -

A. Pendahuluan

Inovasi media sosial dan internet membawa perubahan di lingkungan terdekat kita. Internet merupakan teknologi yang berkembang paling cepat dibanding teknologi lain di zaman modern. Menurut catatan Purbo (2000) dalam Nugroho (2012), perkembangan internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Tahun 2012, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 55 juta pengguna. Menurut Nugroho (2012), mengutip data Deloitte Indonesia (2011), internet telah menyumbang 1,6% PDB Indonesia atau sekitar USD 13,3 miliar, lebih tinggi dari kontribusi sektor gas alam cair atau LNG (1,4%) dan sektor listrik (0,5%), dan akan meningkat hingga 2,5% pada tahun 2016.

Sementara itu, kepemilikan telepon seluler menurut data Kominfo (2012) mencapai 171,4 juta dari total 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Penetrasi telepon seluler mencapai 72,8%. Namun, hingga kini problem Infrastruktur komunikasi juga masih belum rata. Sehingga masih terjadi ketimpangan dan disparitas

informasi, teknologi komunikasi, dan juga pemahaman terhadap regulasi. Sementara tinjauan historis juga menunjukkan bahwa teknologi komunikasi memiliki peran penting dalam gerakan sosial masyarakat.

Dalam konteks perubahan lingkungan mutakhir, tak terasa kini kita tengah memasuki era di mana masyarakat bisa *online* setiap saat. Masyarakat bisa mengakses apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sementara harga perangkat untuk akses internet termasuk komputer dan hp seluler semakin terjangkau dan diprediksi akan bisa menurun seiring dengan semakin kompetitifnya persaingan antar penyedia layanan telekomunikasi. Perkembangan ini tentu memicu dan mengubah budaya komunikasi dan gaya hidup masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Mereka bisa mengakses internet dan teknologi informasi. Bahkan tren *online* sekarang sudah dianggap sama pentingnya dengan komunikasi *offline*. Data *habit* media pengguna internet di Indonesia menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mayoritas menggunakan media sosial ketika sedang *online*.

Internet sebagaimana dicatat Nugroho (2012) sebagai media baru telah memberi dorongan bagi aktivitas sipil memengaruhi proses sosial budaya dan politik dan membawa perubahan sosial. Internet juga bisa mendorong tekanan publik kepada pemerintah. Selain itu, teknologi komunikasi di tengah masyarakat yang tidak beradab juga dapat digunakan untuk tujuan tidak terpuji dan menghancurkan *res publica* (Nugroho, 2012: 13). Perubahan sosial melalui teknologi komunikasi dengan demikian membutuhkan arah dan *direction* agar masyarakat sipil dapat menggunakan teknologi komunikasi tersebut secara efektif dan strategis untuk tujuan yang beradab, yaitu perbaikan masyarakat, pelestarian kebaikan bersama, dan keberlangsungan hidup bersama.

B. Internet dan Penguatan Arus Bawah

Internet dan media sosial telah membawa perubahan bagi masyarakat dan sekaligus membawa *habit* baru dalam menggunakan media. Selama ini masyarakat hanya menjadi konsumen pasif dan menjadi obyek konsumen media. Potret ini sudah kita lihat dalam berbagai aktivitas masyarakat yang mengunggah status dan memberi tanggapan atas peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, lalu membagi dengan cepat ke media sosial. Hal ini membawa perubahan menyangkut aktivitas masyarakat sipil yang selama ini terhegemoni oleh elite kekuasaan.

Masyarakat yang selama ini tertutup dan mendapat informasi dari pihak-pihak tertentu saat ini telah menikmati berkah memperoleh informasi dari berbagai sumber. Mereka memiliki akses informasi sekaligus bisa melihat dinamika informasi itu dengan membandingkan informasi yang mereka peroleh dari sekelilingnya. Hal ini secara tidak langsung turut mengasah daya kritis publik untuk terlibat dalam diskursus masalah-masalah publik yang selama ini tabu. Masyarakat akhirnya sadar bahwa mereka harus turut serta memperjuangkan aspirasi dan kehendak untuk kebaikan hidup mereka bersama.

Masifnya penggunaan internet dan media sosial tentu membawa beragam implikasi, baik yang positif maupun negatif. Tantangan ke depan tentu semakin berat, tidak saja terkait bagaimana menggunakan teknologi komunikasi tersebut, tetapi juga bagaimana mereka menggunakan teknologi itu secara benar dan bertanggungjawab.

Banyak ahli yakin bahwa perkembangan teknologi informasi sejatinya akan membawa dampak positif, tetapi sejarah membuktikan bahwa di balik niat baik selalu ada usaha jahat yang menyertainya. Karena itu, dalam pengabdian masyarakat, banyak kelompok, aktivis publik, dan pemberdayaan masyarakat ingin bersama-sama masyarakat untuk berdiskusi dan merumuskan aksi bersama agar perkembangan teknologi informasi—termasuk di dalamnya

penggunaan hp seluler dan media sosial—dapat diarah-kan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan dan kebaikan bersama.

Perkembangan ICT memang sangat cepat dan mendadak. Hal inilah yang memicu paradoks pada beberapa hal. Untuk itu, kita perlu merumuskan strategi aksi bersama sehingga perkembangan ICT itu dapat dikendalikan dan membawa perubahan sosial sebagaimana yang kita cita-citakan melalui pemberdayaan masyarakat secara aktif dan berkesinambungan.

Dalam konteks perubahan sosial masyarakat, publik harus memiliki pandangan yang optimis dan positif, bahwa ICT akan membawa kita dalam ruang publik yang jauh lebih demokratis. Pesimisme hanya akan membuat kita kerdil dan tidak memperoleh manfaat apa pun dari perkembangan ICT itu, dan juga membuat langkah kita terhambat untuk memperoleh *added value* atas perkembangan itu. Melihat cara adaptasi masyarakat kita selama ini, terbukti kita selalu mampu melakukan dengan baik dan cepat. Beragam perubahan yang dilakukan elite dapat diikuti dengan baik oleh masyarakat dalam berbagai kesempatan.

Hal negatif yang patut diwaspadai adalah penggunaan internet dan media sosial sebagai medium ujaran kebencian, konflik, sarana saling menghujat, dan memprovokasi sebagai bagian dari potret *bullying society*. Hal ini menjadikan ruang publik rusak, dan menegaskan bahwa teknologi yang positif menyimpan potensi untuk menjadi bencana jika digunakan oleh masyarakat yang tidak beradab untuk tujuan yang tidak terpuji dan merusak ruang publik. Inilah yang membuat perubahan sosial tidak selalu linear dengan cita-cita kebaikan publik. Hal ini pula yang membuat perubahan sosial tidak selalu baik dan memiliki kepastian. Ia harus dikendalikan agar bisa membawa perbaikan positif dalam masyarakat dan kepentingan bersama dengan baik dan beradab.

Sebagai ruang publik maya, kami pun memiliki harapan agar masyarakat juga memiliki kecakapan dalam aksi nyata. Sehingga teknologi itu tetap membumi dan asas kehidupan nyata tidak

tercerabut dalam budaya yang justru mengasingan mereka dalam kesehariannya.

Media sosial sebagai medium baru tidak selalu ramah kepada mereka yang tidak memiliki kecakapan bermedia. Ia bisa membuat orang mudah tersulut amarah, apalagi jika itu menyangkut hal-hal yang sensitif terhadap kehidupan mereka. Tantangan ini yang menjadi fokus kami dalam melakukan pemberdayaan publik, sehingga selalu waspada dan sigap dalam menghadapi penggunaan teknologi komunikasi yang berlangsung cepat dan masif.

Dalam proses ini, menurut Nugroho (2015), kita harus mendorong munculnya inovator-inovator yang akan menjadi penjaga kebaikan ruang publik yang patuh pada prinsip-prinsip kebaikan bersama. Para inisiator inilah sebenarnya yang bisa diandalkan untuk mengawal berbagai agenda demokrasi yang bertumpu pada kebaikan warga negara.

Kehadiran media alternatif akan menjadi semakin menarik di tengah kontestasi saat ini. Semua memang tidak lepas dari patgulipat politik dan ekonomi media. Dalam situasi seperti itu, ruang publik akan menjadi lahan perebutan *trust* dari konsumen media. Apakah media konvensional bisa mempertahankan atau justru akan tergantikan oleh media alternatif. Apakah jurnalisme konvensional masih bisa bertahan dalam tekanan jurnalisme warga yang beragam dan luas.

Melalui penggunaan internet dan media sosial, setiap informasi yang terjadi di sekitar kita bisa dengan mudah dibagi ke kawan dan masyarakat dengan cepat. Media sosial bisa mengubah tatanan politik dan sosial budaya. Ia bisa memberi tekanan dan tuntutan atas peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Kita dengan mudah mengetahui apa pun yang terjadi di sekeliling kita secara *real time*. Warga bisa menyuarakan aspirasi dan pemikirannya. Media sosial bisa dipakai untuk menggalang dukungan. Dengan demikian, perlu peningkatan kapasitas dalam mengadopsi dan menggunakan

teknologi. Ke depan, kita tidak hanya fokus kepada teknologi, tetapi juga pada kualitas interaksi (Nugroho, 2015).

Apakah akses internet dan munculnya media sosial akan membawa perubahan, dan bagaimana teknologi bisa mendorong perubahan ke arah yang lebih baik di Madura?

Internet jelas membawa perubahan dan inovasi dalam masyarakat. Ia bisa menjadi medium mobilisasi publik dan juga beragam aksi publik yang tidak terbayangkan sebelumnya. Internet bisa menjadi medium untuk gerakan sosial. Media dikendalikan oleh modal dan sulit bagi publik untuk bisa mengendalikannya. Melalui internet, kita akan menciptakan peluang baru bagi munculnya ruang publik sebagai perwujudan jaringan dan hubungan antar warga.

Internet dalam beragam bentuk sebarannya akan menjadi medium baru yang bisa membebaskan warga negara dari kendali negara dan pasar. Tidak saja jaringan, tetapi juga munculnya peluang untuk transformasi kekuatan. *Public demand* saat ini yang paling penting adalah mendorong media menjadi institusi sosial untuk benar-benar menjalankan peran guna kepentingan publik. Internet jelas menghasilkan informasi yang melimpah. Keberadaan media *online* juga akan membuat masyarakat mendapat *suplay* informasi melimpah dan menjadikan informasi berlebih sebagai komoditas dan dikapitalisasi.

Melihat cara adaptasi masyarakat Indonesia selama ini, mereka terbukti dan sudah teruji adaptif terhadap perkembangan teknologi. Terbukti, masyarakat Indonesia selalu mampu melakukan adaptasi perubahan berbagai kebijakan dalam berbagai hal soal penggunaan teknologi dengan baik dan cepat. Beragam perubahan yang dilakukan elite dapat diikuti dengan baik oleh masyarakat dalam berbagai kesempatan. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat adaptasi masyarakat Indonesia sebenarnya cukup baik dalam berbagai perubahan sosial, khususnya menyangkut adopsi teknologi baru.

Pada saat ini, mulai muncul hal-hal negatif yang patut diwaspadai. Di antaranya adalah penggunaan internet dan media sosial sebagai medium ujaran kebencian, pemicu konflik, sarana saling menghujat dan memprovokasi sebagai bagian dari potret *bullying society*. Hal ini menjadikan ruang publik rusak dan menegaskan bahwa teknologi yang positif menyimpan potensi untuk menjadi bencana jika digunakan oleh masyarakat yang tidak beradab untuk tujuan yang tidak terpuji dan merusak ruang publik. Inilah yang membuat perubahan sosial tidak selalu linear dengan cita-cita kebaikan publik. Hal ini pula yang membuat perubahan sosial tidak selalu baik dan memiliki kepastian.

Komunikasi bisa menjadi tidak produktif untuk menciptakan kesepahaman. Melalui teknologi yang memediasi, komunikasi bisa menjadi miskomunikasi, karena masing-masing pelaku tidak mematuhi prinsip-prinsip dasar berkomunikasi. Teknologi bisa mendorong pengasingan pelaku komunikasi. Dalam konteks inilah, teknologi komunikasi harus dikendalikan agar bisa membawa perbaikan positif dalam masyarakat dan kepentingan bersama dengan baik dan beradab.

Sebagai bentuk pengendalian atas media sosial, maka semua pihak bisa memberi kontribusi secara bertingkat mulai dari level individu, kelompok, masyarakat, dan negara. Pada level individu, masyarakat harus memiliki pertahanan diri untuk mampu bersikap kritis atas segala bentuk informasi yang didapatkan melalui media sosial, termasuk di dalamnya juga membuat informasi yang akan diunggah. Individu harus memiliki kesadaran penuh akan dampak informasi yang akan dibagi ke ruang media sosial. Dengan begitu, setiap orang memiliki pengendalian diri untuk tidak memproduksi informasi negatif yang bisa merusak ruang publik menjadi penuh konflik.

Pada level kelompok, di antara mereka juga tumbuh inisiatif untuk saling mengingatkan akan kebaikan ruang publik dan saling memberi dorongan untuk memanfaatkan ruang publik sebagai

bagian dari cara untuk memberdayakan dan mencerdaskan mereka, baik secara sosial maupun ekonomi. Di level masyarakat juga sama, masing-masing memiliki kepedulian untuk memelihara ruang publik menjadi ruang yang sehat bagi perikehidupan bersama. Di level negara dan elite, melalui kebijakan mereka juga akan melindungi ruang publik dari berbagai distorsi yang bisa merusak ruang publik dan kebaikan bersama hingga mengganggu harmoni dalam meraih kebaikan bersama.

Sebagai ruang publik maya, media sosial juga memiliki potensi untuk didayagunakan secara positif. Sehingga dapat dikembangkan menjadi sarana untuk berbagi, meningkatkan kapasitas bersama, dan memberi dampak kepada kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Melalui media sosial, pengetahuan masyarakat akan terus berkembang dan masyarakat akhirnya memiliki kesadaran untuk bisa mengembangkan potensi dirinya dan untuk memanfaatkan perkembangan media itu sebagai basis dalam mengembangkan diri. Kita semua berharap agar masyarakat juga memiliki kecakapan dalam aksi nyata, sehingga teknologi itu tetap membumi, berasas kehidupan nyata, dan tidak tercerabut dalam budaya yang justru mengasingkan mereka dalam kesehariannya.

Patut disadari bahwa media sosial sebagai medium baru tidak selalu ramah kepada mereka yang tidak memiliki kecakapan bermedia. Ia bisa membuat orang mudah tersulut amarah, apalagi jika hal itu menyangkut hal-hal yang sensitif terhadap kehidupan mereka. Tantangan ini patut menjadi perhatian bersama agar media sosial dapat menjadi wahana mendorong pemberdayaan publik secara berkesinambungan. Sehingga masyarakat selalu waspada dan sigap dalam menghadapi penggunaan teknologi komunikasi yang berlangsung cepat dan masif.

Dalam proses ini, menurut Nugroho (2015), kita harus mendorong munculnya inovator-inovator yang akan menjadi penjaga kebaikan ruang publik yang patuh pada prinsip-prinsip kebaikan publik. Para inisiator inilah sebenarnya yang bisa

diandalkan untuk mengawal berbagai agenda demokrasi yang bertumpu pada kebaikan warga negara. Mereka adalah para pengguna aktif media sosial yang memiliki pengetahuan cukup mengenai media sebagai ruang sehat bagi publik. Mereka yang aktif mengakses media dengan memberi asupan informasi positif yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama. Mereka yang menghindari konflik merugikan dan selalu mendorong pola hidup konstruktif yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Para inisiator itulah yang akan membawa media sosial menjadi ruang media alternatif yang sehat dan potensial bagi kebaikan demokrasi.

Upaya memperbanyak para inisiator ini menjadi tantangan kita bersama. Melalui peran konstruktif, para inisiator media sosial ini dapat dijadikan sebagai wahana pembelajaran menuju *learning society*. Mereka saling berpacu untuk memperoleh pengetahuan dan nilai tambah dalam segala perkembangan yang terjadi di lingkungan mereka. Jika sudah terbentuk kelompok-kelompok ini, maka media sosial kita akan menjadi medium untuk saling berkompetisi dengan positif.

Selain keberadaan kelompok inovator, media sosial juga berpotensi menjadi ruang alternatif bagi kelompok-kelompok yang selama ini tidak cukup memiliki ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman. Media sosial sangat memungkinkan tampil menjadi media alternatif. Kehadiran media alternatif akan menjadi semakin menarik di tengah kontestasi saat ini.

Paling tidak, media sosial bisa mendorong adanya keberagaman media, sehingga muncul media yang bisa saling memantau satu sama lain. Prinsip keberagaman ini bisa kita dorong melalui media sosial, sehingga bisa menjadi kontrol atas isi media *mainstream* yang mulai kehilangan kepercayaan akibat keterlihatan kepentingan ekonomi dan politik dari para pemiliknya.

Potret media kini memang tidak lepas dari patgulipat ekonomi politik media. Dalam situasi seperti itu, ruang publik akan menjadi lahan perebutan *trust* dari konsumen media. Apakah media

konvensional bisa mempertahankan atau justru akan tergantikan oleh media alternatif. Apakah jurnalisme konvensional masih bisa bertahan dalam tekanan jurnalisme warga yang beragam dan luas. Media alternatif bisa jadi akan membawa perubahan terhadap mutu informasi yang selama ini dikendalikan oleh nafsu para pemilik media dalam berpolitik. Melalui media alternatif, kita bisa menyelamatkan informasi untuk publik dari hasrat politik berlebihan dari para jurnalis partisan, sekaligus kontrol atas kualitas informasi yang cenderung memihak dan tidak berimbang.

C. Arus Bawah Melalui *Citizen Reporter*

Perkembangan internet yang cepat membawa iklim keterbukaan dalam masyarakat. Ini membuat para konsumen media bisa sekaligus bertindak menjadi produsen media. Masyarakat mulai berani menyuarakan berbagai aspirasi tanpa terhalang ketakutan berlebihan karena ancaman elite dan kelompok penekan. Masyarakat mulai dapat mengelola rasa dan karsa dalam inisiatif publik. Mereka sudah mulai berani melibatkan diri ke dalam berbagai diskusi isu-isu publik yang menyangkut kehidupan mereka bersama.

Aspirasi yang tumbuh dari bawah ini akan merepresentasikan kehendak asli warga terkait dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka butuhkan. Masyarakat kelas bawah juga memiliki kehendak untuk bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Dengan demikian, aspirasi akan nampak alami dan tumbuh dari semua pihak secara adil.

Aspirasi masyarakat kelas bawah tersebut bisa tergambar melalui berbagai ujaran yang diunggah melalui media sosial. Mereka berani untuk melaporkan dan mengabarkan apa yang terjadi di sekeliling mereka tanpa harus merasa terancam oleh kekuasaan. Kritik yang selama ini tabu sedikit demi sedikit telah berubah dalam melakukan pengawasan dan kontrol, baik terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

Jika informasi yang disampaikan oleh publik semakin konstruktif, maka hal ini akan mendorong tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berubah secara mendasar. Kini kita bisa melihat berbagai pelayanan publik telah berubah dan jauh berorientasi kepada konsumen dan publik. Berkat media social, berbagai kelambanan birokrasi yang berbelit-belit dapat dipangkas dan pelayanan publik mulai menunjukkan tren positif.

Laporan masyarakat melalui media sosial memiliki aktualitas dan kecepatan. Masyarakat dapat melaporkan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan bersama melalui media sosial. Laporan tersebut dapat segera diketahui publik dan dibagi secara berantai hingga diketahui banyak pihak, dan itu akan menjadi viral dan meluas jika terkait dengan permasalahan bersama. Selain itu, melalui media sosial, kita juga bisa melakukan tekanan untuk melakukan aksi dan perbaikan terkait berbagai masalah publik.

Melalui penggunaan internet dan media sosial, setiap informasi yang terjadi di sekitar kita bisa dengan mudah dibagi ke kawan dan masyarakat dengan cepat. Media sosial bisa mengubah tatanan politik dan sosial budaya. Ia bisa memberi tekanan dan tuntutan atas peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Kita dengan mudah mengetahui apa pun yang terjadi di sekeliling kita secara nyata dan *real time*. Warga bisa menyuarakan aspirasi dan pemikirannya secara terbuka dengan berbagai fakta yang disuguhkan.

Media sosial juga bisa dipakai untuk menggalang dukungan. Dukungan dalam konteks ini jelas yang fungsional dengan kepentingan bersama dan kebaikan hidup masyarakat. Guna memperoleh kualitas dukungan, maka masyarakat harus menggunakan potensi media sosial tidak semata-mata kepada aspek teknologi, tetapi juga pada aspek interaksi. Interaksi melalui media dan teknologi harus memberi kebaikan kepada eksistensi sebagai masyarakat yang hidup bersama.

D. Perubahan Sosial: Dari *Online* ke Aksi

Apakah akses internet dan munculnya media sosial akan membawa perubahan, dan bagaimana teknologi bisa mendorong perubahan ke arah yang lebih baik—khususnya bagi masyarakat rural di Madura? Internet jelas membawa perubahan dan inovasi dalam masyarakat. Ia bisa menjadi medium mobilisasi publik dan juga beragam aksi publik yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Internet bisa menjadi medium untuk gerakan sosial. Ia bisa menjadi kekuatan penekan yang efektif dan dikendalikan oleh kehendak bersama. Jika gerakan itu masif atas dasar kepentingan bersama, maka akan sulit diintervensi, termasuk oleh kekuatan modal dan kekuasaan sekalipun. Melalui internet, kita akan menciptakan peluang baru bagi munculnya ruang publik sebagai perwujudan jaringan dan hubungan antar warga yang kuat dan saling menguatkan.

Internet kini telah menjadi medium baru yang membebaskan warga negara dari kendali negara dan pasar. Internet juga memperluas jaringan antar pengguna dan juga munculnya peluang untuk transformasi kekuatan *public demand* saat ini, yang mendorong media menjadi institusi sosial untuk benar-benar menjalankan peran untuk kepentingan publik.

Internet jelas menghasilkan informasi yang melimpah dan harus dimanfaatkan untuk diskusi berbagai kepentingan publik. Melalui *sharing*, kepentingan bersama akan menemukan bentuk aksi yang lebih konkret dan melibatkan banyak pihak. Menarik mencermati data Nugroho (2012), apa yang dilakukan pengguna internet di Indonesia adalah mengakses situs jejaring sosial untuk berbagi. Melalui itu, berbagai isu-isu sosial yang selama ini kurang mendapat perhatian akan dapat naik ke permukaan dan menjadi perhatian bersama untuk diwujudkan ke dalam berbagai program aksi riil.

Masyarakat Madura selama ini dikenal memiliki sikap lugas, tegas, dan berwatak keras. Namun, posisi mereka sangat dependen,

khususnya kepada tokoh agama dan pemimpin lokal. Apalagi masyarakat Madura sebagian besar adalah *Nahdliyin*, yang menganut aliran *Ahlisunnah* dalam jamaah Nahdlatul Ulama. Sehingga tawadu dan taat kepada pemimpin (kiai) itu dilakukan tanpa *reserve*. Titah kiai lebih ditaati daripada pemimpin formal. “*Mon tak norok perintane kiai cangkolang*,” kalau tidak ikut perintah kiai dianggap lancang. Ini masih dipegang teguh sebagian masyarakat, khususnya kelas bawah (Surokim, 2015). Fenomena ini membuat akses terhadap informasi kadang masih harus dikonfirmasi kepada para kiai dan tokoh masyarakat. Perubahan melalui internet ini masih membutuhkan waktu adaptasi, sehingga ruang publik masyarakat Madura bisa bergerak menuju independen.

Perubahan sosial di Madura, kendati pelan, tetapi suatu saat akan menuju situasi yang lebih baik dalam adaptasi perkembangan teknologi informasi. Perubahan ini dimotori oleh kalangan muda, khususnya kelas menengah. Kelas ini jumlahnya masih minim dan belum solid, sehingga belum bisa memainkan peran strategis dalam penguatan peran politik. Kelas menengah Madura belum mampu mengisi ruang media *mainstream* dan menjadi kekuatan penyeimbang dan kontrol yang efektif terhadap kelompok elite penguasa di Madura. Kelas menengah yang ada saat ini masih perlu didorong untuk menjadi independen dan tidak ambivalen. Masih diperlukan waktu untuk mendorong kelas menengah Madura agar mampu membuat isu-isu kelas menengah dan bawah masuk dalam agenda media *mainstream* di Madura (Surokim, 2016).

Seiring dengan meningkatnya peran media sosial, maka kelas menengah Madura harus bisa memanfaatkan media sosial sebagai ruang alternatif. Terbukti, media *mainstream* konvensional gagal menyediakan ruang publik, sehingga berbagai kepentingan publik tumpah ruah ke media sosial. Akhirnya mendorong tumbuhnya reportase warga dan menjadi cikal bakal jurnalisme warga. Media sosial bisa berpotensi menjadi media *watch* sebagai pengawas media *mainstream*. Publik juga harus memanfaatkan informasi dalam

ruang media sosial untuk ditindaklanjuti dalam aksi yang riil, yang berguna bagi perbaikan kehidupan masyarakat.

E. Penutup

Masa depan media komunikasi sebenarnya sudah terlihat jelas saat ini dan tidak lagi samar-samar berada di depan kita. Kini kita tengah memasuki masa di mana informasi tersambung luas melalui internet dan *online*. Tidak terasa kita sudah terlibat serta dalam era sebagai keluarga besar netizen. Era konvergensi dan digitalisasi sudah berada di tengah-tengah kita. Perkembangan itu telah membuka lanskap baru dengan membuka ruang publik yang sebelumnya tidak diakomodasi dalam media konvensional. Di sisi lain, proses adaptasi industri ternyata berjalan lebih cepat dari daya kritis publik. Akhirnya perkembangan media baru itu juga dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki surplus informasi dan menjadikannya sebagai komoditas layaknya industri.

Dalam perkembangan teknologi selama ini, terbukti bahwa daya adaptasi industrinya lebih cepat ketimbang warga. Akibatnya, industri mampu memperoleh manfaat besar atas perubahan ICT itu dan menjadikan mereka memiliki surplus modal untuk memastikan bisnis media tetap eksis dan berkelanjutan. Hal ini sebenarnya menjadi pangkal atas kebijakan media di mana pun. Jika kuasa industri ini tidak kita hadang, termasuk di dalamnya melalui seperangkat regulasi pro publik, maka akan berakibat buruk terhadap kualitas demokrasi media kita. Logika bisnis jelas akan berhadapan dengan kepentingan publik. Pemirsa dan konsumen media hanya akan ditempatkan dalam posisinya sebagai konsumen dan bukan sebagai warga yang memiliki hak dan independen.

Madura sebagai kawasan yang relatif tertutup dan *slow response* dengan kehadiran media internet juga tengah mengalami perubahan signifikan. Munculnya kekuatan-kekuatan arus bawah dalam menuntut transparansi dan perbaikan tata kelola urusan publik membuat suara arus bawah mulai terkonsolidasi dan membuat

aspirasi publik kian manifes. Namun, tantangan menuju demokrasi, dalam konteks perkembangan media itu juga tidak mudah. Jalan akan nampak terjal dan jika tidak hati-hati, maka potensial akan bisa terjadi ledakan-ledakan yang mengagetkan.

Daftar Pustaka

- Nugroho, Yanuar, dkk (2012). *Melampaui Aktivitas Click? Media Baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer*, Friedrich Ebert Stiftung, Kantor Perwakilan Indonesia: Jakarta.
- Nugroho, Yanuar., dkk (2012). *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia* (Edisi bahasa Indonesia). *Laporan Bermedai, Memberdayakan Masyarakat: Memahami Kebijakan dan Tata Kelola Media di Indonesia melalui Kacamata Hak Warga Negara*, riset kerja sama antara CIPG dan HIVOS, Kantor Regional Asia Tenggara, Jakarta: CIPG dan HIVOS.
- Surokim, (2015). *MADURA: Masyarakat, Budaya, Media, dan Politik*. (Surokim, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Elmatara. Retrieved from <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-MADURA-1.pdf>
- Surokim, (2016). *Media Lokal: Kontestasi, Tren, Dinamika, dan Suara Arus Bawah Madura*. (Surokim, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Elmatara. Retrieved from <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-MEDIA-MADURA-21.pdf>.

KELAS MENENGAH DAN AGENDA KONSOLIDASI DEMOKRASI

- Mohammad Afifudin -

JAMU MADURA: MELESTARIKAN BUDAYA MELALUI PEMBERDAYAAN PSIKOLOGI

Netty Herawati

A. Pendahuluan

Siapa yang tak mengenal jamu Madura? Hampir di seluruh pelosok negeri ini mengetahui bahwa jamu Madura memiliki khasiat yang khusus dan berbeda dengan jamu-jamu yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya sekadar untuk meningkatkan kesehatan secara umum, namun juga bermanfaat untuk hal lain, baik secara kuratif maupun preventif. Secara kuratif, jamu Madura dapat digunakan untuk memperoleh kesehatan kembali dan memulihkan kondisi tubuh yang baru sembuh dari sakit. Secara preventif, jamu Madura dapat dimanfaatkan untuk mencegah penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, dan untuk kebahagiaan pasangan suami istri.

Manfaat jamu Madura untuk meningkatkan kebahagiaan suami istri inilah yang paling terkenal dan mendapat tempat di hati masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Faroqi (2018), bahwa kepercayaan masyarakat pada jamu Madura “Sehat Lelaki” meningkatkan intensitas perilaku seksual pada pasangan suami istri. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat terbukti percaya terhadap khasiat jamu Madura dan kepercayaan tersebut bermanfaat untuk memperbaiki hubungan suami istri dengan meningkatnya intensitas dalam perilaku seksualnya. Munculnya kepercayaan dari masyarakat ini karena proses yang panjang dalam sejarah.

Setiap keluarga Madura zaman dulu membiasakan diri meminum jamu, baik yang dilakukan setiap hari atau pun setiap pekan. Sejak anak-anak mereka masih kecil, telah diajarkan khasiat jamu dan dibiasakan untuk meminum jamu Madura, bahkan sejak mulai bayi baru lahir pun dikenalkan dengan rasa jamu yang dibuat dari madu dan *ro'moro*. Nenek moyang orang Madura mengajarkan resep-resep ramuan jamu kepada anak cucunya sejak mereka masih kanak-kanak, mengajak mereka melihat dan mengamati proses pembuatannya, dan mengenalkan berbagai jenis rempah sebagai bahan dasarnya. Mulai dari proses membuat sampai dengan rutinitas minum jamu sudah menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya.

Sebagaimana Mudjijono, dkk (2014) kemukakan, bahwa jamu atau obat tradisional yang menggunakan bahan-bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan baik berupa daun, batang, biji, buah, maupun akar yang berkhasiat sudah biasa diminum masyarakat Madura secara turun temurun. Pengetahuan tentang penggunaan bahan-bahan alami tersebut merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Masyarakat Madura sebagian besar masih mempertahankan kearifan lokal, di antaranya tentang pengobatan alternatif dengan minum jamu ramuan Madura. Hal ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan

meminum jamu, baik yang dijual di toko/kios maupun minum jamu *gendhong*, terutama kaum perempuan.

Budaya meminum jamu ini pada masa sekarang meskipun masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, namun jarang ada yang mengolahnya sendiri. Berdasarkan survey dari 10 responden pembuat jamu di empat kabupaten di Madura, meminum jamu tidak lagi dijadikan sebagai rutinitas untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi mereka meminum jamu hanya pada saat membutuhkan saja. Hanya sebagian kecil saja yang masih meminum jamu sebagai upaya preventif menjaga kesehatan. Jamu yang masih banyak peminat hingga saat ini umumnya jamu untuk perempuan dan untuk kebahagiaan pasangan suami istri.

Apalagi generasi milenial Madura jaman sekarang maunya serba instan, tidak ayal keluarga muda sudah merasa repot untuk mengolah jamu sendiri dan memilih lebih praktis dengan membeli jamu di toko. Di samping kemudahan dalam penyajian, jamu yang dijual di toko lebih lengkap dengan berbagai variasi dan manfaat. Hal-hal yang bersifat instan menjadi lebih menarik daripada mengikuti prosesnya yang panjang. Akhirnya secara perlahan, orang tua yang mengajarkan bagaimana cara membuat jamu juga sudah mulai berkurang, hanya sebagian kecil saja yang masih menurunkan resep-resep pembuatan jamu kepada keturunan mereka. Tidak menutup kemungkinan, lama kelamaan akhirnya orang Madura yang memahami resep pengolahan jamu Madura berkurang.

Tentu hal ini tidak diharapkan terjadi. Karena kepercayaan masyarakat terhadap jamu Madura ini mestinya akan meningkatkan konsumsi terhadap jamu Madura. Sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman atas proses pengolahannya. Namun dalam realitanya, semakin sedikit orang yang memahami resep jamu dan mampu mengolah jamu Madura. Kepercayaan masyarakat sesungguhnya dapat menjadi dasar untuk membangkitkan kembali gairah menghidupkan budaya jamu Madura itu.

Kembali pada soal sejarah jamu Madura. Jamu Madura awal mulanya berkembang sejak zaman kerajaan di Madura. Di Madura, ada tiga kerajaan besar yang pernah berdiri, namun dalam perjalanannya tidak pernah memiliki otoritas politik karena selalu berada di bawah hegemoni kerajaan lain. Walaupun demikian, sejarah jamu muncul untuk pertama kali ketika Kerajaan Madura berada di bawah hegemoni Kerajaan Mataram, sekitar tahun 1600-an. Sedikit sejarah soal munculnya jamu cukup untuk menghantarkan kita memahami mengapa jamu Madura sampai saat ini tidak berkembang sebesar jamu lain di luar Madura. Selanjutnya, tulisan dalam buku ini akan fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan perasaan hegemoni yang ternyata secara tidak disadari berimbas kepada sikap dan perilaku kita dari generasi ke generasi. Pembahasan kita selanjutnya difokuskan pada pemberdayaan psikologi.

B. Pemberdayaan Psikologi

Pemberdayaan psikologi menjadi *urgent* untuk dilakukan, agar dapat meningkatkan motivasi pengembangan jamu dan upaya pelestarian jamu Madura. Jenkins (1996) mengemukakan arti penting dari suatu pemberdayaan, yaitu membuat orang bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan. Lebih lanjut, Spreitzer (1996) mendeskripsikan pemberdayaan psikologi sebagai cara orang memandang diri mereka sendiri di dalam lingkungan kerja dan tingkat sejauh mana orang merasa mampu membentuk peran kerja. Walaupun Spreitzer berpandangan bahwa pemberdayaan psikologi biasanya digunakan dalam lingkungan kerja, namun pemaknaan pemberdayaan itu sendiri tidak membatasi ruang dan tempat. Itu lebih menunjukkan pada bagaimana seseorang yang awalnya belum memahami, belum bisa melakukan, belum menyadari atau pun belum yakin dengan kemampuannya, kemudian menjadi berdaya, mampu melakukan,

lebih yakin dengan kemampuannya, bahkan kemanfaatannya bagi orang lain menjadi penting.

Pada mulanya, Thomas dan Velthouse (1990) serta Spreitzer (1995) menyampaikan bahwa pemberdayaan psikologi dipahami sebagai sebuah konstruk multi-dimensional yang terdiri atas empat indikator: kebermaknaan, kompetensi, penentuan sendiri, dan dampak. Jika keempat indikator tersebut tergabung, maka akan membentuk keseluruhan konstruk pemberdayaan psikologis. Dengan kata lain, jika salah satu indikator tidak ada, maka tingkat pemberdayaan psikologis yang diperoleh juga tidak optimal. Penyampaian itu menjelaskan bahwa pemberdayaan psikologis adalah sebuah konstruk motivasi yang diwujudkan dalam empat indikator, yang secara bersama-sama mencerminkan orientasi aktif. Orientasi aktif berarti orientasi di mana seorang individu ingin dan merasa mampu membentuk karyanya sendiri dalam perannya di dalam pekerjaannya. Sedangkan Sadarusman (2004) memaknai pemberdayaan sebagai pemberian otonomi, wewenang, kepercayaan, dan mendorong individu dalam suatu organisasi untuk mengembangkan peraturan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan.

Pemberdayaan psikologis, menurut Spreitzer (1995) terbagi dalam empat perspektif: a) *meaning* (kebermaknaan), b) *competence* (kemampuan), c) *self-determination* (determinasi diri), dan d) *impact* (akibat/dampak). Pada sub-sub selanjutnya, kita akan membahas satu per satu apa yang dimaksud oleh Spreitzer itu.

1. *Meaning*

Meaning dapat berarti sebagai pemahaman soal sejauh mana kita mampu memaknai kehidupan kita. Hal ini dalam istilah psikologi sering disebut makna hidup (*meaning in life*). *Meaning* adalah konsep yang penting untuk memahami bagaimana seseorang mengatasi tantangan kehidupan dan memaksimalkan potensi

uniknya. Konsep *meaning* ini diperkenalkan oleh Viktor Frankl, dalam bukunya *Man's Search for Meaning*, terbit tahun 1985.

Meaning merupakan konsep yang luas dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Frankl (1985) merumuskan bahwa secara mendasar, setiap situasi kehidupan atau kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang memiliki makna dan manusia perlu menemukan makna tersebut, karena makna adalah pencarian dan penemuan eksistensial seseorang. Pendapat Frankl (1985) dan Maddi (1978) menjelaskan eksistensial neurosis sebagai suatu kejenuhan, kondisi tanpa makna, apatis, dan tanpa tujuan. Maddi (1978) selanjutnya menekankan bahwa pencarian makna adalah dasar bagi motivasi manusia.

Dari sudut pandang psikologi individual, Alfred Adler berupaya memahami manusia secara utuh, tidak terpisah dari konteks yang melatarbelakanginya, yaitu lingkungan sosial. Menurut Adler, manusia adalah makhluk sosial. Adanya kesadaran sosial berkaitan dengan bagaimana menjadikan hidup berguna bagi orang lain, dan segala bentuk sakit jiwa muncul karena tidak adanya kesadaran sosial. Psikologi individual dalam teori Adler berkaitan dengan pencarian makna hidup seseorang dalam konteks sosialnya. Lebih lanjut, Adler mengemukakan bahwa manusia memiliki tiga tugas utama di dunia, yaitu a) melanjutkan hidup dan menolong masa depan manusia, b) hidup sebagai makhluk sosial, dan c) hubungan dengan lawan jenis (Auhagen, 2000). Dengan tugas ini, maka makna hidup akan berhubungan perasaan sosial atau komunitas dibandingkan perasaan egois seseorang. Makna hidup dalam kajian teori Adler terbentuk dari upaya menemukan solusi dari permasalahan sosial yang dihadapi.

Ditinjau dari pendekatan teori kebutuhan (*need theory*) Abraham Maslow, yang kemudian dikembangkan oleh Roy Baumeister, jelas terdapat kaitan antara teori kebutuhan dan makna hidup. Teori Maslow menyebutkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk memuaskan kebutuhan berdasarkan

prioritas. Saat kebutuhan fisiologis yang mendasar (misalnya makan dan minum) dipenuhi, maka manusia menjadi cenderung untuk berusaha memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi, termasuk kebutuhan yang transenden.

Baumeister (1991) merumuskan kebutuhan untuk makna (*the need for meaning*) merupakan motivasi untuk memahami sesuatu hal dalam kehidupan. Secara garis besar, manusia memiliki empat jenis kebutuhan yang berbeda untuk mendapatkan arti atau makna hidup, antara lain: a) *need for purpose* (kebutuhan untuk tujuan), yaitu keinginan untuk menghubungkan antara kejadian masa kini dan masa datang, b) *need for value* (kebutuhan akan nilai), yaitu keinginan bahwa tindakan kita memiliki nilai positif, c) *need efficacy* (keinginan untuk mempengaruhi lingkungan), dan d) *need for self worth* (kebutuhan untuk merasa berharga), yaitu keinginan bahwa diri kita memiliki nilai positif.

Berdasarkan kajian konsep *meaning* di atas, secara garis besar terkait bagaimana seseorang merasa memenuhi atau mencapai sesuatu dalam kehidupan. Kembali pada konsep yang dirumuskan Frankl (1963), yang menyatakan bahwa karakteristik manusia adalah *will to meaning* atau keinginan untuk memaknai, yang merupakan dorongan bawaan untuk mencapai dan menemukan makna. Dalam konteks tulisan ini, *meaning* pada produsen jamu merupakan salah satu upaya untuk membantu mereka menemukan, merasakan pencapaian dalam kehidupan sebagai produsen jamu.

2. *Competence*

Competence atau kompetensi merujuk kepada kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kompetensi berbicara tentang kemampuan, keterampilan, kecakapan, dan lain-lain. Wyatt (dalam Fuad dan Ahmad, 2009) mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan kerja

yang didukung oleh pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Chatab (2007) yang menyebutkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai faktor utama yang menggerakkan perilaku individu untuk mencapai kinerja tertentu. Hager dan Gonczi (1996) menyimpulkan konsep kompetensi sebagai hubungan antara kemampuan seseorang dan penyelesaian tugas yang sesuai dengan memuaskan. Oleh karena itu, pendekatan terintegrasi terhadap standar kompetensi mengintegrasikan atribut dengan tugas-tugas utama, sehingga penilaian kompetensi mengacu pada penilaian capaian kinerja.

Menurut Robbin (2007), pengertian kompetensi adalah suatu kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik. Looy, et al. (1998) mengemukakan arti kompetensi sebagai suatu karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa yang dapat dilihat dari perilaku, cara berpikir, dan gaya bertindak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi kerja diartikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kompetensi individu memiliki peranan yang sangat penting dalam efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan atau profesinya. Jhonson (dalam Sanjaya, 2005) mengemukakan, kompetensi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Personal competency*, yaitu kemampuan individu dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan kepribadian seseorang.
- b. *Profesional competency*, yaitu kemampuan individu dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas tertentu dalam pekerjaan.

- c. *Social competency*, yaitu kemampuan individu dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dan kepentingan sosial.

Spencer dan Matthew (dalam Dharma, 2003) mengemukakan, kompetensi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Kompetensi dasar (*threshold competency*), yaitu karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan tugas-tugas dalam pekerjaannya. Misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain.
- b. Kompetensi pembeda (*differentiating competency*), yaitu berbagai faktor yang membedakan individu yang kinerjanya tinggi dengan individu yang kinerjanya rendah.

Kompetensi pada produsen jamu dapat dikelompokkan ke jenis kompetensi menurut pendapat Spencer dan Matthew, yakni kompetensi dasar yang berkaitan dengan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pekerjaan, dalam hal ini adalah pengolahan jamu, mulai dari mengomposisikan ramuan herbal, mengolah, mengemas, dan memasarkan. Di samping itu, pada produsen jamu juga terdapat kompetensi pembeda, yakni kompetensi yang membedakan antara produsen jamu satu dengan yang lain, terutama dalam kemampuannya meramu jamu Madura, menciptakan varian baru, membuka peluang pasar dalam pengelolaan, dan lain-lain. Kompetensi pembeda juga menyangkut inovasi dalam pengolahan jamu, termasuk pengemasan dan pemasarannya.

3. *Self Determination*

Self-determination theory (teori determinasi diri) merupakan salah satu teori motivasi kontemporer yang dikemukakan Edward L. Deci dan Richard Ryan. Teori ini menitikberatkan pada pentingnya motivasi intrinsik pada individu dibanding motivasi ekstrinsik. Menurut Ryan dan Deci (2017), teori determinasi diri adalah teori tentang motivasi manusia yang dikaitkan dengan perkembangan dan fungsi kepribadian dalam konteks sosial. Teori ini menekankan

pada keteguhan hati dan kebulatan tekad individu untuk mencapai tujuan. Determinasi adalah sikap mental yang ditandai dengan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun terdapat hambatan dan kesulitan. Suatu proses dalam pembuatan keputusan, mencapai kesimpulan, atau memastikan hasil akhir dari setiap proses (Vandenbos, 2008).

Self determination berarti penguasaan diri sendiri atau kontrol diri, berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan, dan kemampuan memimpin diri sendiri untuk menggapai tujuan hidup pribadi yang bernilai. *Self determination* adalah perasaan individu yang berkaitan dengan pilihan dalam mengawasi dan mengatur tindakan (Deci et al., 1989). Spreitzer (1995) mengemukakan bahwa *self determination* merepresentasikan tingkatan di mana seseorang merasakan tanggung jawab, perasaan memiliki pilihan dalam memulai dan mengatur perilaku. Dapat pula dikatakan sebagai penentuan nasib sendiri, dalam arti otonomi yang dirasakan produsen pada pekerjaannya, di mana produsen yang berdaya merasa bahwa mereka mempunyai kebebasan, kemandirian, dan keleluasaan pada aktivitas kerja mereka. Teori penentuan nasib sendiri adalah teori makro tentang motivasi dan kepribadian manusia, menyangkut kecenderungan pertumbuhan inheren orang dan kebutuhan psikologis bawaan. Ini berkaitan dengan motivasi di balik pilihan yang dibuat orang tanpa pengaruh dan campur tangan eksternal.

Pada produsen jamu Madura, determinasi diri sangat diperlukan dalam melestarikan warisan budaya dan mengembangkan akses pasar jamu. Determinasi diri dapat terukur melalui bagaimana tanggung jawab mereka terkait produksi jamu Madura; bagaimana mereka harus mengambil keputusan di tengah persaingan yang ketat; dan bagaimana mereka menentukan aktivitas kerjanya agar dapat mencapai tujuan dalam mempertahankan kelestarian budaya, mengembangkan akses pasar jamu Madura dan

menjaga nilai-nilai kearifan lokal dari jamu Madura yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

4. *Impact*

Impact atau dampak dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang dapat mempengaruhi hasil yang strategis, administratif, atau pun operasional pada pekerjaan yang dapat memberikan perbedaan. Karyawan yang telah diberdayakan melihat diri mereka sendiri sebagai partisipan yang aktif dalam organisasi. Keputusan dan tindakan mereka mempunyai pengaruh. Intinya adalah karyawan merasa pekerjaan mereka memberikan dampak kepada organisasi (Spreitzer, 1995).

Sebagai seorang produsen jamu Madura, *impact* dapat terukur melalui sejauh mana keterlibatan mereka secara aktif dalam menyelesaikan pekerjaan membuat jamu Madura; bagaimana pengaruh mereka dalam mengambil keputusan terkait proses pengolahan jamu; dan tindakan apa yang harus dilakukan selama proses pengolahan atau ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan jamu secara luas.

Daftar Pustaka:

- Agus Dharma, 2003. *Manajemen Supervisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Auhagen, A. E. 2000. On the Psychology of Meaning of Life. *Swiss Journal of Psychology/Schweizerische Zeitschrift für Psychologie/Revue Suisse de Psychologie*, 59(1), 34-48. <https://doi.org/10.1024/1421-0185.59.1.34>.
- Chatab, Nevizond, 2007. *Profil Budaya Organisasi: Mendiagnosis Budaya dan Merangsang Perubahannya*. Bandung: Alfabeta.
- Deci, E. L., Connell, J. P., & Ryan, R. M. (1989). Self-determination in a Work Organization. *Journal of Applied Psychology*, 74(4), 580-590. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.74.4.580>.

- Dixon TM, Baumeister RF., 1991. Escaping the Self: The Moderating Effect of Self-Complexity. *Personality and Social Psychology Bulletin*. 1991;17(4):363-368. doi: 10.1177/0146167291174002.
- Faroqi, Hidayatul, 2018. *Pengaruh Kepercayaan pada Jamu Madura "Sehat Lelaki" terhadap Intensitas Perilaku Seksual Suami dalam Berumah Tangga di Kabupaten Bangkalan*. Skripsi. Prodi Psikologi-UTM.
- Frankl, V. E., 1963. *Man's Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy*. New York: Washington Square Press.
- Fuad, Noor dan Gofur Ahmad, 2009. *Integrated Human Resources Development*. Jakarta: Grasindo.
- Hager, Paul & Gonczy, Andrew, 2009. What is Competence? *Medical Teacher*. 18. 15-18. 10.3109/01421599609040255.
- Jenkins, R., 1996. *Social Identity*. London: Routledge Legault.
- Lisa, 2017. *Self-Determination Theory*. 10.1007/978-3-319-28099-8_1162-1.
- Looy, Bart & Gemmel, P. & Desmet, Steven & Dierdonck, Roland & Serneels, Steven, 1998. *Dealing with Productivity and Quality Indicators in a Service Environment: Some Field Experiences*. Katholieke Universiteit Leuven, Open Access publications from Katholieke Universiteit Leuven. 9.10.1108/09564239810228867.
- Mudjijono, dkk., 2014. *Kearifan Lokal Orang Madura tentang Jamu untuk Kesehatan Ibu dan Anak*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P., 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Ryan, R. M. et Deci, E. L., 2017. *Self-Determination Theory*. Basic Psychological Needs in Motivation, Development and Wellness. New York, NY: Guilford Press.

- Ryan, R. M., & Deci, E. L., 2017. *Self-determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. The Guilford Press. <https://doi.org/10.1521/978.14625/28806>.
- Sadariusman, Eka, 2004. Pemberdayaan: Sebuah Usaha Memotivasi Karyawan. *Fokus Ekonomi*, Vol. 3, No. 2.
- Spreitzer, G. M., 1995. Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation. *Academy of Management Journal*, 38(5), 1442–1465. <https://doi.org/10.2307/256865>.
- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Vandenbos, 2008. *Study of Self Determination in General*. American: Publics Onways.
- Wina Sanjaya, 2005. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

URGENSI PENGEMBANGAN MEDIA LOKAL WARGA SEBAGAI MEDIUM ALTERNATIF PENGUATAN SUARA ARUS BAWAH MADURA

- Surokim -

A. Pendahuluan

Pembangunan Madura hingga kini masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya data indeks pembangunan Madura yang masih rendah (merah, peny.) jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Fenomena ini membuat Madura memerlukan banyak skema jalan dan solusi untuk bisa keluar dari berbagai problematika yang melingkupinya. Betapapun, Madura memiliki potensi untuk bisa berkembang dan dapat dioptimalkan lebih baik lagi. Salah satu poin untuk bisa membuka ruang pengembangan itu adalah dengan meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Harus diakui, hingga saat ini akses dan partisipasi masyarakat bawah Madura masih minimalis. Masyarakat kelas bawah belum benar-benar bisa merayakan ruang kebebasan secara hakiki. Namun, riak-riak suara arus bawah melalui media baru menjadi harapan bangkitnya kekuatan aspirasi masyarakat kelas bawah

dalam menyuarkan aspirasinya. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat rural pedesaan Madura masih berada dalam situasi yang ikut arus (bahasa Jawa: *anut grubyuk*, bahasa Madura: *atorok, norok buntet*, peny.), patuh dan kadang 'terkekang' oleh kuasa kepentingan dan kehendak elite lokal. Sehingga membuat redup inisiatif untuk berpartisipasi dalam diskursus dan agenda publik di media lokal.

Media lokal bagi warga Madura tidak sekadar persoalan teknis dan kepemilikan semata, tetapi sebagai bagian dari aktualisasi dan eksistensi warga, sekaligus modal sosial dan modal simbolik. Modal itu diyakini dapat menumbuhkan harapan dan keyakinan warga Madura untuk berdiri kukuh di atas prakarsa, inisiatif, dan kemampuan mereka sendiri dalam mengaktualisasi beragam kemampuan dan mengkomunikasi gagasan membangun masyarakat lokal. Namun, eksekusi hal ini kadangkala melahirkan respons berbeda dari pihak-pihak tertentu berkaitan dengan relasi kuasa di masyarakat.

Media lokal tentu saja diharapkan dapat menjadi ruang publik (*publik sphere*) demokratis yang menumbuhkan kesadaran mandiri dan memungkinkan mereka berinisiatif dan tumbuh atas kemampuan yang dimiliki. Pada tahap awal, langkahnya dapat dimulai dengan membuka akses informasi melalui media komunitas dan jurnalisme warga. Sebagaimana dicatat Surokim (2016), keterbukaan informasi dan akses media di tingkat lokal juga menghadapi beragam problem baik aspek kultural, politis, maupun struktural, hingga membuat masyarakat kerap hanya sekadar menjadi obyek media. Perbedaan (*gap*) yang tinggi antar kelas juga membuat suara arus bawah kerap tidak terekam oleh media arus utama, dan media lebih banyak menjadi aparatus birokrasi dan kelompok elite lokal yang berkuasa. Suara arus bawah menjadi samar-samar (absurd) dan terhegemoni kelompok elite yang terus melanggengkan kuasa dan legitimasi. Situasi itu, tambah Surokim

(2016), kian melenyapkan suara arus bawah masyarakat Madura. Suara arus bawah kerap kali nyaris tak terdengar.

Keberadaan media lokal yang diharapkan bisa menjadi jalan alternatif dan *sounding* kepentingan warga pelan dan pasti harus menghadapi kenyataan ganasnya kuasa modal dan politik. Media lokal terpaksa harus tiarap dan tunduk kepada kehendak pasar, kepada siapa yang berani membayar, dan kepada siapa yang punya akses kuasa ekonomi politik. Akibatnya isi media lokal lebih banyak menyuarakan aspirasi elite dan kepentingan penguasa lokal. Namun, situasi ini tentu harus dihadapi dengan semangat dan optimisme bahwa masih ada jalan untuk mengembangkan media-media lokal baru, sehingga suara arus bawah semakin banyak muncul di permukaan dan mendapat tempat dalam media arus utama.

Melalui penguatan arus media alternatif, isu-isu tentang kemajuan Madura harus terus di-*noise*-kan, sehingga media arus utama bisa memberi perhatian. Media arus utama diharapkan dapat memainkan peran sebagai ruang publik yang fungsional bagi pemberdayaan masyarakat kelas bawah, sehingga berbagai isu menyangkut hajat hidup masyarakat kelas bawah, juga suara dan aspirasi mereka, tetap mampu masuk dan tampil di media arus utama. Media akhirnya dapat menjadi ruang publik (*public sphere*) demokratis yang menumbuhkan kesadaran mandiri dan memungkinkan mereka berinisiatif dan tumbuh atas kemampuan yang dimiliki.

Media warga ini akan memberi kontribusi bagi demokratisasi media di tingkat lokal dan menjadi lahan persemaian demokrasi di tingkat lokal. Penguatan media literasi warga juga penting, sehingga mereka dapat menjadi konsumen media yang cerdas dan akan menjadi penopang isi media yang sehat dan fungsional bagi pembentuk peradaban publik yang humanis.

Media lokal sejauh ini masih bisa diharapkan menjadi lentera di tengah himpitan dan problematika yang melingkupinya. Masih

ada catatan positif yang ditorehkan dan diungkap. Bagaimana media lokal menjadi penyebar informasi dan membangkitkan solidaritas publik di level bawah. Media mampu menjadi daya buka informasi dan penguat solidaritas sosial. Selain itu, media juga mampu membuka akses bagi warga di tingkat lokal. Media lokal dan suara arus bawah memiliki harapan seiring dengan tumbuhnya media baru berbasis internet media sosial. Suara arus bawah melalui berbagai media sosial tidak perlu lagi eksistensi, karena mereka punya kekuatan untuk mengisi ruang media *mainstream*.

Suara arus bawah Madura sebenarnya sudah mulai tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Riak-riak perlawanan dalam diam (*laten*) kini sudah mulai terekspresikan dalam beragam bentuk yang manifes. Apalagi sebenarnya masyarakat Madura itu tipikal masyarakat yang lugas, apa adanya, dan tidak basa basi (*low context culture*), sehingga lebih ekspresif jika menyampaikan gagasan, kehendak, dan aspirasinya. Ekspresi arus bawah Madura sejauh ini masih dalam batas-batas positif dan tidak konfliktual sebagai bentuk menyuarakan aspirasi mereka yang terpendam selama ini. Kanal-kanal politik juga mulai terbuka sebagai ruang untuk melibatkan mereka dalam rembuk masalah bersama. Memang, peran tokoh patron masih dominan untuk menjaga harmonisasi, tetapi peran dan keterlibatan masyarakat sudah mulai dibuka seiring dengan keterbukaan politik yang menjangkau wilayah pedesaan.

Kesadaran masyarakat terhadap informasi harus diikuti dengan kepemilikan media. Masyarakat lokal yang memiliki modal sosial dan kultural harus menjadi subyek dan memiliki swadaya atas informasi di tingkat lokal. Masyarakat melalui media lokal harus menjadi *well informed*. Kepemilikan media lokal diyakini akan membuka atmosfer keterbukaan ruang publik pedesaan.

Media massa merupakan salah satu bentuk kebutuhan bagi aktualisasi diri masyarakat. Dalam konteks masyarakat desa yang terisolasi, media akan dapat menjadi salah satu bentuk katalisator

bagi masyarakat untuk memahami diri dan lingkungannya. Media telah menjadi pusat budaya masyarakat. Ruang media adalah ruang di mana pesan-pesan budaya ditransaksikan. Ruang itu menjadi ruang ekpresi kebebasan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan suara mereka.

Fenomena demokratisasi komunikasi dan media di tingkat lokal, termasuk di Madura, sebagaimana dicatat Surokim (2016) sungguh menarik dicermati. Karena cita-cita demokrasi yang mengasumsikan demokrasi komunikasi dan media akan mendorong situasi menjadi lebih baik, namun ternyata harus berhadapan dengan problematika khas di daerah, bahkan kadang-kadang menjadi paradoks. Hal ini tidak saja potensial menjadi masalah, tetapi juga *urgent* dan penting untuk menghadirkan solusi dan jalan keluar untuk mengatasi dan mengembangkan media lokal yang telah susah payah dibangun.

B. Kekuatan Elite dan Patron Madura Masih Dominan

Budaya masyarakat yang religius, di mana patron tokoh agama begitu kuat, membuat dinamika masyarakat menjadi dependen, fanatik, dan amat tergantung pada tokoh agama dan pemimpin lokal. Apalagi masyarakat Madura sebagian besar adalah *Nahdliyin*, menganut *Ahlisunnah* dalam jamaah Nahdlatul Ulama, sehingga tawadu dan taat kepada pemimpin (kiai) itu dilakukan tanpa *reserve*. Titah kiai lebih ditaati daripada pemimpin formal. “*Mon tak norok perintane kiai cangkolang*”, kalau tidak ikut perintah kiai dianggap lancang. Anggapan ini masih dipegang teguh sebagian masyarakat, khususnya kelas bawah.

Masyarakat Madura juga memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Solidaritas, empati, kesetiakawanan, religiusitas, pekerja keras, keuletan, dan ketangguhan adalah etos Madura. Bahkan solidaritas warga Madura sangat kental baik di Madura maupun perantauan yang menjadi basis pengikat sosial mereka. Solidaritas ini membuat jejaring masyarakat Madura di berbagai tempat selalu eksis.

Madura, sebagaimana etnis yang lain di Indonesia adalah masyarakat religius yang memegang budaya Islam tradisional yang kental. Hampir sama dengan kelompok masyarakat Muslim tradisional lain di Nusantara, konstruksi budaya lebih banyak dikembangkan melalui nilai-nilai Islam dengan basis kepatuhan kepada orang tua, kiai, guru, serta penghargaan terhadap adat dan budaya lokal. Kekeberatan ini sungguh khas dan dalam konteks tertentu, kepatuhan itu bisa menjadi perekat dan resolusi konflik yang efektif.

Sebagai *opinion leader*, kiai memegang peranan kuat dalam politik. Tidak heran, kiai menjadi penentu keberhasilan seseorang untuk bisa dicalonkan dan memenangkan kontestasi politik. Kiai juga menjadi rujukan dan tempat bertanya bagi masyarakat untuk menentukan dukungan politik. Seiring dengan meningkatnya pendidikan formal di Madura, struktur masyarakat mulai berubah. Kalangan terpelajar, khususnya mahasiswa, mulai berani berhadapan dengan elite dan turut menyuarakan aspirasi masyarakat kelas bawah untuk menuntut berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan kepentingan masyarakat. Di samping itu, mereka juga mulai kritis ke bawah. Mereka juga menjadi barisan terdepan yang berani mengkritisi adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Kalangan mahasiswa mulai kritis terhadap adat perijodohan dan pertunangan dini yang berlaku di hampir sebagian desa rural-periferi. Kondisi ini berlangsung hingga kini, sehingga keberadaan perguruan tinggi menjadi salah satu tonggak kebangkitan perlawanan kelas menengah di Madura.

Kepatuhan terhadap para kiai dan elite pemerintah daerah membuat peran masyarakat bawah dan menengah dalam politik relatif dependen. Mereka sering memasrahkan keputusan politik kepada para pemimpinnya. Takzim politik dianggap sebagai bagian dari mendapat berkah dan *barokah*. Independensi dalam politik, khususnya kalangan bawah sulit diwujudkan. Tak pelak, mekanisme pemilu langsung di Madura seringkali menjadi ajang

mobilisasi dan peneguhan atas kehendak elite dalam legitimasi tokoh agama.

Masyarakat Madura hingga kini adalah entitas masyarakat yang taat mengamalkan nilai-nilai dan ajaran keagamaan Islam dan menstruktur kebudayaan berbasis agama Islam tradisional (Kuntowijoyo dalam Haliq, 2014). Meskipun mereka relatif dependen terhadap kiai, tetapi dalam praktik ekonomi masyarakat Madura memiliki dependensi dan etos kerja yang tinggi. Kecerdasan sosial masyarakat Madura juga sering membuat urusan yang serius menjadi cepat cair. Masyarakat Madura memiliki selera humor dan sensitifitas kelucuan (Mahfud, 2015). Mereka memiliki kelincahan dalam berkelit dengan logika-logika polos. Mahfud MD mengemukakan bahwa orang Madura cukup pandai berkelit dan cerdik, tetapi tidak licik, sehingga setiap kelincahan berdebat sering dikaitkan dengan kelincahan. Orang Madura, tambah Mahfud (2015), pada umumnya memiliki etos dan semangat kerja yang tinggi. Mereka bukan tipe orang pemalas dan cerdik. Mereka orang yang agamis, egaliter, pemberani, dan sportif.

Secara umum, memahami masyarakat Madura itu bisa jadi *low context communication* dalam urusan ekonomi, dan *high context communication* dalam bidang agama. Ini kadang membuat tradisi sosial politik Madura menjadi sulit ditebak dan sering berubah-ubah. Semua bisa berubah dalam waktu yang relatif singkat dan tergantung kepada arahan dan petunjuk para kiai. Partai politik bagi masyarakat Madura tidak lagi menjadi penting atau menjadi basis ideologi. Bagi mereka, partai politik hanya aksesori dan yang paling penting adalah tokoh. Afiliasi politik mereka sangat bergantung ke mana para kiai berafiliasi politik.

C. Hegemoni Media *Mainstream* dan Eksistensi Media lokal di Madura

Potret media lokal terhimpit dalam hegemoni industri yang lebih mementingkan kehendak pasar dan tidak lagi patuh pada

prinsip-prinsip keutamaan publik. Logika pasar yang menonjolkan fungsi hiburan dan orientasi demi uang dan kapital membuat media lokal tak ubahnya bak *megaphone* bagi para pemodal dan politisi lokal. Isi media lokal tak lagi merepresentasikan kalangan menengah ke bawah, karena mereka selama ini tidak cukup berkontribusi terhadap eksistensi bisnis media lokal. Media lokal akrab menjalin kerja sama dengan para pengusaha, politisi, dan birokrat, sehingga isi media disesaki oleh agenda *setting* kelompok tersebut.

Eksistensi media lokal, sebagaimana amanah reformasi politik adalah tumbuhnya ruang publik yang memungkinkan masyarakat kelas menengah ke bawah bisa memperoleh akses dan kesempatan ikut serta terlibat dalam ruang media. Sehingga bisa membuka wawasan, aspirasi, dan kehendak untuk ikut serta dalam diskursus kepentingan bersama. Namun, cita-cita luhur itu tidak mudah diwujudkan karena tekanan industri media swasta yang memang sejatinya adalah korporat bisnis, sehingga tidak terlalu tertarik untuk berkolaborasi dengan kalangan bawah dan lebih nyaman bekerja sama dengan kalangan elite untuk berbagi relasi kuasa. Semua itu diyakini bisa menjamin eksistensi bisnis mereka dan sekaligus simbiosis mutualisme untuk saling menjaga kelanggengan kekuasaan politik dan ekonomi di tingkat lokal.

Potret media lokal yang kita lihat dan rasakan saat ini memang tidak lepas dari konteks makro, meso, dan mikro ekonomi politik media. Dalam konteks makro, kita bisa melihat betapa perkembangan globalisasi dan kapitalisme masih mencengkeram kuat bisnis media saat ini hingga berlanjut dalam tataran meso, khususnya menyangkut proses produksi dan konsumsi media. Hal itu bisa kita cermati pasca reformasi, sehingga di level teks, isi berita media lokal yang bisa kita rasakan dan cermati saat ini hampir tidak ada yang kritis dan konfrontatif terhadap penguasa dan elit lokal. Teks media dalam banyak hal juga lebih banyak merupakan hasil kompromi, kedekatan, pesanan, dan bentuk lain dari advertorial.

Media lokal berbayar, demikian fenomena yang bisa kita lihat dan rasakan saat ini di berbagai daerah.

Media yang sejatinya adalah penyuguh realitas telah tersesat dan terjerumus ke dalam kepentingan rekayasa media hingga menjadikan realitas sebagai potret asli itu ajang simulasi hingga memproduksi *hyper*-realitas, tempat para pemilik kuasa ekonomi politik menjaga, memanipulasi, dan melanggengkan kepentingan mereka bersama-sama. Isi media kerap mencerminkan apa yang ada dalam kehendak elite dan pemilik modal dan tidak bisa menggambarkan apa yang sesungguhnya muncul dalam realitas sosial di masyarakat bawah.

Situasi seperti ini pernah digambarkan McChesney (2004) dalam Ida (2018), bahwa dominasi korporasi (media korporasi) dan pembuatan kebijakan media memang akan menyisakan berbagai masalah dan kontradiksi-kontradiksi, baik yang dilakukan oleh birokrat, politikus, maupun pengusaha. Relasi kuasa mereka kian sistemik dan hegemonik. Publik, khususnya kelas bawah, dininabobokan oleh media dan menjadi percaya begitu saja terhadap berbagai suguhan media. Banyak konsumen media yang pasrah dan percaya begitu saja terhadap isi yang dikembangkan oleh media sebagai satu-satunya sumber informasi sebagai pemuas dahaga hiburan. Media tidak lagi menjadi penyuguh potret realitas asli, tetapi lebih menjadi konstruksi realitas buatan artifisial yang menyuguhkan *hyper*-realitas. Realitas media seperti itu, yang berada dalam tekanan ekonomi politik media, membuat media kini sekadar menjadi alat dan skrup industri politik.

Potret itu berlaku di sebagian besar negara berkembang termasuk di Indonesia. Sebagai negara yang menganut rezim sentralisasi sebelum reformasi, memang tidak mudah terjadi transisi menuju media demokratis. Apalagi kerap kali reformasi media harus berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang masih bercorak rezim sentralistik. Desentralisasi dan demokratisasi media secara politis bisa jadi tengah berlangsung, tetapi tantangan menuju

demokratisasi harus berhadapan dengan kepemilikan yang kerap berputar kepada pemodal yang itu-itu saja.

Media akhirnya menjadi ajang yang sarat akan berbagai kepentingan aktor. Siapa yang dominan menguasai akan menentukan 'haru biru' isi media. Media konglomerasi juga menjadi jaminan eksistensi media lokal. Hanya media yang berjejaring dengan konglomerasi media yang bisa memiliki harapan untuk bisa tumbuh kembang, sementara yang mandiri hanya mampu bertahan dan menunggu bangkrut akibat persaingan media yang tidak adil dan sehat.

Kebutuhan, kepentingan, dan jaminan akses publik semakin utopis dalam media (penyiaran) lokal. Logika pasar kapital bisa mendistorsi ruang publik lokal yang setara dan adil, dan menjadikannya bagian yang seolah-olah adil. Mereka bisa menentukan siapa dan apa yang harus dimunculkan dan dikesampingkan. Mereka juga bisa memutus orang-orang yang tidak memiliki kekuatan modal untuk membayar *talk show* yang katanya "ruang publik" (*public sphere*). Mereka juga bisa mendikte apa dan siapa yang perlu ditampilkan pada isi media, atau pun mengangkat isu-isu yang sejalan dengan logika pasar mereka. Berbagai persoalan publik dan kelompok marginal semakin dikesampingkan dan dianggap sebagai realitas alami dan wajar.

Semua dijadikan komoditi pasar dan berjalan mengikuti alur pasar. Isu-isu yang sebenarnya merupakan soal strategis bagi publik lokal, tetapi tidak sejalan dengan logika akumulasi pasar akan terus dikesampingkan, sementara yang bisa mendorong akumulasi modal akan terus dieksploitasi terus menerus tiada henti. Komoditas informasi akan selalu memihak kepada kelompok utama pemirsa dan kelompok kepentingan mayoritas konsumen media yang memiliki daya beli.

Publik lokal kini juga mulai mengeluh soal besarnya biaya akses ke media publik, yang tidak memiliki modal politik dan ekonomi semakin sulit untuk mendapat akses ke media. Media

terjebak pada logika nilai jual dan bobot politik yang memiliki kepentingan politik besar. Fenomena *blocking time* marak di berbagai tv lokal dan menjadi suguhan sehari-hari aparatus pemerintah dan partai politik. TV lokal menjadi ajang perebutan pencitraan *public relations* lembaga pemerintah dan partai politik dalam jam tayang utama (*primetime*). Publik semakin tidak punya akses untuk ikut serta dalam diskursus di ruang publik itu dan akhirnya media penyiaran lokal hanya menjadi ajang dominasi dan sosialisasi para pejabat pemerintah dan partai politik.

Selera pasar dan konsumen akan mendorong kekuatan pasar untuk terus memaksimalkan produksi dan akumulasi modal yang muaranya adalah menciptakan konglomerasi dan pemusatan kepemilikan. Jika itu terus berjalan, maka yang terjadi adalah pembelian, *take over* atau merger media penyiaran lokal. Sehingga lambat laun terjadi homogenisasi siaran dan tidak cukup menambah kekayaan demokratisasi penyiaran melalui siaran yang beragam. Konsentrasi modal dan kepemilikan ini juga menjadi problem mendasar dalam perkembangan tv lokal.

Kualitas informasi dalam penyiaran lokal sangat jelas tergambar mana kala konstruksi media mendorong kalangan menengah ke bawah untuk menyukai hiburan dan gosip, sementara kalangan atas dan terpelajar sangat menyenangi informasi dan berita. Hal ini menjadi realitas kesenjangan antar kelas dalam masyarakat, dan hal ini tidak cukup baik untuk memantapkan demokrasi dan ruang publik media lokal.

Logika pasar dan akumulasi modal ini paradoksal dalam perkembangan media lokal. Sangat jelas, proses komodifikasi tayangan tidak selalu seiring dengan kepentingan publik. Himpitan dominasi pasar dan negara inilah yang membuat media lokal gamang. *Public sphere* media lokal, tempat di mana publik lokal bisa menyelenggarakan siaran yang demokratis, rasional, dan bisa mendefinisikan kebutuhan dan kepentingan mereka menjadi semakin jauh untuk diciptakan. Justru yang muncul adalah

diktator-diktator baru yang menciptakan ruang dominasi dan intervensi baru pada publik lokal.

Kepemilikan media lokal akhirnya harus berhadapan dengan fenomena konglomerasi media. Investor dan pengusaha yang memiliki surplus modal kemudian banyak mengambil alih kepemilikan media lokal dan kemudian menjejaringkannya dengan media nasional guna mendapatkan keuntungan bisnis dalam jangka pendek. Tak syak lagi, media lokal akhirnya juga menjadi lahan menguatkan konglomerasi yang melebarkan gurita bisnis ke daerah. Ida (2008) kemudian menjelaskan bahwa terdapat banyak media lokal, tetapi isinya sama dan pemain dalam media penyiaran di Indonesia adalah orang dan kelompok itu-itu saja, meskipun jika dilihat jumlah media massa yang beroperasi di Indonesia lebih banyak. Potret ini pernah disinyalir oleh Hidayat (2008) yang mengutip McChesney sebagai fenomena *rich media poor democracy*.

D. Kebutuhan Media Lokal sebagai Jalan Alternatif

Media massa merupakan salah satu bentuk kebutuhan bagi aktualisasi diri masyarakat. Dalam konteks masyarakat desa yang terisolasi, media akan dapat menjadi salah satu bentuk katalisator bagi masyarakat untuk memahami diri dan lingkungannya. George Gerbner (dalam Severin dan Tankard, 2001) mengemukakan analisa kultivasi (*cultivation analysis*), bahwa media telah menjadi anggota keluarga yang paling banyak menyampaikan pesan. Media telah menjadi pusat budaya masyarakat. Ruang media adalah ruang di mana pesan-pesan budaya ditransaksikan. Termasuk media warga radio komunitas, akan menjadi ruang di mana pesan-pesan budaya masyarakat kepulauan dimediasikan.

Informasi yang ada di masyarakat, mulai dari pengetahuan akan kebutuhan sandang, pangan, papan sampai ke hiburan, dapat tersaji dan disebarkan melalui media warga. Dengan adanya media warga, maka warga bergotong royong dan berperan aktif

menjalankan peran warga sehingga tercipta keseimbangan ruang publik di pedesaan. Warga akan memiliki kepercayaan diri karena memiliki kesetaraan dalam penguasaan informasi.

Peran serta masyarakat bukan hanya menerima informasi, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam mencari informasi yang disebarakan melalui media lokal. Melalui media lokal, masyarakat dapat mengelola dan mengembangkan informasi dan juga meningkatkan nilai-nilai budaya asli, yaitu mempererat tali silaturahmi sesama warga. Semua unsur masyarakat, mulai dari petani, wiraswasta, pemimpin agama, guru, aparat, dan pemuda dapat mengemukakan ide dan gagasan, memberi umpan balik baik melalui lisan maupun tulisan di dalam program media desa.

Masyarakat juga akan bisa berbagi dan berlatih memberikan informasi kepada media desa melalui sms, tulisan berita pendek, laporan pandangan mata untuk memberitahukan situasi dan kondisi yang akan, sedang, dan telah terjadi di masyarakat. Jika masyarakat sudah memiliki kemampuan dasar jurnalisme ini, maka akan terbentuk kebiasaan (*habit*) dan kultur berbagi yang merupakan cikal bakal terbentuknya konsumen media yang loyal dan aktif. Media desa akan menjadi medium rembuk desa yang konstruktif bagi pembahasan masalah kemasyarakatan.

Media lokal dapat menjadi ruang publik yang sehat untuk memediasi kepentingan warga (publik) dan aparaturnegara. Media sebagai perpanjangan/ekstensi dari ruang publik yang bisa menjamin idealisasi *public sphere* dari proses tarik menarik kuasa yang sekaligus menjadi media pembelajaran bersama menuju daulat publik. Hal ini patut ditekankan, mengingat posisi publik selalu berada dalam posisi asimetris dengan negara. Media desa bisa memainkan peran agar posisi tersebut bisa *equal* dan mencerdaskan.

Media lokal diharapkan dapat menjadi media pemberdayaan warga dan menjadi subyek penyiaran di tingkat lokal. Inisiatif dan pengembangan media harus murni berasal dari masyarakat, dikelola, dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Diharap-

kan melalui media lokal, warga dapat berbagi informasi publik yang mendorong keterbukaan informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Selanjutnya, keswadayaan itu dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luar melalui berbagai media baru berbasis *citizen reporter*. Dengan pengembangan dan penguasaan teknologi informasi, masyarakat akan akrab dengan konvergensi media yang terhubung dengan berbagai jaringan informasi masyarakat.

Sudah saatnya masyarakat memiliki media sendiri sebagai basis pemberdayaan warga dan mengurangi hegemoni media arus utama (*mainstream*) yang berbiaya mahal dan susah dijangkau. Media warga tumbuh bersama untuk kebaikan bersama masyarakat pedesaan.

E. Media Lokal sebagai Media Alternatif dalam Menguatkan Suara Arus Bawah

Media lokal akan menjadi media partisipatoris yang paling dekat dengan masyarakat. Ia beroperasi di wilayah terbatas dan bisa fokus untuk memahami apa yang dibutuhkan anggotanya. Media lokal sesungguhnya menurut Ida (2008) bisa menjadi *counter* dari media sentralistis dan bisa menjadi katalis serta konstruksi sosial di masyarakat yang terhegemoni oleh media elite. Melalui media lokal, kelompok-kelompok di dalam masyarakat dapat menyampaikan ide, gagasan, kehendak, dan aspirasinya secara terbuka dan *bottom up*. Sejauh ini suara arus bawah masyarakat masih kesulitan memperoleh ruang dalam media *mainstream* yang hampir selalu membutuhkan biaya besar jika ingin memperoleh akses dan kesempatan menyuarakan aspirasi. Media komunitas menjadi solusi dan jalan keluar yang ekonomis.

Salah satu indikator demokrasi media adalah keberadaan media yang beragam (*diversity of media*). Dengan beragamnya media, informasi tidak bisa dikuasai oleh sebagian pihak dan objektivitas media lebih bisa dicapai. Media memang rentan

digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi sebagian kalangan. Namun dengan keberagaman media, maka media akan terjaga dan bisa saling melengkapi untuk menjaga kepentingan bersama tanpa manipulasi. Jika dapat dikembangkan dengan melibatkan partisipasi lebih luas, maka media akan menjadi kanal demokrasi komunikasi yang efektif. Hal ini akan mampu menjadikan media sebagai salah satu pilar demokrasi karena mampu menjadi ruang publik.

Media yang sehat sesuai prinsip demokrasi memang bertumpu pada dua prinsip, yakni keberagaman isi (*diversity of content*) dan keberagaman pemilik (*diversity of ownership*). Upaya untuk menuju ke arah kondisi ideal tersebut salah satunya adalah dengan mendorong keberadaan media publik dan juga media komunitas. Semakin banyak media publik dan media komunitas, maka informasi akan semakin beragam dan kepentingan publik akan semakin mengemuka menjadi agenda bersama.

Media lokal memiliki peran strategis untuk menjadi salah satu perangkat membuka akses informasi. Banyak pihak meyakini jika informasi yang disampaikan media itu berkualitas, maka media mampu menjadi edukator dan sekaligus inspirator bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Posisi media yang demikian menjadi dambaan bagi masyarakat dan akan turut membentuk peradaban masyarakat yang unggul dan berkualitas.

Selama ini, masyarakat—apalagi yang berada di pedesaan—hanya sekadar menjadi konsumen dan diterpa berbagai informasi media tanpa mengerti apakah itu sesuai dengan apa yang mereka hadapi dan butuhkan setiap hari. Bahkan kadang-kadang berbagai peristiwa dan informasi itu jauh dari realitas yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Mereka tidak memperoleh kesempatan untuk bisa ikut serta terlibat dan berpartisipasi dalam membangun media yang bermutu sesuai dengan aspirasi dan harapan mereka.

Patut pula dicatat bahwa selama ini informasi yang mendidik dan positif semakin sulit diperoleh melalui media arus utama. Isi

media arus utama cenderung komodikatif, tidak berkualitas, dan semakin jauh dari prinsip kepentingan publik. Mereka mengkonstruksi *habit* dan perilaku masyarakat melalui berbagai isi media, sehingga masyarakat terimbas dan akhirnya terpengaruh oleh dampak isi media yang tidak bermutu tersebut. Dampak isi media bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, sungguh mengkhawatirkan. Di sisi lain, pengawasan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Sebagai cara memperkuat pengawasan kultural, maka masyarakat harus terus didorong untuk melakukan kontrol terhadap isi media. Dibutuhkan ikhtiar bersama semua kalangan dengan pendekatan komprehensif untuk bisa menjaga isi media yang positif, mulai dari regulasi hingga literasi masyarakat. Perjuangan ini tidak boleh berhenti guna memperjuangkan ruang public (*public sphere*) yang sehat dan bermanfaat bagi penciptaan peradaban masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, mendorong keberadaan media warga menjadi pilihan yang strategis. Media warga diyakini mampu menjadi penjaga ruang publik yang bisa diandalkan mengingat relatif steril dari kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Sebagai langkah awal, masyarakat sipil harus didorong untuk memiliki media komunitas berbasis warga, tempat di mana mereka berkembang, berdiri, dan berdaya dalam kapasitasnya. Hal ini penting untuk memperkuat basis kekuatan dan konsolidasi sipil mengingat tantangan yang semakin besar, khususnya tekanan pasar. Jika kekuatan sipil lemah, maka pasar akan semakin leluasa mencipta peradaban melalui media sesuai selera mereka.

Untuk itu, kekuatan sipil kelas menengah seperti perguruan tinggi dan kelompok-kelompok strategis harus mengambil peran untuk menjadi barisan depan dalam memperkuat barisan sipil mengawal demokrasi. Melalui pendampingan, warga memiliki media sendiri. Perguruan tinggi telah berkontribusi dalam mendorong, memperkuat konsolidasi masyarakat sipil yang akan

mengantarkan proses transisi dan pematangan demokratisasi di bidang media komunikasi.

Kini masyarakat memiliki keleluasaan dalam memilih program yang disukai. Bahkan pilihan itu kian melimpah. Konsumen media bisa turut menentukan bagaimana program yang bermanfaat bagi peradaban publik. Penting diperhatikan, bahwa pilihan publik ini akan menentukan rating program. Jika publik bisa melihat dengan jernih program yang baik, maka isi media dan industri ini akan bergerak ke arah yang benar. Namun sebaliknya, jika publik mendukung isi program sampah, maka industri akan leluasa menyuguhkan program *low taste* yang menjadi awal keruntuhan keutamaan dan kebaikan ruang publik.

Superioritas industrialisasi media memang mengkhawatirkan. Protes dan *counter* atas isi media kebablasan itu layak dikumandangkan terus melalui gerakan konsumen media yang cerdas dan kritis. Hal ini sekaligus menunjukkan masih adanya kontrol dan kuasa publik atas isi media. Kepemilikan yang berpusat pada segelintir orang juga menjadi paradoks dalam struktur media kita. Hal itu juga semakin mengkhawatirkan. Agenda dan kepemilikan media semakin menjauhkan media dari publik dan hanya menghamba sebagai kepanjangan tangan para pengusaha, khususnya mereka yang berafiliasi dengan partai politik tertentu. Isi dan pemilik media di Indonesia bisa jadi sudah dalam tahap mengkhawatirkan jika tidak ada yang mengingatkan. Ruang publik yang sehat dan patuh kepada kepentingan publik akan semakin jauh dari media kita. Semua itu tentu merisaukan dan membahayakan demokrasi media kita.

Harapan ada pada media komunitas warga. Media warga akan dapat dikelola secara independen dan merdeka yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Melalui media warga, informasi lokal dapat tersaji dan diakses minimal oleh masyarakat lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan media ini oleh sekelompok masyarakat berhasil menunjukkan potensi kekuatannya yang besar untuk

menentukan arah perubahan yang terjadi. Media warga, menurut Arifin (2012) mampu menjawab secara lebih terhadap elemen-elemen dasar jurnalistik seperti kebenaran, loyalitas pada warga, pentingnya verifikasi, independensi, mengawasi kekuasaan dan menyambung lidah, menyediakan forum bagi publik, memikat dan relevan, proporsional dan komprehensif, serta bersumber dari hati nurani.

Melalui media komunitas dan publik, maka kekuatan masyarakat sipil akan semakin solid dalam mengawal demokrasi yang bertumpu pada prinsip PICON (*public's importance, convenience, and necessity*). Semoga upaya untuk mendorong publik memiliki media sendiri akan semakin berkembang hingga media warga dapat menjadi dominan dan media dapat berfungsi menjadi garda depan mengawal dan menjaga kepentingan publik. Semua pihak perlu mengikhtiarkan agar media komunitas dan media warga lokal benar-benar fungsional bagi pembangunan demokratisasi media dengan bertumpu pada prinsip: dari, oleh, dan untuk warga demi kebaikan bersama.

F. Media Warga Lokal Menjadi Harapan Baru

Media penyiaran lokal bak mozaik yang belum utuh dilukis. Hingga kini masih terlihat samar dan di sana-sini masih bopeng-bopeng. Pemandangan indah tentang demokratisasi penyiaran yang bertumpu pada *diversity of content* dan *diversity of ownership* serta perwujudan ruang publik (*public sphere*) yang memberdayakan masyarakat lokal, baik dalam *content* komunikasi maupun ekonomi, belum tampak bentuknya. Ruang publik di media penyiaran lokal yang indah, tempat persemaian gagasan, ide, dan ruang debat yang sehat, rasional, dan cerdas bagi publik lokal masih jauh dari harapan. Ruang itu ternyata menjadi ajang pertarungan kuasa yang rumit dan terdistorsi banyak kepentingan.

Faktor internal dan eksternal berkelindan satu sama lain sehingga sulit diurai mana yang dominan, dan hampir semua

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan media lokal. Faktor internal meliputi sumber daya (individu) dan organisasi/kelembagaan, *media routine*, dan teknologi penyiaran. Sementara faktor eksternal meliputi modal, investor/pengiklan, ideologi, kebijakan negara (regulasi), dan jejaring global. Ruang itu menjadi ajang kontestasi bagi kelompok-kelompok dominan di masyarakat. Sementara publik lokal, termasuk kelompok marginal terlanjur memiliki mimpi-mimpi indah dengan media penyiaran lokal yang akan mengangkat kehidupannya dan melihat dari dekat siaran tentang kehidupannya.

Semangat demokratisasi komunikasi yang memberi warna baru dalam keberagaman isi dan kepemilikan media ternyata dalam perjalanannya harus berhadapan dengan arus liberalisasi media. Arus ini membuat media lokal masuk dalam skrup besar ekonomi global media. Djuarsa (2007) melihat bahwa tren liberalisasi justru lebih kuat ketimbang demokratisasi itu sendiri. Hal ini tampak dalam orientasi media yang lebih menguntungkan kelompok pemegang kekuasaan (ekonomi, politik, dan sosial) yang dominan.

Di sisi lain, publik telah dibuat histeria dan berharap cerita indah tentang peran media lokal—wahana yang memberi mereka tempat untuk berpartisipasi—segera dapat diwujudkan. Namun, cita-cita itu ternyata utopis dan menghadapi kendala yang berat. Media lokal dalam transisi kebijakan media mau tidak mau harus berhadapan dengan kekuatan negara dan pasar, yang menurut Hidayat (2003) sejatinya represif. Perubahan *state regulation* menuju *market regulation* dalam posisi tertentu ternyata bisa menjauhkan publik dari ruang cita-cita demokratisasi media yang diidam-idamkan. Tekanan pasar melalui *invisible hand*-nya mulai terlihat jelas menerkam industri media lokal yang hanya berbekal idealisme *an sich*. Beberapa media lokal yang semula ditopang dengan idealisme kuat, dalam perjalanannya mulai rontok dan tidak mampu bertahan.

Cermatilah bagaimana media lokal yang tersebar di wilayah pedesaan harus tutup dan banyak yang mencoba bertahan, tetapi kesulitan menanggung biaya operasional. Beberapa media televisi lokal kini mulai hanya bisa bertahan dan sekadar bisa menutup biaya operasional tanpa mampu menyisihkan modal untuk meningkatkan pengembangan bisnis dan siaran. Hanya media penyiaran yang bisa memahami logika pasar, khususnya yang patuh M-M-M (*money more money*) yang bisa bertahan. Pasar juga telah memiliki agenda dan konstruksi sendiri, termasuk dalam proses produksi siaran. Bahkan pasar juga menjadi penentu tema perbincangan (dialog), siapa yang menjadi narasumber dan kesimpulan apa yang hendak didialogkan. Pasar dengan logika komodifikasinya menjadikan semuanya sebagai komoditas yang terus menerus di munculkan agar memiliki nilai tukar prospektif saat ini dan masa depan di media penyiaran.

Media lokal juga kerap gamang untuk menakar peran sebagai media informasi, hiburan, pendidikan, dan kontrol sosial. Media lokal menjadi sulit ditakar perannya. Karena di saat yang bersamaan, ia gamang harus melayani kepentingan pasar, negara, atau publiknya. Kepentingan publik dalam tekanan ekonomi pasar dan kekuasaan negara kerap dijadikan nomor buntut dalam kebijakan siaran. Akhirnya, peran media menjadi paradoks, bahkan dalam konteks tertentu bisa menjadi tragedi dan ironi. Bias kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama tidak lagi laten, tetapi menjadi manifes dalam siaran.

Media lokal memang telah terjebak dalam arus besar kepentingan ekonomi politik *an sich*, sehingga wacana dan kontruksi yang dibangun tidak semata-mata untuk publik, kebenaran dan keadilan kelompok marginal, tetapi lebih mencerminkan kepentingan dan agenda ekonomi politik media. Banyak pengamat mengatakan mustahil untuk menanggalkan bias kepentingan itu. Namun, penting bagi media penyiaran lokal untuk tetap memberi tempat terhormat bagi kepentingan publik dan tidak

mudah menjadi partisan, apalagi secara kasat mata terjebak dalam dukung mendukung politik praktis.

Dalam praksis, media swasta lokal juga mulai terlihat mengusung agenda-agenda pasar demi kelanggengan bisnis melalui program acara yang dibuatnya. Media lokal yang hanya menyuarakan kepentingan publik tanpa memperhatikan selera pasar akan memiliki harapan hidup yang rendah. Demikian pula siaran yang tidak heboh (tidak mampu mendramatisasi tema yang serba ekstra) dan bisa memancing pro-kontra serta membentur norma dan kebiasaan yang berlaku akan sulit menjadi komoditas yang dilihat pemirsa.

Homogenisasi siaran tak terhindarkan. Isu-isu yang diusung dalam media utama mulai diikuti media lokal, yakni selalu akseleratif dan tidak akan bertentangan dengan logika pasar. Praktek bisnis yang tidak selaras dengan kepentingan pemodal akan hilang dari pemberitaan media. Media dan kehendak pasar leluasa mengonstruksi apa pun sesuai kepentingan mereka. Ketika media sudah berada dalam kooptasi pasar, maka agenda yang bersesuaian dengan ekspansi pasar yang akan muncul dalam media. Keberpihakan terhadap kalangan minoritas dan agenda publik akan mulai disisihkan. Jika pun ditayangkan, itu juga terkait dengan hiburan bagi ekspansi pasar *heavy viewer tv*. Agenda kalangan miskin dan kelompok marginal akan sekadar menjadi bumbu penyedap dalam siaran dan lagi-lagi bukan ingin mencari solusi meretas penderitaan kaum marginal lokal.

Dalam kompleksitas relasi itu, *interplay* kepentingan akan semakin menarik dicermati. Termasuk relasi antara pemerintah, politisi, tokoh masyarakat, militer, akademisi, LSM, dan berbagai kelompok kepentingan strategis di tingkat lokal. Hal ini yang membuat benturan kepentingan di media lokal semakin mencolok terlihat. Akses publik menjadi terbatas dan media lokal hanya menjadi kelompok dominan tertentu di daerah.

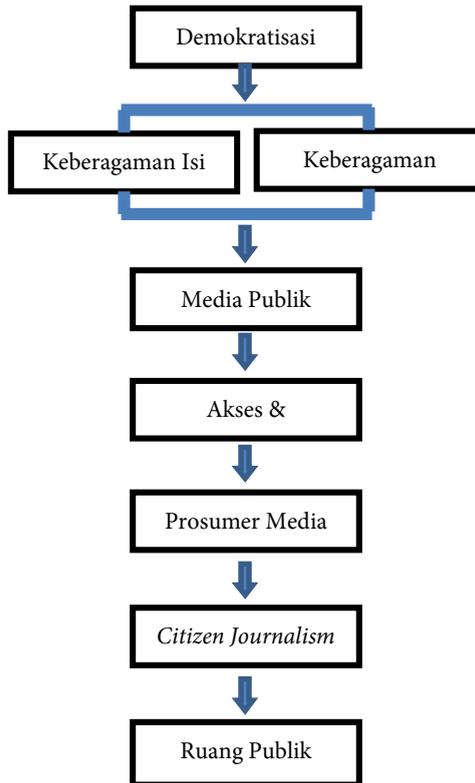
Pekerjaan untuk menempatkan dan mewujudkan media lokal sebagai *public sphere* dalam demokratisasi masih butuh waktu dan dukungan semua pihak. Penguatan peran publik lokal dan tekanan publik melalui advokasi dan *media literacy* yang berkesinambungan menjadi taruhan terakhir untuk mengurangi pesimisme media penyiaran lokal sebagai persemaian daya kritis masyarakat lokal.

Dalam perjalanannya, media lokal mengalami pasang surut dan tidak sedikit yang akhirnya menyerah, tidak mampu bertahan (*survival*), dan kemudian gulung tikar. Spirit publik yang berkobar-kobar pada saat reformasi tersebut akhirnya harus berhadapan dengan seleksi alam dan ganasnya bisnis media. Bagi yang semula hanya berbekal semangat, akhirnya mengakui bahwa bisnis media penuh risiko, tidak seindah yang dibayangkan seperti pada awal pendirian. Akhirnya, pada awal-awal perkembangan, media lokal lebih banyak terfokus pada usaha untuk sekadar *survive* dan belum banyak yang berpikir tentang pengembangan (*development*).

Di balik fakta itu, optimisme wajib terus dikibarkan dan dinyalakan. Selalu ada jalan menuju Roma. Media komunitas dan lokal harus terus dikibarkan dan digalakkan untuk berkiper dan tumbuh guna meraih keswadayaan masyarakat dan bisa dikelola dengan bertumpu dari, oleh, dan untuk masyarakat dan warga lokal dengan menguatkan kepemilikan dan keberagaman siaran. Pengembangan media lokal bisa dikembangkan dengan melatih warga menjadi pewarta (reporter), sehingga warga bisa menjadi prosumer: sebagai konsumen sekaligus sebagai produsen media.

Penguatan media lokal melalui kejelasan kelembagaan dengan badan hukum yang absah guna menghindari konflik dan keberlanjutan. Penguatan program siaran mesti melalui program berbasis jurnalisme dan kebutuhan warga, sehingga isi siaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Penguatan pendanaan juga perlu melalui strategi *fund rising*, baik melalui *online* maupun *offline*, sehingga pendanaan media komunitas bisa kian mapan dan independen. Pengembangan teknologi media perlu pula dipikirkan

melalui adopsi teknologi media 2.0 guna peningkatan kapasitas media dan jejaring media.



G. Kesimpulan

Media lokal diyakini dapat mendorong demokratisasi komunikasi di tingkat lokal. Masyarakat dapat terlibat aktif dalam berbagai diskusi terkait kepentingan dan permasalahan mereka hingga dapat mencari solusi secara mandiri dan berkelanjutan. Media lokal harus lebih kuat dan bisa memainkan peran yang lebih luas dalam pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui kepemilikan media lokal, masyarakat akan kian berdaya dan dapat mengikuti perkembangan lingkungan sosial, pengetahuan, dan teknologi, dan akan berkembang menjadi *learning society*: masyarakat yang tidak henti belajar sepanjang waktu dan berkelanjutan sebagai prosumer.

Media lokal diyakini bisa menjadi salah satu upaya strategis untuk memberdayakan warga di tingkat lokal agar bisa menjadi subyek pelaku utama proses pembangunan di daerahnya, khususnya dalam hal penguasaan, produksi, dan distribusi informasi. Sejauh ini masyarakat masih menjadi obyek *an sich*. Akses dan partisipasi yang menjadi basis utama adanya demokrasi media sejauh ini masih minimalis. Masyarakat masih berada dalam himpitan perkembangan media massa yang kian liberal dan pro pasar. Harus diakui, hingga kini perannya kian termarginalisasi. Masyarakat nyaris tak berdaya dan hampir tidak ada yang terlibat aktif dalam pengelolaan dan kepemilikan media lokal. Mereka hanya menjadi obyek dan konsumen media *an sich*.

Pilihan mengembangkan media lokal ini bukannya pilihan mudah dan ideal di tengah hegemoni kapitalisasi media. Ikhtiar mengembangkan media lokal ini sungguh banyak tantangan dan membutuhkan prasyarat gotong royong, kekompakan, ketahanan, kesabaran, dan membutuhkan waktu lama untuk bisa eksis dan berkembang. Mereka membangun mulai dari kecil dan dari bawah, atas partisipasi dan sumbangan bersama yang diharapkan dapat kian membesar dan membentuk jaringan. Sehingga bisa tumbuh bersama dan menjadi kuat berkesinambungan.

Sejauh ini perkembangan media lokal—para peneliti sering menyebutnya dalam beragam istilah seperti media lokal, media partisipatoris, media alternatif, media warga, media arus bawah, media berjangkau terbatas, dan sebagainya—memang belum menggembirakan. Inisiasi yang dilakukan berbagai komunitas dan warga di Madura dalam membangun media lokal menghadapi beragam masalah, sehingga hanya sekadar bisa bertahan dan tumbuh kembang (*survive*). Tidak jarang kemudian media lokal itu berhenti beroperasi dan akhirnya pasrah pada kehendak alam, berhenti, dan tidak lagi bisa memproduksi. Setelah dilakukan penelusuran mendalam, masalah pengembangan media komunitas (lokal) di Madura memang kompleks dan butuh solusi komprehensif.

Sejauh ini, tidak hanya persoalan teknis pengelolaan yang membuat pengelolaan media lokal di Madura sarat masalah. Di level makro, regulasi dan masyarakat juga tidak kalah problematik. Media di tingkat lokal juga menghadapi beragam problem pelik baik aspek kultural, politis, maupun struktural, sehingga membuat masyarakat kerap hanya sekadar menjadi obyek media. Perbedaan (*gap*) yang tinggi antar kelas juga membuat suara arus bawah kerap tidak terekam oleh media arus utama, dan media itu lebih banyak menjadi aparatus birokrasi dan kelompok elite lokal yang berkuasa. Suara arus bawah menjadi samar-samar (*absurd*) dan terhegemoni kelompok elite yang terus melanggengkan kuasa dan legitimasinya. Situasi itu kian melenyapkan suara arus bawah masyarakat Madura. Suara arus bawah nyaris tak terdengar dan dipertimbangkan dalam berbagai agenda kebijakan publik.

Tantangan media lokal tidak mudah. Di tengah hegemoni ekonomi politik, media lokal berpotensi tunduk kepada kehendak pasar, kepada siapa yang berani membayar, dan kepada siapa yang punya akses kuasa ekonomi politik. Namun, situasi ini tentu harus dihadapi dengan semangat dan optimisme bahwa masih ada jalan cerah untuk mengembangkan media-media lokal baru. Dengan jalan ini, suara arus bawah tetap terdengar. Bila perlu, semakin nyaring terdengar, banyak muncul di permukaan, dan mendapat tempat dalam media arus utama. Media diharapkan dapat menjadi ruang publik (*public sphere*) demokratis yang menumbuhkan kesadaran mandiri yang memungkinkan mereka berinisiatif dan tumbuh atas kemampuan yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Gazali, Effendi dkk, (2003). *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran*, Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi UI & IFES.
- Haliq, Fathol, (2014). Perilaku Politik Kelas Menengah Madura. *Jurnal KARSA*, Vol. 22 No. 2, Desember 2014. Pamekasan: STAIN Madura.
- Hidayat, Dedy N., dkk, (2000). *Pers dalam Revolusi Mei, Runtuhnya sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Henriquest, Embu (2002). Ruang Publik Media Jurnal, Public Sphere dan Media Massa di Indonesia pada Era Orba dan Reformasi: Sebuah Analisis Politik Ekonomi menurut Pendekatan Strukturalis. *Jurnal Respons*, Vol. 7, Nomor 01, Juli 2002. Jakarta: Pusat Pengembangan Etika, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Ida, Rachmah (2008). *Media, Pasar, dan Regulasi: Dinamika Media Penyiaran Lokal di Indonesia Pasca-Reformasi*. Pengantar dalam buku *Media Penyiaran Lokal yang Kuat* (2008). Surabaya: Reform Media.
- Kitley, Philip, (Ed.). (2003). *Television, Regulation, and Civil Society in Asia*. London dan New York: Routledge Curzon.
- Maryani, Eni (2011). *Media dan Perubahan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Masduki, (2007). *Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: LkiS.
- Nugroho, Yanuar, Sofie Shinta (2012). *Melampaui Aktivisme Click? Media Baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Rachmiate, Atie (2007). *Radio Komunitas Eskalasi Demokratisasi Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rennie, Ellie (2006). *Community Media: A Global Introduction (Critical Media Studies: Institutions, Politics, and Culture Series)*. UK: Rowman dan Littlefield Publishers.

- Rifai, Ahmad Mien (2007). *Manusia Madura, Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Shoemaker, Pamela J., dan Stephen D. Reese (1996). *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. New York: Longman Publishers.
- Sudibyo, Agus (2007). *Ekonomi Politik Media Penyiaran Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Sudibyo, Agus (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LkiS.
- Siregar, Ashadi (2003). Etika Jurnalisme Televisi di Tengah Disorientasi Negara dan Pasar. *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik (JSP)*, Vol. 7 No. 2, Yogyakarta: FISIP-UGM.
- Siregar, Amir Effedi, dkk (2010). *Potret Manajemen Media di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Tripambudi, Sigit (2011). Radio Komunitas sebagai Media Alternatif untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Prodi Ilmu Komunikasi, Vol. 9, No. 3. Yogyakarta: FISIP UPN Veteran.
- Wiyata, latief A. (2013). *Mencari Madura*. Jakarta: Bidik Phronesis.

